



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2014 - 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2013**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2014-2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, perlu dijabarkan ke dalam dokumen rencana yang lebih implementatif;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2014 – 2018**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Tulungagung;

- c. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung;
- i. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2018, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- j. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- k. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

- l. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- m. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;  
Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
- p. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## **Pasal 2**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

### **Pasal 3**

Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan pedoman seluruh SKPD dalam menyusun dokumen Renstra SKPD.

### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, harus dijabarkan ke dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

**Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal : 03 September 2013**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

ttd

**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 14 November 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590919 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**  
  
Ir. HENANG SUGHARTI, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570225 199203 2 003



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2018**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat (3) huruf e perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah periode Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		Hal
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1	Latar Belakang	I – 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I – 4
1.4	Sistematika Penulisan	I – 5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>II – 1</b>
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1	Kondisi Geografis	II – 1
2.1.2	Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Wilayah Kabupaten Tulungagung	II – 4
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II – 7
2.1.4	Kondisi Demografi	II – 12
2.1.5	Penggunaan Lahan	II – 14
2.1.6	Potensi Pengembangan Wilayah	II – 16
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 28
2.2.1	Perekonomian	II – 28
2.2.2	Kesejahteraan Sosial	II – 34
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II – 37
2.3.1	Pendidikan	II – 37
2.3.2	Kesehatan	II – 41
2.3.3	Pekerjaan Umum	II – 45
2.3.4	Perumahan Rakyat	II – 46
2.3.5	Penataan Ruang	II – 46
2.3.6	Lingkungan Hidup	II – 47
2.3.7	Kependudukan dan Catatan Sipil	II – 47
2.3.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II – 48
2.3.9	Ketenagakerjaan	II – 49
2.3.10	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	II – 50
2.3.11	Penanaman Modal	II – 51
2.3.12	Komunikasi dan Informatika	II – 52
2.3.13	Pariwisata	II – 56
2.3.14	Perdagangan	II – 57
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II – 59
2.4.1	Kemampuan Keuangan Daerah	II – 59
2.4.2	Fasilitas Infrastruktur	II – 60
2.4.3	Iklim Investasi	II – 62
2.4.4	Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global	II – 63

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>III – 1</b>
	3.1 Pendapatan Daerah	III – 2
	3.2 Belanja Daerah	III – 7
	3.3 Pembiayaan Daerah	III – 10
	3.4 Neraca Daerah	III – 14
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>IV – 1</b>
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV – 1
	4.2 Isu-isu Strategis Pembangunan	IV – 1
	4.2.1 Pendidikan	IV – 1
	4.2.2 Layanan Kesehatan	IV – 3
	4.2.3 Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	IV – 4
	4.2.4 Infrastruktur	IV – 7
	4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi	IV – 7
	4.2.6 Penanggulangan Kemiskinan	IV – 8
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>V – 1</b>
	5.1 Visi	V – 1
	5.2 Misi	V – 2
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V – 3
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>VI – 1</b>
	6.1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Murah dan Berkualitas Serta Pelestarian/Pengembangan Kebudayaan	VI – 1
	6.2 Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas	VI – 3
	6.3 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis	VI – 4
	6.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor-Sektor yang Lain	VI – 6
	6.5 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan Kewirausahaan	VI – 7
	6.6 Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pola Terpadu	VI – 8
<b>BAB VII</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>VII – 1</b>
	7.1 Kebijakan Umum	VII – 1
	7.2 Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	VII – 3
<b>BAB VIII</b>	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN</b>	<b>VIII – 1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH</b>	<b>IX – 1</b>
<b>BAB X</b>	<b>PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN</b>	<b>X – 1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunan Kabupaten Tulungagung sendiri maupun kabupaten sekitarnya. Dengan keadaan tersebut, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi besar serta tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang didukung oleh pilar aparatur atau birokrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tahun 2013. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para

pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJMD.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Bupati terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang yang melibatkan para stakeholder, yang ada di Kabupaten Tulungagung.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- n. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025; dan
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Tulungagung, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulungagung.

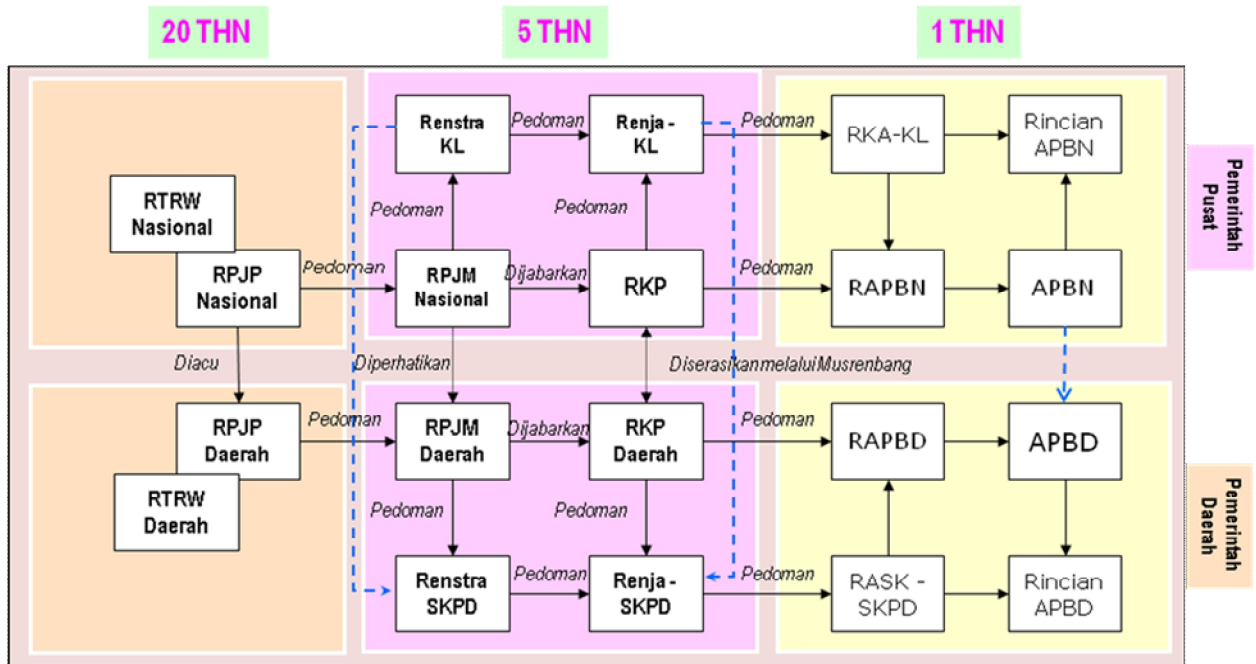
Selain memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tulungagung, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan target pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara diagramatis

hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar I.1.

**Gambar I.1.**  
**Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya**



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 terdiri dari 10 (sepuluh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.



## Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Tulungagung yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

## Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

## Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

## Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 – 2018 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

## Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

**Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

**Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

**Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati periode berikutnya.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Kabupaten Tulungagung selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Kabupaten Tulungagung juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung, dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki.

#### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 Km<sup>2</sup> yang terletak diantara 111°43' – 112° 07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan.

Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.

**Tabel II.1**  
**Potensi Fisik Dasar Kabupaten Tulungagung**

No.	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Luas Wilayah	1.055,65 Km2 atau 105.565 Ha
2	Titik Koordinat	111°43'BT - 112°07' BT dan 07°51' LS'- 08°18' LS
3	Batas-batas	
	- Sebelah Utara	Kabupaten Kediri
	- Sebelah Timur	Kabupaten Blitar
	- Sebelah Selatan	Samudera Indonesia
	- Sebelah Barat	Kabupaten Trenggalek
4	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	19 Kecamatan
	- Kelurahan	14 Kelurahan
	- Desa	257 Desa

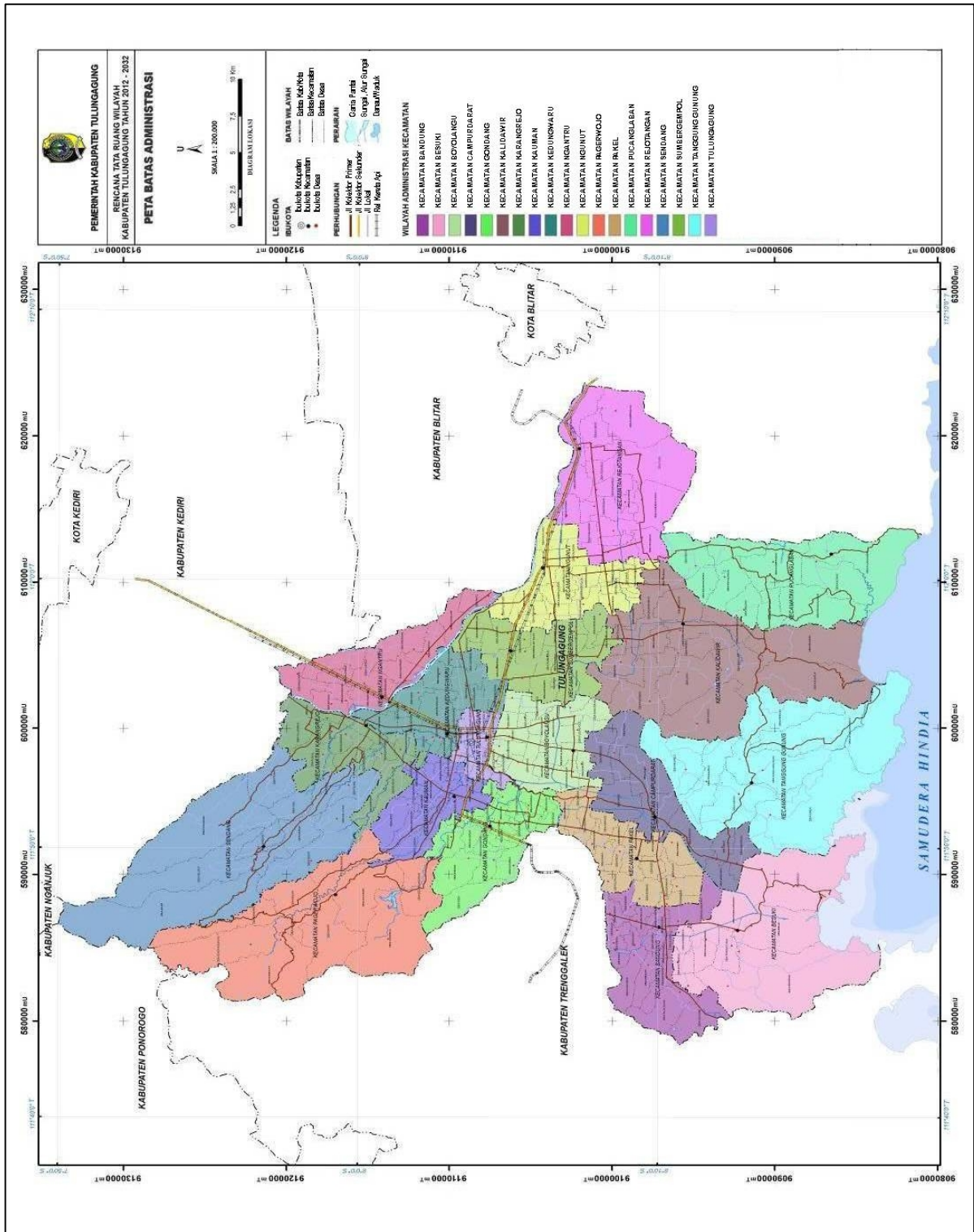
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

**Tabel II.2**  
**Pembagian Wilayah**

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Besuki	10	21	44	226
2.	Bandung	18	45	95	333
3.	Pakel	19	45	93	317
4.	Campurdarat	9	27	78	330
5.	Tanggunggunung	7	37	73	173
6.	Kalidawir	17	54	134	443
7.	Pucanglaban	9	24	46	170
8.	Rejotangan	16	45	146	480
9.	Ngunut	18	37	149	443
10.	Sumbergempol	17	46	121	372
11.	Boyolangu	17	44	107	462
12.	Tulungagung	14	-	93	331
13.	Kedungwaru	19	45	131	498
14.	Ngantru	13	43	116	361
15.	Karangrejo	13	39	72	264
16.	Kauman	13	34	90	311
17.	Gondang	20	49	104	379
18.	Pagerwojo	11	37	62	230
19.	Sendang	11	52	97	281
<b>Jumlah</b>		<b>271</b>	<b>724</b>	<b>1.851</b>	<b>6.404</b>

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

Gambar II.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



## 2.1.2 Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Wilayah Kabupaten Tulungagung

### a. Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 Ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi :

- Kawasan seluas ± 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut.
- Kawasan seluas ± 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut.
- Kawasan seluas ± 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan air laut.
- Kawasan seluas ± 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. **Dataran rendah** merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. **Dataran sedang** dengan ketinggian 500 – 700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. **Dataran tinggi** dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni :

- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas ± 25 %;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;

- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya; meliputi areal seluas  $\pm 35\%$ .

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1 % kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.3**  
**Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah**

No.	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Prosentase
I	Datar	0 – 2	43.070,52	40,8
II	Datar – landai	2 – 8	5.172,69	4,9
III	Landai – berombak	8 – 15	7.600,68	7,2
IV	Berombak – bergelombang lemah	15 – 25	14.567,96	13,8
V	Bergelombang lemah – kuat	25 – 40	21.113,00	20,0
VI	Bergelombang kuat	> 40	14.040,15	13,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

#### b. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata

air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

c. Klimatologi

Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27<sup>0</sup>C dengan suhu terendah 24<sup>0</sup>C dan suhu tertinggi 30<sup>0</sup>C. Kelembaban udara berkisar antara 74 - 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.

**Gambar II.2**  
**Peta Tematik Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tulungagung**



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032



Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah peka atau rawan bencana dan wilayah kritis di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah rawan banjir terjadi karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter diatas permukaan air laut dengan kelerengan 2-15%, selain itu karena terdapatnya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan dalam tanah yang relatif sulit menyerap air (tanah clay). Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat diindikasikan beberapa kawasan yang juga mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari penggerusan oleh air terutama air hujan dengan curah hujan yang lebat. Berikut merupakan tabel kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel II.4**  
**Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung**

No	Nama Pantai	Lokasi		Panjang (Km)
		Desa	Kecamatan	
1	Nglarap, Klatak, Bayeman	Keboireng	Besuki	± 6.90
2	Brumbun, Gerangan	Ngrejo	Tanggunggunung	± 8.25
3	Sine	Kalibatur	Kalidawir	± 7.20
4	Sidem, Popoh	Basole	Besuki	± 6.45

*Sumber: Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 854 Tahun 2002*

**Tabel II.5**  
**Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten Tulungagung**

No	Nama	Lokasi	Kemiringan	Keterangan
1	Zone Kerentanan gerakan tanah sangat rendah	Daerah Tulungagung, Kauman, sekitar Bandung, sebelah utara Besuki. Sebelah utara Kalidawir, Karangrejo, Ngantru, Sumbergempol, Gondang dan Kedungwaru	<5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lereng dibentuk oleh Aluvium (Qa)</li> <li>- terjadi di daerah sekitar sungai</li> </ul>
2	Zone Kerentanan gerakan tanah rendah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo	5-15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan batuan</li> <li>- terjadi pada tebing lembah sungai (alur)</li> </ul>
3	Zone Kerentanan gerakan tanah menengah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Bandung, Karangrejo, Boyolangu	(5-15%)-(50-70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vegetasi penutup kurang</li> <li>- umumnya terjadi pada perbatasan lembah sungai, peralihan litologi, atau tebing jalan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi</li> <li>- Dibentuk oleh pelapukan batuan</li> </ul>
4	Zone Kerentanan gerakan tinggi	Daerah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang, Pagerwojo	Agak Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona ini sering terjadi gerakan tanah akibat curah hujan intensitas tinggi</li> <li>- Dibentuk oleh tanah pelapukan pada batuan dasar bersifat gembur</li> <li>- Vegetasi umumnya relatif kurang</li> </ul>

Sumber: Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 854 Tahun 2002

Gempa bumi yang terjadi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan berupa retakkan pecah (*fault rupture*), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau pelepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

**Tabel II.6**  
**Potensi Gempa Menurut Skala *Modified Mercally Intensity*(MMI)**

Skala	Keterangan
I	Sangat jarang /hampir tidak ada orang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf
II	Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan
III	Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di gedung tinggi. Mobil parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat
IV	Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, diluar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.
V	Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang-barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak, barang-barang yang tidak stabil akan roboh, pandulum jam dinding akan berhenti.

Skala	Keterangan
VI	Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak
VII	Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada bangunan yang desain konstruksinya jelek, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti.
VIII	Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang jelek, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecah dan lepas dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.
IX	Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa-pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.
X	Sejumlah bangunan kayu dengan desain yang baik rusak, sebagian besar bangunan tembok rusak termasuk fondasinya. Retakan pada tanah akan semakin banyak, tanah longsor pada tebing tebing sungaidan bukit, air sungai akan melimpas di atas tanggul.
XI	Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, jembatan putus, rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.
XII	Kerusakan total, gerakan gempa terlihat bergelombang diatas tanah, benda-benda berterbangan keudara.

Sumber : BPBD Tulungagung

Bencana alam lain yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah tanah longsor dan angin puting beliung. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah-wilayah yang pernah terkena dampak bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.7**  
**Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung**

Tahun/Bencana/Lokasi
<b>Tahun 2008</b>
Bencana tanah longsor di Desa Nglurup Kec. Sendang, Desa Kedoyo Kec. Sendang, Desa Krosok Kec. Sendang, Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo, Desa Samar Kec. Pagerwojo, Desa Nglurup Kec. Sendang, dan Desa Geger Kec. Sendang
<b>Tahun 2009</b>
Bencana tanah longsor di Desa Pagerwojo Kec. Pagerwojo, Desa Samar Kec. Pagerwojo, Desa Samar Kec. Pagerwojo, dan Desa Gondanggunung Kec. Pagerwojo
<b>Tahun 2010</b>
Puting Beliung di Desa Ngentrong Kecamatan Besuki, dan Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan
<b>Tahun 2011</b>
Bencana banjir di Desa Pelem dan Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, dan Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir
Rumah roboh karena hujan deras disertai angin kencang di Desa Pelem dan Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, dan Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir
<b>Tahun 2012</b>
Bencana tanah longsor di Dsn Tumpak Nongko Ds. Samar Kec. Sendang, Desa Picisan Kec. Sendang, Ds. Krosok Kec. Sendang, Ds. Karangnom, Ds. Kates dan Ds. Kl. Bret Kecamatan Kauman, Ds. Wonorejo Kec. Pagerwojo, Ds. Sidomulyo Kec. Gondang, Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo, Desa Tugu Kec. Sendang, Desa

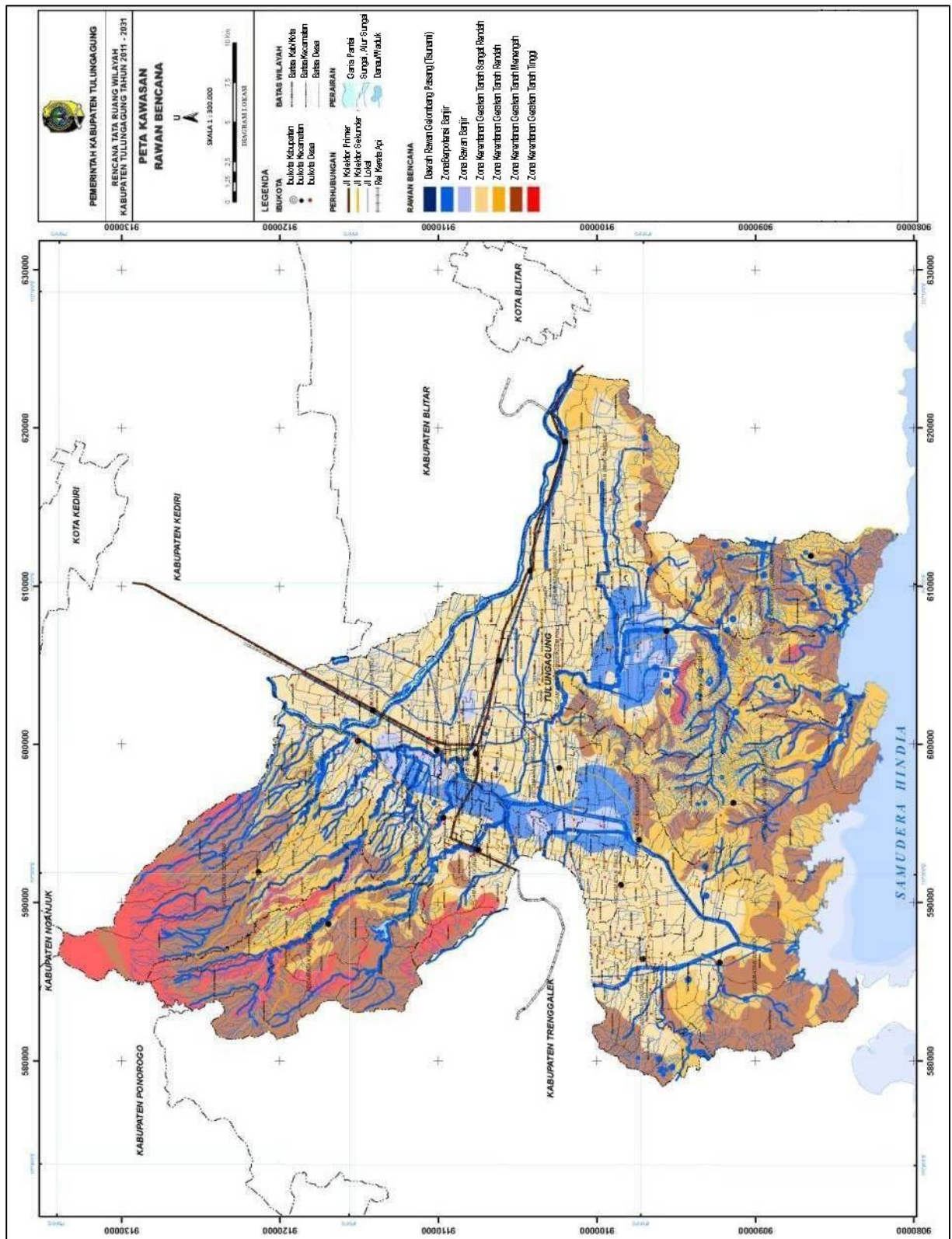
Tahun/Bencana/Lokasi
Moyoketen Kec. Boyolangu, Ds. Sawo Kec. Campurdarat, dsn Boto RT.03/RW.02 Ds./ Kec. Pagerwojo, usun Bantengan RT.01/RW.05 Ds. Mulyosari Kec.Pagerwojo, Dsn Tambak RT.02/RW.02 Desa Krosok Kecamatan Sendang, Ds. Penjor Kec. Pagerwojo,
Bencana banjir di Ds. Serut Kec. Boyolangu, Ds.Tanjungsari Kec. Boyolangu, Desa Moyoketen Kec. Boyolangu, Ds. Sawo Kec. Campurdarat, Desa Pakel Kec.Pakel, Ds. Babadan Kec. Karangrejo, Ds. Bolorejo Kec. Kauman
Bencana angin puting beliung di Ds. Sidomulyo Kec. Gondang, Dsn Duwet Ds. Wates Kec. S.gempol, ds. Tengkur dan Ds. Tegalrejo Kec.Rejotangan, Desa Tiudan Kec. Gondang, Ds. Blendis Kec. Gondang, Ds. Buntaran Kec. Rejotangan, Ds. Sumberagung Kec. Rejotangan, Ds. Bolorejo Kec. Kauman, Ds. Gesikan Kec, Pakel, Ds. Wates Kec. Campurdarat, Dsn. Cluwok Ds. Gondosuli Kec. Gondang, Dusun Sanan Ds. Pucangan Kec. Kauman, ds. Ngantru Kec. Ngantru, Ds. Bendosari Kec. Ngantru,
Tahun 2013
Bencana tanah longsor di Desa Picisan Kec. Sendang, dsn Berak Rt 03/Rw. 01 Ds. Bungur Kec.Karangrejo, Ds. Nyawangsan Kec.Sendang, Ds. Sidomulyo Kec. Pagerwojo
Bencana angin puting beliung di Desa Manding Kec. Pucanglaban, Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol
Bencana banjir di Desa Domasan, Desa Tunggangri, dan Desa Salak kembang Kecamatan Kalidawir.

Sumber : BPBD Tulungagung

Bentuk kewaspadaan yang harus dilakukan terkait dengan kejadian bencana adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat, daerah maupun wilayah melalui tindakan dini (sebelum bencana terjadi). Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan pencegahan. Oleh karenanya, tindakan menghindari ini efektif sebelum bencana itu terjadi, atau untuk mengantisipasi bencana yang bisa terjadi di kemudian hari.
- b. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat, daerah maupun wilayah berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi.
- c. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu dan masyarakat yang terkena bencana supaya bisa bertahan hidup dengan cara melepaskan penderitaan yang langsung terjadi pada mereka yang terkena bencana.
- d. Memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi dapat diutamakan antara lain perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih dll.
- e. Mempercepat pemulihan kondisi sehingga individu dan masyarakat bangkit ke kondisi sebelum bencana, atau bahkan mengejar ketertinggalan dari individu atau masyarakat lain yang tidak terkena bencana.

Gambar II.3  
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

#### 2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2012 sebanyak 1.048.472 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 523.788 jiwa atau sebesar 49,96% dan penduduk perempuan sejumlah 524.684 jiwa atau sebesar 50,04%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 86.659 jiwa atau sebesar 8,26%, sedangkan Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.506 jiwa atau 2,43% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung.

**Tabel II.8**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2012**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km <sup>2</sup> )
1	Besuki	18.445	18.318	36.763	447
2	Bandung	24.826	23.596	48.422	1.154
3	Pakel	26.146	26.191	52.337	1.451
4	Campurdarat	28.054	27.416	55.470	1.402
5	Tanggunggunung	12.628	12.878	25.506	217
6	Kalidawir	34.798	34.873	69.671	712
7	Pucanglaban	12.967	13.647	26.614	321
8	Rejotangan	37.772	37.706	75.478	1.135
9	Ngunut	38.981	39.793	78.774	2.089
10	Sumbergempol	32.899	32.864	65.763	1.674
11	Boyolangu	38.121	37.405	75.526	1.965
12	Tulungagung	34.176	35.119	69.295	5.069
13	Kedungwaru	43.896	42.763	86.659	2.914
14	Ngantru	27.912	27.313	55.225	1.491
15	Karangrejo	19.788	20.377	40.165	1.130
16	Kauman	25.654	26.458	52.112	1.690
17	Gondang	28.046	28.279	56.325	1.280
18	Pagerwojo	15.251	15.496	30.747	349
19	Sendang	23.428	2419. 2	47.620	494
<b>Jumlah</b>		<b>523.788</b>	<b>524.684</b>	<b>1.048.472</b>	<b>993</b>

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 meningkat sebesar 2,29% dari tahun 2008.

**Tabel II.9**  
**Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Kepadatan (Jiwa/Km<sup>2</sup>)</b>
2012	1.048.472	993
2011	1.043.385	988
2010	1.037.369	983
2009	1.030.926	977
2008	1.025.034	971

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

Dengan luas wilayah 1.055,65 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk pada tahun 2012 sebesar 993 jiwa per kilometer persegi, hal ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 993 orang. Kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Tulungagung, yaitu 5.069 orang per kilometer persegi, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Tanggunggunung sebesar 217 orang per kilometer persegi. Kepadatan tahun 2012 meningkat sebesar 0,51% dari tahun 2011.

**Tabel II.10**  
**Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 - 4 tahun	41.692	41.762	83.454
2	5 - 9 tahun	43.627	43.705	87.332
3	10 - 14 tahun	43.572	43.645	87.217
4	15 - 19 tahun	37.879	37.946	75.825
5	20 - 24 tahun	33.600	33.658	67.258
6	25 - 29 tahun	40.795	40.864	81.659
7	30 - 34 tahun	39.961	40.033	79.994
8	35 - 39 tahun	41.465	41.534	82.999
9	40 - 44 tahun	41.783	41.854	83.637
10	45 - 49 tahun	37.552	37.615	75.167
11	50 - 54 tahun	31.108	31.162	62.270
12	55 - 59 tahun	25.845	25.893	51.738
13	60 - 64 tahun	18.433	18.463	36.896
14	65 +	46.476	46.550	93.026
<b>TOTAL</b>		<b>523.788</b>	<b>524.684</b>	<b>1.048.472</b>

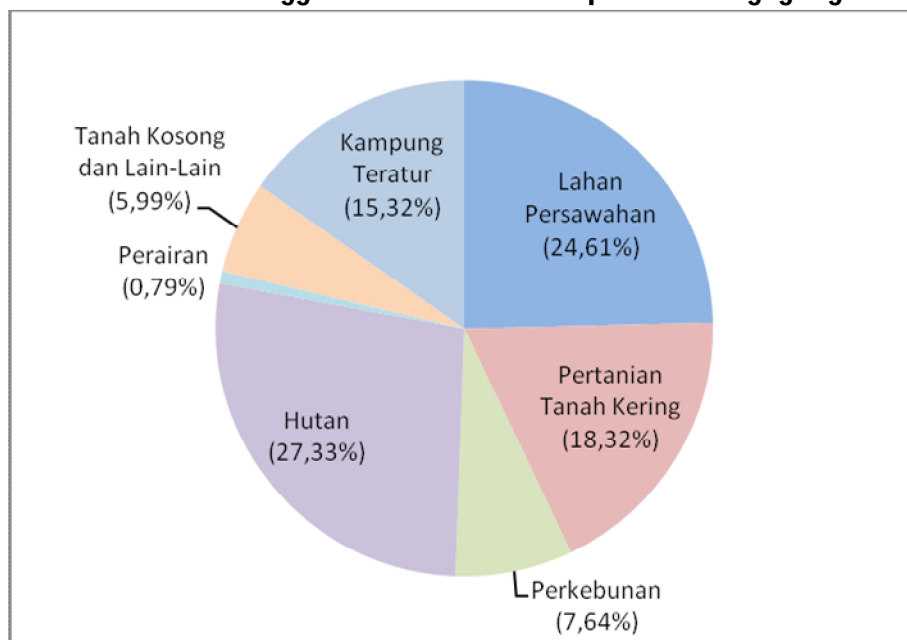
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

### 2.1.5 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan lahan pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan lahan di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan lahan bersifat dinamis, artinya penggunaan lahan dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau yang sekarang kita kenal dengan rencana umum tata ruang perlu diperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya adalah penggunaan lahan yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut:

**Gambar II.4**  
**Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung**



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, diolah kembali



a. Lahan Persawahan

Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61 %. Lahan ini merupakan lahan yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar dengan kelerengan 0-3 %. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan mudah diolah.

b. Pertanian Tanah Kering

Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten Tulungagung lahan pertanian tanah kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.

c. Perkebunan

Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih 7,64%.

d. Hutan

Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33 % menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian menempati daerah pegunungan selatan.

e. Perairan

Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk perikanan air tawar. Di Kabupaten Tulungagung menempati areal seluas 0,79 %.

f. Kampung Teratur

Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk dengan luas 15,32%.

g. Tanah Kosong dan Lain-Lain

Tanah kosong dan lain-lain adalah areal yang belum dimanfaatkan dengan luas 5,99%.

### 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sector oleh semua stakeholders pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:

- a. Penetapan pusat perkotaan;
  1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
  2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
    - PKLp Perkotaan Karangrejo;
    - PKLp Perkotaan Ngunut; dan
    - PKLp Perkotaan Campudarat.
  3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
    - Perkotaan Boyolangu;
    - Perkotaan Kauman;
    - Perkotaan Gondang;
    - Perkotaan Sendang;
    - Perkotaan Ngantru;
    - Perkotaan Pagerwojo;
    - Perkotaan Pakel;
    - Perkotaan Bandung;
    - Perkotaan Sumbergempol;
    - Perkotaan Besuki;
    - Perkotaan Rejotangan;
    - Perkotaan Kalidawir;
    - Perkotaan Pucanglaban; dan
    - Perkotaan Tanggunggunung.

- b. Rencana fungsi pusat pelayanan meliputi :
1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;
  2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
  3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
  4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.
- c. Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan meliputi :
1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan peribadatan;
  2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
  3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
  4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan peribadatan.

d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif.

Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha mikro.

Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kawasan peruntukan industri besar meliputi:

- Kecamatan Kauman;
- Kecamatan Kedungwaru;
- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Sumbergempol;
- Kecamatan Campurdarat;
- Kecamatan Ngunut; dan
- Kecamatan Ngantru.

Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:

Industri menengah berbagai jenis terdapat di:

- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Ngunut;
- Kecamatan Kedungwaru;
- Kecamatan Tulungagung;

- Kecamatan Ngantru
- Kecamatan Karangrejo; dan
- Kecamatan Kauman.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:

- kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi:
  - Kecamatan Campurdarat; dan
  - Kecamatan Besuki;
- kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi:
  - Kecamatan Tulungagung;
  - Kecamatan Boyolangu; dan
  - Kecamatan Kedungwaru.
- kawasan sentra tembakau meliputi:
  - Kecamatan Gondang;
  - Kecamatan Boyolangu;
  - Kecamatan Pakel ; dan
  - Kecamatan Campurdarat
- kawasan sentra industri batik meliputi:
  - Kecamatan Kedungwaru; dan
  - Kecamatan Kauman.
- kawasan sentra industri konveksi meliputi:
  - Kecamatan Tulungagung;
  - Kecamatan Kedungwaru; dan
  - Kecamatan Boyolangu.
- kawasan sentra industri kelapa meliputi:
  - Kecamatan Rejotangan;
  - Kecamatan Kalidawir;
  - Kecamatan Pucanglaban;
  - Kecamatan Ngunut;
  - Kecamatan Tanggunggunung; dan
  - Kecamatan Bandung.

Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor yang memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

- Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
- Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.
- Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan
- Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri
- Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan
- Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya.

Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis *cluster* obyek wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- Kemudahan aksesibilitas  
Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.
- Jarak antara obyek wisata  
Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.
- Banyaknya pergerakan  
Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.
- Arahan oleh rencana tata ruang  
Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- Kawasan wisata alam terdiri atas:
  - daya tarik wisata goa
  - daya tarik wisata air
  - daya tarik wisata pantai
  - agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang



- Kawasan wisata budaya terdiri atas:
  - daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala
- Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:
  - pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (*ribbon development*). Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari (*radial*) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.

Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat berpendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

#### h. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan / permukiman, kegiatan perdagangan / jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha dikembangkan pada :

1. Kecamatan Tulungagung
2. Kecamatan Kedungwaru
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Ngunut
5. Kecamatan Bandung
6. Kecamatan Sumbergempol
7. Kecamatan Ngantru
8. Kecamatan Campurdarat
9. Kecamatan Kauman

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru

- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, perkebunan, dll)
- Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

i. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi

memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk *cluster* dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun.

Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha dikembangkan pada:

1. Kecamatan Besuki
2. Kecamatan Pakel
3. Kecamatan Tanggunggunung
4. Kecamatan Kalidawir
5. Kecamatan Pucang Laban
6. Kecamatan Rejotangan
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Gondang

9. Kecamatan Pagerwojo
10. Kecamatan Sendang
- j. Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, Karawitan, dan lain-lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung dimana wujudnya berupa Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Miri Gambar, Candi gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Candi Jaho/Ngampel, Situs Mbah Bodho, Situs Rejotangan, Situs pakuwuhan/ Padepokan Aryojeding, Situs Sumberringin, Situs Tulungrejo, Makam Ngadirogo, Makam Mbah Wali, Makam Mbah Jayeng Kusumo, Musium Daerah, makam Srigading, Masjid dan Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani, Makam Ngujang, dan Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "*Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa*" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

## **2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Perekonomian**

#### **Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat factor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

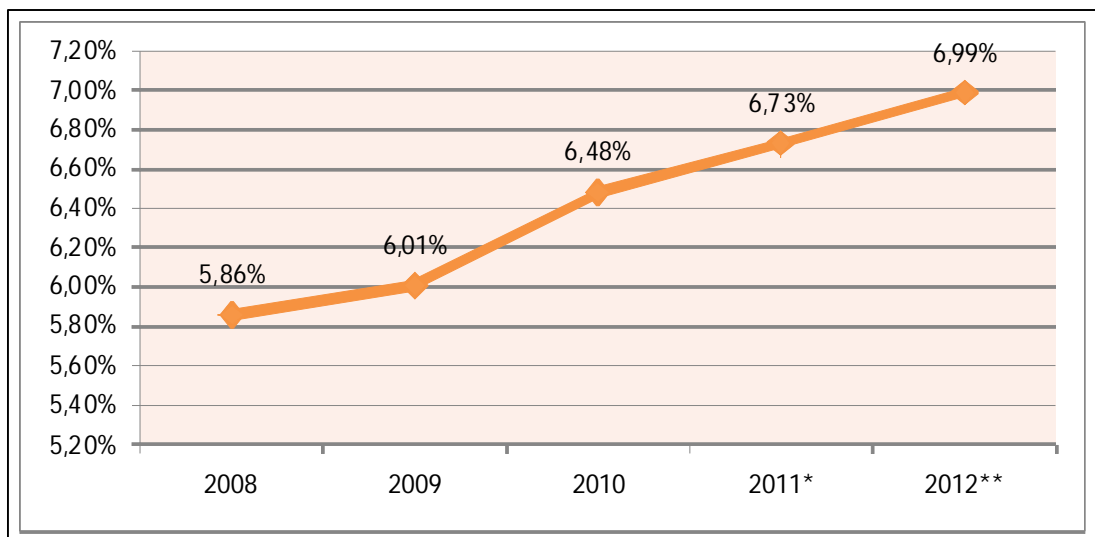
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiscal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Grafik berikut menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2012.

**Gambar II.5**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2008 s/d 2012**



Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Grafik di atas memberikan informasi bahwasanya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami trend naik, tidak pernah dalam kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan menurun bila dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sector selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel II.11**  
**Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor**  
**Tahun 2008 s/d Tahun 2012 (Persen)**

Sektor		2008	2009	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	3,49	3,35	2,34	2,56	3,43
2	Pertambangan dan Penggalian	4,26	4,98	4,83	4,74	3,62
3	Industri Pengolahan	5,37	5,93	6,46	6,86	6,93
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	10,23	4,69	5,62	6,02	6,14
5	Bangunan	4,23	4,36	5,04	6,92	6,65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,42	7,75	9,19	9,43	9,66
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,55	10,79	11,67	10,87	8,22
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,11	5,40	5,79	6,00	6,83
9	Jasa-jasa	5,29	5,32	5,20	5,02	5,23
<b>Kabupaten Tulungagung</b>		<b>5,86</b>	<b>6,01</b>	<b>6,48</b>	<b>6,73</b>	<b>6,99</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Keterangan : \*) = Angka Perbaikan

\*\*) = Angka Sementara

Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi kabupaten Tulungagung sebesar 5,86 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen dibanding tahun 2007. Sektor penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ada dua yaitu: Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang masing-masing memberi sumbangan pertumbuhan sebesar 10,23 persen dan 11,55 persen. Sedang pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 6,01 persen dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 10,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2010 sebesar 6,48 persen, dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 11,67 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 6,73 persen, dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,87 persen. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,99 persen, dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,66 persen.

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, ada tiga sektor yang pertumbuhan ekonominya selalu menunjukkan tren naik, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran



serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulungagung semakin bergeser atau bertumpu pada sektor-sektor tersier. Ini berarti bahwa ekonomi daerah tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada eksploitasi sumber daya alam, melainkan lebih bertumpu pada nilai tambah yang diperoleh baik dari pengolahan informasi, kapasitas ekonomi kreatif maupun organisasi dan koordinasi antara berbagai pihak.

### Struktur Ekonomi dan Pergeserannya

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah, maka struktur ekonomi juga akan mengalami perubahan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi.

Struktur ekonomi kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel II.12**  
**Struktur Ekonomi Menurut Sektor (Persen)**  
**Tahun 2008 s/d Tahun 2012**

Sektor	2008	2009	2010	2011 *)	2012 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Primer</b>	<b>20,50</b>	<b>19,74</b>	<b>19,05</b>	<b>18,58</b>	<b>18,46</b>
1 Pertanian	17,85	17,17	16,60	16,20	16,10
2 Pertambangan dan Penggalian	2,65	2,56	2,45	2,37	2,28
<b>Sekunder</b>	<b>21,94</b>	<b>22,24</b>	<b>22,44</b>	<b>22,46</b>	<b>22,57</b>
3 Industri Pengolahan	19,07	19,39	19,54	19,57	19,71
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	1,15	1,11	1,09	1,05	1,02
5 Bangunan	1,71	1,74	1,81	1,84	1,88
<b>Tersier</b>	<b>57,56</b>	<b>58,02</b>	<b>58,51</b>	<b>58,96</b>	<b>58,97</b>
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	29,31	29,71	30,31	30,92	31,24
7 Pengangkutan dan Komunikasi	6,65	6,89	7,17	7,31	7,27
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,21	9,18	9,07	8,95	8,87
9 Jasa-jasa	12,39	12,24	11,97	11,79	11,63
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Keterangan:

\*) Angka Perbaikan

\*\*) Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2012 didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Di Kabupaten Tulungagung terjadi pergeseran struktur ekonomi yang mana Sector Primer selama kurun waktu lima tahun terakhir trendnya menurun. Sedangkan sector sekunder dan tersier dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pergeseran di sector primer ini dipengaruhi oleh sector pertanian yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini bisa dimaklumi karena Sektor Pertanian sangat terpengaruh oleh luas lahan dan faktor iklim/cuaca.

Pada sektor tersier dapat dilihat bahwasanya Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun menunjukkan trend kenaikan, bahkan untuk Kabupaten Tulungagung sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Perkembangan tehnologi komunikasi yang sangat pesat dan cepat mendorong Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami kenaikan, yang finalnya mampu mendorong sektor tersier berkembang dengan baik.

## **Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

Data harga yang disajikan meliputi indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi di Kabupaten Tulungagung.

Mulai tahun 1999 penghitungan inflasi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana inflasi 1 tahun merupakan penjumlahan inflasi 12 bulan, tetapi dihitung point demi point. Dalam penghitungan Inflasi tahun 2012, digunakan tahun dasar 2002. Pada tahun 2012 inflasi sebesar 4,63 persen terbagi dalam 7 kelompok. Inflasi terbesar pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 6,83 persen diikuti kelompok makanan yaitu sebesar 5,95 persen dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,16 persen.

**Tabel II.13**  
**Persentase Perubahan IHK/Inflasi (2002 = 100) Tahun 2012**

Kelompok/Sub Kelompok	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	
1	2	3	4	5	6	7	
Umum	0,27	0,22	0,04	0,05	0,44	0,71	
1. Makanan	0,28	0,20	-0,59	-1,94	1,13	2,17	
2. Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	0,12	0,21	0,91	1,12	0,65	0,36	
3. Perumahan	0,72	0,14	0,08	1,30	0,14	0,31	
4. Sandang	-0,34	1,31	-0,42	-0,26	-0,26	0,37	
5. Kesehatan	0,33	0,30	0,05	1,14	0,06	0,13	
6. Pendidikan, rekreasi olah raga	0,19	0,19	0,00	-0,02	0,22	0,09	
7. Transport, komunikasi dan jasa keuangan	0,05	0,02	0,12	0,07	0,09	0,05	
Lanjutan Tabel							
Kelompok/Sub Kelompok	Juli	Agust	Sept.	Okt	Nop.	Des.	Inflasi
	8	9	10	11	12	13	14
Umum	0,68	1,73	-0,02	0,01	0,05	0,37	4,63
1. Makanan	1,72	2,82	-0,14	-0,42	-0,49	1,15	5,95
2. Makanan jadi, minuman,	0,48	1,94	0,17	0,16	0,50	0,05	6,83
3. Perumahan	0,34	0,12	-0,01	0,19	0,35	0,24	3,98
4. Sandang	0,15	0,74	1,86	0,80	-0,22	-0,13	3,62
5. Kesehatan	0,20	0,48	0,19	0,11	0,18	0,13	3,34
6. Pendidikan, rekreasi dan olah raga	0,73	2,28	1,24	0,03	0,07	0,06	5,16
7. Transport, komunikasi dan jasa keuangan	0,14	2,39	-1,30	-0,01	0,01	0,13	1,72

Sumber/Source : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dan, juga untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia. Dengan mengevaluasi angka IPM, keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Tulungagung dapat diketahui baik dari angka IPM nya sendiri maupun dari tiga komponen pembentuknya (indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli). Kontribusi ketiga komponen IPM tersebut juga diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan

terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah.

**Tabel II.14**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2012**

Variabel IPM	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Indeks Harapan Hidup	76,65	77,06	77,47	77,87	78,00
Indeks Pendidikan	78,98	79,67	79,79	79,82	80,35
Indeks Daya Beli (Indeks PP)	61,73	62,06	62,75	63,59	63,93
<b>IPM</b>	<b>72,45</b>	<b>72,93</b>	<b>73,34</b>	<b>73,91</b>	<b>74,09</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

**Tabel II.15**  
**IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kediri dan Jawa Timur**  
**Tahun 2010 – 2012**

Kabupaten/ Kota	Indeks Kesehatan			Indeks Pendidikan			Indeks PP			IPM		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Kab. Kediri	74,44	74,77	75,42	78,75	80,11	79,47	62,07	62,44	63,25	71,75	72,44	72,72
Kab. Nganjuk	75,68	76,15	76,30	87,69	88,29	87,95	65,48	66,20	66,99	76,28	76,88	77,08
Kab. Blitar	76,46	76,99	76,99	77,67	78,99	78,50	66,87	67,36	67,83	73,67	74,45	74,44
Kota Blitar	78,72	79,19	79,51	86,42	87,10	86,88	67,11	67,38	68,03	77,42	77,89	78,14
Kab. Tulungagung	77,47	77,75	78,00	79,79	80,82	80,35	62,75	63,15	63,93	73,34	73,91	74,09
Kab. Trenggalek	77,70	78,19	78,37	77,98	79,08	78,67	64,04	65,10	65,19	73,24	74,12	74,08
Jawa Timur	74,34	74,68	75,15	74,98	75,54	75,73	65,54	66,24	66,73	71,62	72,15	72,54

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Seperti halnya kabupaten/kota eks. Karesidenan Kediri lainnya, posisi status pembangunan manusia Kabupaten Tulungagung, berdasarkan perspektif kinerja dalam Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2012 masih beragam. Perlu diketahui, nilai IPM hanya merupakan nilai besaran IPM setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kekayaan alam, serta potensi lainnya yang dimiliki antar kabupaten/kota yang sebelumnya sudah mendukung (faktor – *endowment*).

Merubah sistim penyaluran dana bantuan sekolah tidak lagi melalui pendekatan sekolah secara menyeluruh, tetapi sebagian dari dana tersebut diperuntukkan pula bagi mereka yang belum pernah sekolah agar dapat memperoleh haknya untuk menjalani pendidikan, serta bagi mereka yang putus sekolah agar dapat kembali ke bangku sekolah.

Menurut ukuran *UNDP* refleksi keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang paling representatif adalah tercapainya hidup berumur panjang. Menuju kearah ini identik dengan membangun secara kompleks, karena keberhasilan pembangunan dibidang lainnya sangat mempengaruhi upaya-upaya menuju hidup sehat. Setidaknya untuk mempertahankan umur rata-rata penduduk yang relatif lama tersebut, instrumen (fasilitas dan tenaga kesehatan) diujung depan harus tetap eksis, utamanya pada daerah sulit dan terpencil. Seperti bidan desa, posyandu, maupun polindes. Hal ini penting direkomendasikan karena instrumen inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga pertolongan pertama untuk memperoleh layanan kesehatan bagi setiap penduduk, akan dilayani oleh instrumen tersebut.

Tetap membuka kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara dini. Seperti, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan layanan terhadap ibu hamil. Utamanya diberlakukan terhadap keluarga miskin, agar resiko fatal terhadap balita, ibu hamil dan ibu nifas dapat teratasi secara dini pula.

#### *Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia*

Posisi masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi *shortfall* per tahun yang dibandingkan dengan reduksi *shortfall* Kabupaten Tulungagung. Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan wilayah yang memiliki indeks kesehatan yang masih rendah, antara lain dengan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai.

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, karena komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, maka untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup yaitu dengan usaha menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan,

perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu indeks pendidikan, dari hasil penghitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan, didapat korelasi bahwa sebagian besar wilayah dengan indeks kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki di suatu wilayah maka tingkat kesehatan masyarakat pun juga semakin rendah.

Rendahnya kedua komponen tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang cukup melekat pada masyarakat terhadap kemampuan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan, seperti masih banyak ditemukan rumah tangga yang lebih memilih dukun bersalin daripada tenaga medis sebagai penolong kelahiran bayi. Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity* / daya beli). Variabel ini cukup berpengaruh, karena identik dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat pada tahun 2012 di seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.

## **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1 Pendidikan**

Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 10 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Sebagai target global, tertuang dalam salah satu dari enam tujuan kerangka kerja Dakar (2000) dalam *education for all* (pendidikan untuk semua), yaitu tercapainya 50 persen peningkatan melek huruf dewasa pada tahun 2015 dari situasi 1990, lebih khusus lagi untuk penduduk

perempuan. Adapun situasi melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Indonesia pada tahun 1990, penduduk laki-laki 86,70 persen, perempuan 72,50 persen, dan total 79,50 persen (UNESCO, 2002; 208). Bila mengacu situasi tahun 1990, maka target global yang mesti dipenuhi pada indikator melek huruf usia 10 tahun ke atas untuk Indonesia tahun 2015, yaitu penduduk laki-laki 93,35 persen, perempuan 86,25 persen, dan total 89,75 persen. Adapun target global untuk Indonesia ini lebih rendah dari sasaran nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemendiknas 2010-2014 (halaman 60), yaitu pada tahun 2014 angka buta aksara penduduk berusia 10 tahun ke atas tinggal 4,2 persen.

Angka melek huruf penduduk berusia 10 tahun ke atas di Tulungagung selama kurun waktu 2009-2012 adalah 93,50 persen, 93,55 persen, 93,53 persen dan 94,34 persen.

**Tabel II.16**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 2008 – 2012**

No.	Variabel Pendidikan	Tahun					Satuan
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Melek huruf (10 tahun ke atas)	94,34	93,50	93,55	93,53	94,34	%
2	APK SD/MI	110	105,64	98	103,87	103,91	%
3	APM SD/MI	101	96,93	91	96,07	94,56	%
4	APK SMP/Mts	93	98,37	91	97,58	97,62	%
5	APM SMP/MTs	74,45	94,06	85	72	74	%
6	APK SMA/SMK/MA	50,55	60,09	63	67	69,53	%
7	APM SMA/SMK/MA	36	51,94	48	50	52	%
8	Angka Partisipasi Sekolah SD	96,48	96,55	96,67	96,78	97,13	%
9	Angka Partisipasi Sekolah SMP	90,13	90,18	90,2	90,28	90,62	%
10	Angka Partisipasi Sekolah SMA	54,08	54,11	54,19	54,27	54,44	%
11	Buta Huruf	5,66	6,50	6,45	6,47	5,66	%
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,01	0,08	0,03	0,02	0,02	%
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	0	0,48	0,41	0,32	0,59	%
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	0,01	0,86	0,84	0,81	0,81	%
15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	99	98,37	98,45	98,63	99,86	%
16	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	100	95,38	95,48	95,58	99,91	%
17	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	99,98	95,52	95,69	95,73	99,98	%
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	99	99	93,08	98,70	99,80	%
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	66	66	89,39	89,45	78,40	%
20	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	69,13	72,6	73,8	77,59	82,58	%

Sumber : Dinas Pendidikan



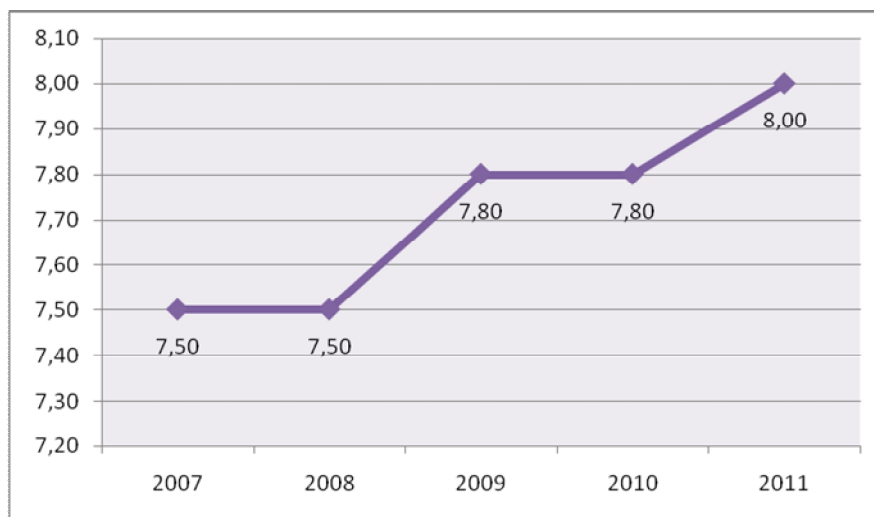
**Tabel II.17**  
**Indikator Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2009-2012**

Uraian	2009	2010	2011	2012
Angka Melek Huruf	93,50	93,55	93,53	94,34
Rata-rata lama sekolah (Th)	7,80	7,84	7,85	7,86
Angka Partisipasi Sekolah :				
7 - 12	98,68	99,67	98,58	99,20
13 - 15	91,77	93,33	94,80	95,58
16 - 18	61,64	70,02	63,57	53,72
18 - 24	7,58	10,51	10,51	17,45

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan salah satu komponen penyusun indeks pendidikan, bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia dalam HDI/IPM. Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

**Gambar II.6**  
**Rata-rata Lama Sekolah Di Tulungagung 2007-2011**



Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Tulungagung, selama 2007-2011 terjadi peningkatan kualitas penduduk dan sejak 2009 peningkatan dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun) menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut

relatif lambat, karena selama lima tahun hanya terjadi peningkatan sebesar 0,46 poin persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,09 poin persen per tahunnya. Jika diasumsikan kondisinya seperti saat ini, maka secara linier diperkirakan pada tahun 2025 tingkat pendidikan sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Tulungagung, baru setara lulusan tingkat SLTP (MYS 9 tahun) dan setara lulusan tingkat SLTA (MYS 12 tahun) pada tahun 2050. Sehingga untuk mencapai nilai harapan (maksimal) rata-rata lama sekolah dalam IPM (MYS 15 tahun) memerlukan waktu kurang lebih 39 tahun.

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, akan memberi pengaruh signifikan pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula.

Dalam lampiran PP No 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penduduk. Karena produktifitas penduduk disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka kualitas tenaga kerja akan semakin baik pula.

**Tabel II.18**  
**Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Yang Dimiliki, 2008-2012**

Ijazah	2008	2009	2010	2011	2012
Tidak/Belum Pernah Sekolah	47.112	28.024	39.529	33.604	33.096
Tidak/Belum Tamat SD	119.370	94.808	88.541	93.201	142.212
Tamat SD/MI	251.729	246.118	235.394	259.435	276.947
Tamat SLTP/MTs	174.380	175.779	161.559	183.792	192.023
Tamat SLTA/Aliyah	138.448	177.448	151.565	129.832	156.323
Tamat Perguruan Tinggi	27.317	41.809	48.707	32.083	39.396

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Adapun sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2012 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel II.19**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2012**

Jenjang	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Perpus	Jumlah Lab	Jumlah Kantor	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
								Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA Neg./Swasta	593	25.647	1.625	-	-	21	1.275	1.121	102	52
SD/MI Negeri dan Swasta	762	99.203	8.991	316	-	619	4.661	3.192	836	633
SMP/MTS Neg. dan Swasta	113	45.997	3.821	87	215	99	1.482	1.162	162	158
MA/SMK/SMA Neg. dan swasta	61	31.877	2.454	51	151	55	773	726	36	11

Sumber : Dinas Pendidikan

### 2.3.2 Kesehatan

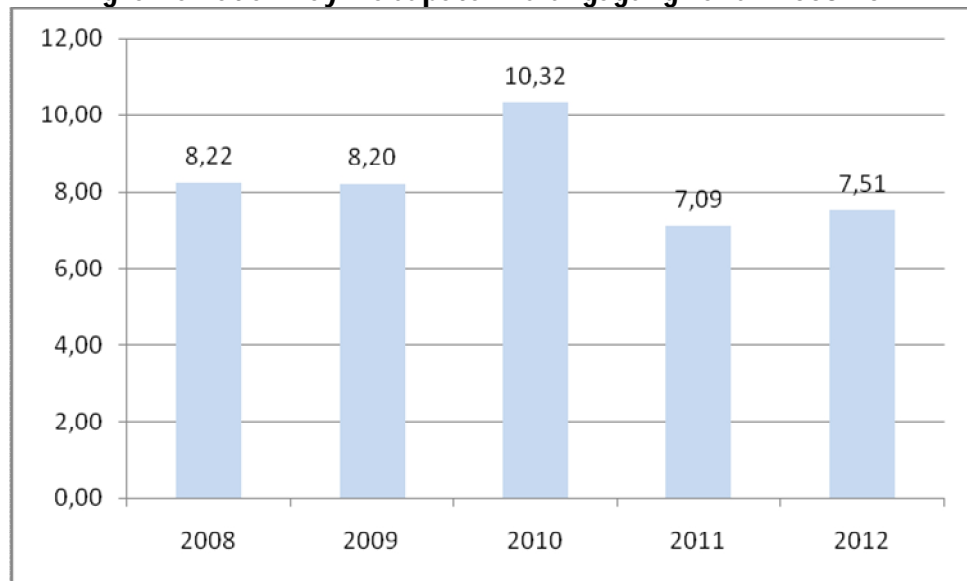
#### a. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tulungagung Tahun 2008-2012

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran angka kematian bayi pada periode tertentu. Seperti halnya perubahan angka harapan hidup, maka angka kematian bayi umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam mencermati perubahan AHH ataupun AKB yang diperoleh dari hasil estimasi per tahun.

AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*).

Dari hasil estimasi yang dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung, diperkirakan angka kematian bayi (AKB) di Tulungagung tahun 2012 masih berada pada kisaran angka 7. Berikut series AKB periode 2008-2012.

**Gambar II.7**  
**Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012**



Sumber : Dinas Kesehatan

Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Tulungagung terkait dengan angka kematian bayi antara lain : 1) masih memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, 2) distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan, dan 3) masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

b. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tulungagung Tahun 2010-2012

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh kader posyandu. Terdapat lima program prioritas dalam posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

Jumlah posyandu aktif di Tulungagung sebanyak 1.236, yang mana kerja masing-masing posyandu tersebut dibantu oleh puskesmas atau puskesmas

pembantu. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan posyandu yaitu dengan meningkatkan kualitas posyandu dan kualitas kader atau kinerja kader posyandu.

c. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tulungagung Tahun 2012

Besarnya rasio dokter per satuan penduduk di Tulungagung pada tahun 2012 yaitu 9 per seratus ribu penduduk. Rasio ini menunjukkan masih sangat rendahnya ketersediaan jumlah dokter jika dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk di Tulungagung.

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tulungagung Tahun 2010 - 2012

Jumlah rumah sakit pemerintah di Tulungagung sebanyak 1 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit swasta yang tersedia sebanyak 9 rumah sakit.

**Tabel II.20**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2008 – 2012**

No	Variabel Kesehatan	Tahun					Satuan
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Jumlah Kematian Bayi	122	120	149	104	121	Jiwa
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,22	8,2	10,32	7,09	7,51	/1000 KH
3	Jumlah kematian Ibu	11	18	18	18	11	Jiwa
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	74,08	122,97	124,68	122,67	68,29	/100.000 KH
5	Jumlah Posyandu Balita	1.232	1.233	1.235	1.236	1.236	Pos
6	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	817	817	814	923	1.025	Unit
7	Jumlah Posyandu Lansia	265	300	331	331	331	Unit
8	Jjumlah Kader Posyandu Aktif	6.160	6.165	6.175	6.180	6180	Orang
9	Jumlah Puskesmas	28	31	31	31	31	Unit
10	Balita Gizi Buruk	0,10	0,10	0,14	0,19	0,13	%
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	64,39	63,52	64,55	58,44	60,72	%
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	99,04	94,48	98,19	96,72	89,57	%
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	82,29	82,29	69,2	63,1	74,17	%
14	Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	%
15	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	34	36,7	36,9	40	38	%
16	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	78,15	69,25	57,09	71,6	94,44	%
17	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	*)	3,83	4,11	2,51	0,54	%
18	Cakupan kunjungan bayi	91,43	95,46	93,72	98,9	94,79	%

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Iskak  
Ket \*) : Indikator SPM mulai ada tahun 2009

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prosentase Kasus Gizi Buruk, jumlah sarana kesehatan. Beberapa indikator diatas secara umum menunjukkan tren yang positif, dimana Angka Kematian Bayi tahun 2012 pada angka 7, 51 per 1000 KH, Angka Kematian Ibu tahun 2012 pada angka 68,29 per 100.000 KH. Untuk kasus prosentase gizi buruk yang ditemukan cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 0,10 %, tahun 2010 sebesar 0,14 %, tahun 2011 sebesar 0,19 % dan tahun 2012 sebesar 0,14 %, dari semua kasus yang ditemukan telah tertangani dan mendapat perawatan semua (100%).

Dalam kurun waktu 2011-2012, jumlah puskesmas mengalami penambahan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk Tulungagung, maka penambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 unit untuk setiap 100.000 penduduk.

**Tabel II.21**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012**

No.	Unsur Kesehatan	Jumlah
1	RSUD	1
2	Rumah Sakit TNI/Polisi	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	6
4	Rumah Sakit Khusus Swasta	3
5	Puskesmas	31
6	Puskesmas Pembantu	67
7	Puskesmas Keliling	31
8	Posyandu	1.236
9	Rumah Bersalin	7
10	Balai Pengobatan/Klinik	17
11	Polindes	178
12	Dokter	93
13	Perawat Kesehatan	782
14	Bidan	378

Sumber : Dinas Kesehatan

e. Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Tahun 2012

Besarnya rasio bidan per satuan penduduk Tahun 2012 di Kabupaten Tulungagung adalah 36 bidan per 100.000 penduduk.

### 2.3.3 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat guna memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.

**Tabel II.22**  
**Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2012**

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
<b>A</b>	<b>BINA MARGA</b>					
1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	718.85 Km	178.26 Km	29.53 Km	193.38 Km	480.00 Km
2	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan :					
	a. Jalan Aspal	200,816 Km	251,02 Km	22,406 Km	231,107 Km	73,073 Km
	b. Jalan Beton / Paving	2.638 Km	3.297 Km	7,746 Km	0,669 Km	2,22 Km
3	Peningkatan Turap / Talud / Bronjong	1.087 Km	6.584 Km	2,712 Km	2.100 Km	4.080 Km
4	Peningkatan / Drainase / Gorong - Gorong	-	-	2,275 km	1,52 km	1,96 km
5	Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	-	-	1 paket	2 paket	2 paket
<b>B</b>	<b>TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN</b>					
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah			3 Unit	2 Unit	1 Unit
<b>C</b>	<b>P3LAM</b>					
1	Optimalisasi Sarana Air Minum					
	Pipa Sepanjang	71.502 m'	67.452 m'	13.842 m'	27.687 m'	19.998 m'
	Terbangunnya Sarana Sanitasi MCK ++				3 Paket	5 Paket
2	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					
	Jalan Rabat	240 m'	2.350 m'	3.935 m'	30.176 m'	33.200 m'
	Paving Stone	6.360 m2	60.234,2 m2	80.133,5 m2	68.056 m2	50.000 m2
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	75 unit	50 Unit	55 Unit	45 Unit	40 Unit

Sumber : Dinas PU BMCK

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran *ratio* panjang jalan per jumlah kendaraan menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek *ratio* panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

#### 2.3.4 Perumahan Rakyat

Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga menjadi akar permasalahan dibidang perumahan.

#### 2.3.5 Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kegiatan pemanfaatan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang perlu dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagii peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor.

Kabupaten Tulungagung telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 dan telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012.

Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi



yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.

### 2.3.6 Lingkungan Hidup

Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta menurunnya kasus pencemaran lingkungan.

**Tabel II.23**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008 – 2012**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	8	13	10	11	2
2	Jumlah perusahaan yang menyusun Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	9	12	33	73	10
3	Prosentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada	100	100	100	100	50

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

### 2.3.7 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan *fertility control*, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- a. Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- b. Kematian atau mortalitas, yang mengurangi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- c. Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.

Untuk itu program kependudukan di arahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik. Berikut perkembangan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

**Tabel II.24**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2008-2012**

No	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	83,90	82,57	81,11	79,18	77,38
2	Jumlah bayi berakta kelahiran	8.473	7.906	9.959	8.594	11.324
3	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	143	108	95	127	114
4	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	21.001	20.926	37.275	22.704	20.453

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan Program KB melalui Kegiatan Pelayanan KIE direalisasikan dengan memberikan Pembekalan, Baik Pembekalan Bhakti Sosial TNI-KB-Kesehatan Terpadu dan Pembekalan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan. Dalam program ini selama 5 tahun, dilaksanakan 10 kegiatan Pembekalan untuk meningkatkan

pencapaian peserta KB Baru. Kegiatan TMKK dan PKK KB Kesehatan dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan oleh Tim yang sudah ditetapkan, pengadaan alokon utamanya Implant, kemudian sarana Program KB berupa IUD Kit, Implant Kit, Berikut ringkasan capaian kinerja 5 tahun tersebut.

**Tabel II.25**  
**Perkembangan Realisasi Program Keluarga Berencana Tahun 2008 – 2012**

Tolok Ukur Kinerja	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Pasangan Usia Subur	196.171	197.092	196.100	203.982	205.680
Kesertaan ber KB	143.107	147.898	147.291	160.905	160.640
Persentase Kesertaan ber-KB	72,95 %	75,04 %	75,11 %	78,88 %	78,1 %

Sumber : BPPPAKB

**Tabel II.26**  
**Perkembangan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Tahun 2008-2012**

Tolok Ukur Kinerja	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah PPKBD	282	282	282	283	283
Jumlah Sub PPKBD	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS	456	912	3.082	3.114	3.020
Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS ber-KB	364	729	2.534	2.565	2.565
Cakupan PUS Anggota Kelompok UPPKS ber-KB (%)	79,82	79,93	82,22	82,37	89,3
Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB	26.573	31.066	32.073	32.082	32.153
Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB ber-KB	11.889	14.340	15.007	15.021	15.112
Cakupan PUS Anggota Kelompok BKB ber-KB (%)	44,74	46,16	46,79	46,82	47,00
Ratio PPKBD terhadap Jumlah Desa	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Sumber : BPPPAKB

### 2.3.9 Ketenagakerjaan

Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sangat terpengaruh. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan

kemiskinan dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja. Hal ini diwujudkan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.27**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan**  
**Tahun 2008 – 2012**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	1.410	1.250	2.613	3.990	3.543
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	1.305	1.493	2.435	3.930	1.072
3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	100	100	100	100	100
4	UMK (ribu rupiah)	526	600	641	720	815
5	Pengangguran (Jiwa)	23.607	29.278	19.021	18.075	17.344
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99	4,55	3,50	3,58	3,18

Sumber : BPS dan Dinsosnakertrans

### 2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaannya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2012 tercatat 996 badan hukum koperasi, dari jumlah tersebut sebanyak 718 adalah koperasi aktif, sedangkan sisanya sebanyak 278 adalah koperasi tidak aktif.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang

mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.28**  
**Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
<b>A. Koperasi</b>						
1.	Jumlah Koperasi (Badan Hukum)	616	759	930	987	996
2.	Anggota (Orang)	170.273	172.564	182.225	182.915	182.958
3.	Modal Sendiri (Rp.000)	76.568.752	184.759.173	204.462.296	160.899.698	160.666.963
4.	Modal Luar (Rp.000)	153.990.586	207.695.415	361.778.667	715.827.629	714.835.656
5.	Volume Usaha (Rp.000)	280.496.398	513.860.273	513.555.609	457.759.178	459.319.087
6.	SHU (Rp.000)	15.021.018	11.499.608	39.513.037	39.048.501	16.375.649
<b>B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>						
a.	Jumlah (Unit)	32.621	33.483	35.194	36.950	36.950
b.	Modal Usaha (Rp.000)	731.077.485	792.712.354	850.314.849	879.765.578	897.360.890
c.	Vol. Usaha (Rp.000)	857.382.052	972.685.662	1.069.846.566	1.121.046.210	1.143.467.134
d.	Jmlh Karyawan (org)	133.078	144.412	161.641	177.167	177.738

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

### 2.3.11 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator ramahnya suatu Pemerintahan di Daerah terhadap kehendak berusaha bagi warga masyarakat. Iklim yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Angka – angka tersebut adalah representasi nilai investasi oleh masyarakat pada saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai salah satu proses penerbitan ijin usaha. Ijin usaha yang diterbitkan meliputi keseluruhan jenis ijin usaha dalam berbagai skala unit usaha yang ada.

**Tabel II.29**  
**Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2008 – 2012**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	1.747	2.046	2.336	2.511	4.997
2.	Nilai investasi UMKM (Rp.)	105,6M	298,1M	409,3M	520,4M	907,2 M

Sumber : BPPT

### 2.3.12 Komunikasi dan Informatika

Secara umum, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.

Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

- 1). mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
- 2). mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
- 3). meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
- 4). meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*);
- 5). mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
- 6). membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahan seperti:

**a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, disamping pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Pelaksanaan SIPKD berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan SIPKD dengan tujuan merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, pengendalian defisit anggaran, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pinjaman daerah.

Prinsip Dasar pelaksanaan SIPKD adalah kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat, keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

Ruang Lingkup pelaksanaan SIPKD adalah informasi keuangan dan non keuangan dari setiap SKPD. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, dana perimbangan, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

#### **b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA dan SMK, dan juga dilengkapi modul pendaftaran jenjang SD. Ketentuan PPDB *online* Kabupaten Tulungagung meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang bisa diakses melalui alamat website yang tersedia.

#### **c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara



elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**d. Pelayanan Perijinan secara online di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung**

Guna mendukung pelayanan perijinan secara cepat dan nyata, BPPT Kabupaten Tulungagung melaksanakan pelayanan perijinan secara online. Pelaksanaan perijinan tersebut dapat diakses di portal : *perijinan.tulungagung.go.id*.

Jenis perijinan yang diakomodir oleh BPPT Kabupaten Tulungagung adalah ijin budidaya ikan air payau, ijin budidaya ikan air tawar, Ijin Gangguan (HO), ijin kolam memancing, ijin kursus kecantikan, ijin kursus mengemudi, ijin kursus menjahit, ijin kursus montir, ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban), ijin menempati rumah dinas, ijin pemakaian tanah milik pemda, ijin penangkapan ikan, ijin penempatan material di jalan, ijin penggunaan lapangan olahraga, ijin pengolahan ikan, ijin reklame, ijin tempat penitipan kendaraan bermotor, ijin terop, ijin tontonan, ijin trayek, ijin usaha bilyard, ijin usaha bioskop, ijin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air, ijin usaha gedung

squash, ijin usaha gedung tenis meja, ijin usaha gelanggang bowling, ijin usaha gelanggang olahraga terbuka, ijin usaha gelanggang olahraga tertutup, ijin usaha gelanggang permainan, ijin usaha gelanggang renang, ijin usaha hotel , ijin usaha industri, ijin usaha jasa konstruksi, ijin usaha kafe/café, ijin usaha karaoke, ijin usaha klub malam, ijin usaha kolam renang, ijin usaha lapangan bulutangkis, ijin usaha lapangan tenis, ijin usaha padang golf, ijin usaha panggung tertutup, ijin usaha panti mandi uap, ijin usaha pemandian alam, ijin Usaha Pemutaran / Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik (SIUPDR), ijin usaha penggilingan padi (*huller*) dan penyosohan beras, ijin usaha pentas pertunjukan satwa, ijin usaha penyelenggaraan fasilitas kesenian, budaya, tontonan/pertunjukan, Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin usaha peternakan, ijin usaha pusat kesegaran jasmani/kebugaran, ijin usaha pusat pasar seni, ijin usaha salon kecantikan / barber shop, ijin usaha sarana dan fasilitas olahraga, ijin usaha taman satwa, ijin usaha taman/tempat rekreasi, ijin usaha wisata laut, ijin usaha wisata pantai, Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

### 2.3.13 Pariwisata

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.

Sektor pariwisata ditengah perkembangan budaya dan pola hidup masyarakat pada saat ini sudah masuk dalam kategori kebutuhan tersier, atau bahkan untuk kelompok masyarakat tertentu sudah masuk dalam kelompok kebutuhan sekunder. Hal ini menjadi peluang bagi daerah yang memiliki daya tarik wisata, baik yang berbasis alam, kultur/ budaya, ataupun bentuk kreatifitas yang lain. Pada tabel berikut disajikan data-data terkait dengan tingkat pertumbuhan

kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata di Kabupaten Tulungagung dan jumlah obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui kelembagaan yang terkait.

**Tabel II.30**  
**Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2008 – 2012**

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah wisatawan (Jiwa)	171.000	188.100	217.823	218.009	196.514
2	Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek)	2	2	2	2	2

Sumber : Disbudparpora

#### 2.3.14 Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Badan usaha yang telah memiliki ijin ekspor adalah sebanyak 7 unit, dengan rincian 1 unit komoditas kertas dengan negara tujuan Malaysia, Mauritius, Singapura, New Zealand, Ethiopia dan Nikaragua, sedangkan 6 industri lainnya bergerak pada komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer dengan

negara tujuan Taiwan, Singapura, Dubai, Kuwait, Perancis, Jerman, Belanda, Malaysia, Madagaskar, Swedia, Serbia, Italia, Spanyol, dan Vietnam. Berikut adalah data-data akumulasi kinerja ekspor dan jumlah industri yang tercatat sebagai pelaku ekspor.

**Tabel II.31**  
**Perkembangan Ekspor Tahun 2008-2012**

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertumbuhan nilai ekspor	10,7 M	8,1 M	8,4 M	8,6 M	9,7 M
2	IKM eskportir	7	7	7	7	7

Sumber : Disperindag dan Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013

Demikian halnya dengan dinamika perdagangan dalam negeri yang terus berkembang pesat seiring dengan pesatnya arus informasi dan media perdagangan. Perdagangan tidak hanya dilakukan melalui cara-cara yang konvensional, namun peranan perangkat teknologi informasi semakin dominan dan menjadi media utama pendukung perdagangan. Berdagangan tidak mengharuskan pelaku transaksi untuk berinteraksi langsung secara fisik, akan tetapi teknologi sudah memfasilitasi fungsi tersebut sehingga transaksi itu berjalan sempurna, termasuk didalamnya tata cara pembayaran dan pengiriman barang. Gambaran perdagangan seperti ini juga telah banyak digunakan oleh pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari baju dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk tenun webbing set yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah

mampu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

**Tabel II.32**  
**Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung**

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	Marmar, Produk kerajinan marmar, onyx, genteng, bata merah, batu alam, makanan dan minuman	Industri kimia	Kec. Besuki, Kec. Campurdarat, Tulungagung dan Kec. Boyolangu, Kec. Gondang dan Kec. Ngunut
2.	Konveksi, Tenun webbing set, Batik, dan Kerajinan limbah konveksi	Industri tekstil	Kec. Tulungagung, Kec. Boyolangu, Kec. Kedungwaru, Kec. Ngunut dan Kec. Sumbergempol
3.	Teralis, Pagar, Pintu harmonika, Peralatan rumah tangga, Peralatan Pertanian, dll	Industri logam	Kec. Karangrejo, Kec. Gondang, Kec. Ngunut, Kec. Rejotangan, Kec. Kedungwaaru dan Kec. Sumbergempol
4.	Kerajinan Kayu, Kerajinan Bambu, dan Minyak atsiri	Industri Hasil Hutan	Kec. Pucanglaban, Kec. Gondang, Kec. Kedungwaru, dan Kec. Sendang
5.	Beras, Jagung, Durian, Alpokat, Duku, Kobis, Sawi, dan Bunga Krisan	Industri Agro	Kec. Gondang, Kec. Pakel, Kec. Kauman, Kec. Bandung, Kec. Sendang dan Kec. Pagerwojo

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 16,19%
- Derajat Desentralisasi Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 8,67%. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 87,66%. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah.

#### 2.4.2 Fasilitas Infrastruktur

Pemeliharaan dan pembangunan berbagai infrastruktur, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar, sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah daerah sendiri. Dilihat dari tipologinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu infrastruktur sosial, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Pembagian ini sekaligus menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab penyediaan masing-masing infrastruktur. Infrastruktur sosial menghasilkan barang dan jasa non-pasar, dengan tingkat *cost recovery* yang sangat rendah, maka penyediaannya mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan pendanaan pemerintah. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD. Infrastruktur sosial meliputi subsektor jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Penyediaan infrastruktur publik yang menghasilkan barang dan jasa publik, seperti pelabuhan, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, dapat dilakukan bekerja sama antara pemerintah (BUMN) dan pihak swasta. Sedangkan infrastruktur

komersial, yang menghasilkan barang dan jasa privat, seperti pembangkit listrik dan telekomunikasi dapat disediakan secara murni oleh pihak swasta. Dengan demikian percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai tipologi infrastrukturnya.

**Tabel II.33**  
**Data Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2012**

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Total Panjang Jalan Kabupaten	2.007,176	Km	SK Bupati (proses usulan kepada Gubernur Jawa Timur)
2	Jalan Aspal :			
	a. Baik	162,643	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten dalam kondisi Baik. Kriteria Baik adalah nilai kerusakan jalan $\leq$ 11 %
	b. Sedang	975,728	Km	Kriteria Sedang adalah nilai kerusakan jalan 11-<16 %
	c. Rusak	255,134	Km	Kriteria Rusak adalah nilai kerusakan jalan 16 - 23 %
	d. Rusak Berat	79,996	Km	Kriteria Rusak Berat adalah nilai kerusakan jalan $\geq$ 23 %
3	Jalan Beton / Paving :			
	a. Baik	15,834	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten dalam kondisi Baik. Kriteria Baik adalah nilai kerusakan jalan $\leq$ 11 %
	b. Sedang	23,499	Km	Kriteria Sedang adalah nilai kerusakan jalan 11-<16 %
	c. Rusak	6,731	Km	Kriteria Rusak adalah nilai kerusakan jalan 16 - 23 %
	d. Rusak Berat	-	Km	Kriterian Rusak Berat adalah nilai kerusakan jalan $\geq$ 23 %
4.	Jalan Makadam	68,631	Km	-
5.	Jalan Tanah	418,980	Km	-
	<b>DATA PRASARANA IRIGASI</b>			
1	Total Luas Daerah Irigasi Kabupaten	9.358,00	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
2	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	4.602,77	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (mengacu pada Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman OP Jaringan Irigasi)
3	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Rusak	4.755,23	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (mengacu pada Permen PU No. 32/PRT/M/2007)
7	Luas Area Tanam pada Musim Kemarau :			
	a. Kondisi Saat ini	14.632,00	Ha	Merupakan luas areal tanam di musim kemarau pada tahun berjalan (n)
	b. Sesudah Rehabilitasi	14.640,00	Ha	Merupakan luas areal tanam setelah adanya penanganan rehabilitasi di musim kemarau pada tahun berikutnya (n+1)
8	Produktivitas Sawah	6,00	Ton/Ha	Merupakan produktivitas sawah (disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi terkait)

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
9	Rencana Pengembangan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	1	Dokumen	Merupakan dokumen RP2I yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
<b>DATA PRASARANA AIR MINUM KABUPATEN</b>				
1	Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten	271	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten tersebut
2	Jumlah Desa/ Kelurahan terlayani oleh Pelayanan Air Minum	215	desa/ kelurahan	Merupakan jumlah desa/ kelurahan yang sudah terfasilitasi pelayanan air minum melalui PDAM/Pamsimas di Kabupaten yang bersangkutan
3	Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM)	Proses Usulan	Dokumen	Merupakan dokumen RISPAM yang dikeluarkan oleh kepala daerah
<b>DATA PRASARANA SANITASI KABUPATEN</b>				
1	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Sanitasi	205	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten tersebut yang tidak memiliki sarana dan prasarana sanitasi
2	Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani oleh Prasarana Sanitasi	9	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten tersebut yang terlayani oleh prasarana sanitasi melalui PDPAL/ Sanimas
3	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Jamban	266.978	rumah tangga	Merupakan total jumlah rumah tangga yang memiliki jamban di kabupaten tersebut
4	Jumlah Rumah Tangga dengan Jamban yang dilengkapi Septiktank	200.235	rumah tangga	Merupakan total jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dilengkapi dengan septiktank di kabupaten tersebut
5	Jumlah Timbunan Sampah	390,68	m <sup>3</sup> /hari	Merupakan total jumlah timbunan sampah per hari yang dihasilkan dari Kabupaten tersebut
6	Jumlah Sampah Terangkut	233	m <sup>3</sup> /hari	Merupakan total jumlah sampah per hari yang dapat terangkut ke TPA di Kabupaten tersebut
7	Panjang Saluran Drainase	Terbuka : 6.000 Tertutup : 52.000	M  M	Merupakan panjang saluran drainase di Kabupaten tersebut
8	Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Rusak	12.550,00	M	Merupakan panjang saluran drainase dalam kondisi rusak (tersumbat, bocor, dll) di kabupaten tersebut
9	Strategi Sanitasi Kota (SSK)	1	Dokumen	Merupakan dokumen SSK yang dikeluarkan oleh kepala daerah

Sumber : Dinas PU BMCK dan Dinas PU Pengairan ESDM

### 2.4.3 Iklim Investasi

Penciptaan iklim investasi yang kondusif sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha, serta sangat berpengaruh terhadap peningkatan lapangan kerja. Salah satunya melalui menyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan usaha, yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang di Kabupaten Tulungagung bernama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Kebutuhan terhadap regulasi tersebut menuntut adanya peningkatan kinerja/pelayanan PTSP sehingga



tidak hanya eksis dari sisi formalitas kelembagaan, tetapi juga mampu berfungsi efektif dalam mendorong perbaikan iklim usaha di daerah. Di Kabupaten Tulungagung, dinamisasi ekonomi ditinjau dari survei Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Penanaman Modal (BKPM dan KPPOD, 2009) menunjukkan Kabupaten Tulungagung berada di ranking 52 dari 217 kabupaten yang disurvei.

#### 2.4.4 Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global

##### Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan RTRW Nasional, kawasan strategis nasional di Kabupaten Tulungagung adalah Wilayah Sungai (WS) Brantas.

##### Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan yang merupakan kawasan strategis propinsi di Kabupaten Tulungagung berupa Kawasan Agropolitan Willis. Dalam sistem Agropolitan Willis, Kabupaten Tulungagung memiliki peran sebagai daerah pemasok atau hinterlandnya.

##### Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang memberikan kontribusi secara lokal, regional maupun nasional, serta mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pengembangan ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, maupun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
  - a) potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - b) sektor unggulan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - c) potensi ekspor;
  - d) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - e) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - f) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - g) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangkan mewujudkan ketahanan energi; atau
  - h) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
5. Kawasan yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
  - a) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
  - b) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - c) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- d) tempat perlindungan peninggalan budaya;
  - e) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keaneka ragaman budaya; atau
  - f) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki:
- a) peruntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
  - b) sumber daya alam strategis;
  - c) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembanagn antariksa;
  - d) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  - e) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan:
- a) tempat perlindungan keaneka ragaman hayati;
  - b) kawasan lindung yang ditetapkan sebagai perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punahatau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - c) kawasan yang memberi perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - d) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - e) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - f) kawasan rawan bencana alam; atau
  - g) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembagunan spasial wilayah kabupaten;
9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Kawasan yang termasuk kawasan strategis diantaranya adalah kawasan lindung, kawasan perkotaan dengan perkembangan dinamis, lokasi industri strategis, kawasan sepanjang jalan arteri primer dan jalur regional, kawasan sepanjang pantai selatan, serta kawasan perkebunan (hortikultura), yang perkembangannya akan dapat memberikan imbas positif pada sektor perhubungan, perdagangan, hotel dan restoran serta industri kecil/kerajinan. Beberapa kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tulungagung ini kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun jenis-jenis kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi kabupaten;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di wilayah kabupaten;
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten;
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
5. Kawasan strategis lainnya.

Kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- kawasan agropolitan;
- kawasan perikanan dan minapolitan;
- kawasan pertambangan; dan
- kawasan pariwisata.

Penjelasan masing-masing kawasan strategis adalah sebagai berikut:

## Kawasan Agropolitan

Agropolitan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan dalam hal aspek ekonomi antara kota dan desa. Sebagai wujud nyata penerapan konsep pengembangan kawasan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 522 Tanggal 18 Juni 2004 telah menetapkan Kecamatan Sendang sebagai rintisan Kawasan Agropolitan yang dikenal dengan Kawasan Agropolitan Sendang.

Penunjukan Kecamatan Sendang sebagai kawasan agropolitan selain didasarkan adanya potensi komoditas unggulan yang cukup besar, yaitu sapi perah dan komoditas unggulan lainnya seperti hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan, juga didasarkan pada kesesuaian lahan yang merupakan daerah pegunungan dengan hawa yang sejuk.

Sesuai dengan keunggulan komparatif yang ada, maka sapi perah menjadi salah satu komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Sendang. Usaha sapi perah ini sangat nyata menyumbang pendapatan rumah tangga petani. Peluang usaha sapi perah masih terbuka lebar karena didukung ketersediaan lahan yang luas untuk penanaman rumput gajah sebagai sumber tambahan hijauan serta diuntungkan dengan kebutuhan bahan baku produk olahan susu yang cukup tinggi.

Selain sentra pengembangan sapi perah Kawasan Agropolitan Sendang juga sangat cocok untuk pengembangan ternak ruminansia seperti kambing dan domba. Usaha ternak ruminansia tersebut mampu memberikan penghasilan tambahan bagi petani.

Komoditas lain yang menonjol di Kawasan Agropolitan Sendang berasal dari komoditas sayur-mayur seperti kentang, kobis, sawi, wortel, brokoli, bawang daun, lobak, kapri dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan saat ini hanya sebagai tanaman pekarangan karena belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan, saat ini dikembangkan pula komoditas bunga potong yang juga memiliki pangsa pasar potensial. Pengembangan kawasan ini didukung oleh keberadaan 7 (tujuh) buah *green house* yang digunakan

untuk budidaya bunga potong dengan luas bangunan untuk masing-masing *green house* 8 x 20 m<sup>2</sup>.

Untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan diperlukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil komoditasnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan melengkapi sarana dan bimbingan teknis. Dalam perkembangan terakhir pelaku usaha di Kawasan Agropolitan telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Grasia dalam hal penanaman bunga potong (Krisan, Gladiol dan Golden Peacock), dengan PT. Horti Bima Internasional dalam hal pemasaran hasil sayuran lobak. Sedangkan dengan PT. Nestle, Sari Husada, Indomilk dan Sekar Tanjung untuk menampung hasil produksi Susu Perah.

#### Kawasan Perikanan Dan Minapolitan

Potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung sangatlah prospektif untuk pengembangan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan bidang perikanan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang diharapkan nantinya dapat menjadi unggulan kompetitif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan suatu kebijakan yang bertumpu pada pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumber-sumber perikanan yang belum tergalai secara efektif, efisien dan berdaya dukung pada potensi lestari.

Perkembangan budidaya ikan air tawar dikelompokkan menjadi 2 kategori usaha yaitu budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Budidaya ikan konsumsi yang banyak dikembangkan adalah jenis ikan lele, gurami dan nila sedangkan untuk pengembangan ikan hias diprioritaskan untuk jenis ikan hias mas koki (kaliko, tosa, rasket, mutiara, *lion head*, mata kantong/mata bola, mas lowo, tek im, spenser, dan rensil). Disamping itu juga dikembangkan jenis-jenis ikan hias lainnya.

Wilayah pesisir di Kabupaten Tulungagung terdiri dari Pantai Molang, Dlado, Sine, Ngelo, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Klatak, Bayem dan Nglarap. Potensi Sumberdaya Ikan (SDI) tersebut dimanfaatkan oleh 574 kelompok nelayan. Produksi

Perikanan tangkap di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh jenis ikan tuna, tongkol, layur, teri, kembung dan cumi-cumi.

### Minapolitan

Pada Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Tulungagung menginisiasi program pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan rumpun dari program agropolitan yang telah dirintis terlebih dahulu. Program ini secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan budidaya.

Wilayah yang memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah Kecamatan Gondang dengan sentra produksi di Desa Gondosuli. Luas lahan perikanan ± 11,03 ha dimana potensi produksi tiap hektarnya mencapai 540 ton/tahun. Sedangkan Wilayah yang berfungsi sebagai *hinterlandnya* adalah Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Kauman dan Kecamatan Pakel. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/208/031/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Komoditas unggulan yang dikembangkan adalah budidaya ikan lele dengan sistem kolam terpal. Saat ini ada 7 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan 2 kelompok pengolah ikan di Desa Gondosuli. Selain produk berupa lele basah pembudidaya ikan juga menghasilkan beberapa produk olahan berupa lele panggang, abon lele dan keripik rambak lele. Daerah pemasaran produksinya sudah sampai ke luar provinsi seperti Jawa Tengah yang meliputi Semarang, Solo, Klaten dan Boyolali. Sementara di Provinsi Jawa Timur ada di Surabaya, Malang dan Kediri.

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Tulungagung telah melalui beberapa tahap perencanaan dan saat ini masih menunggu penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

### *Kawasan Pertambangan*

Kawasan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung berupa bahan galian yang merupakan material bahan bakar dari fosil terdapat di kawasan

Perhutani dengan persebaran yang cukup luas, namun sampai saat ini belum di eksplorasi secara optimal. Jumlah cadangan di perkirakan mencapai 470.771 ton.

Terdapat pula kaolin yang merupakan jenis batu yang terdiri dari tanah mineral, biasanya berwarna putih bersih dan kekuningan, lunak, berbutir halus. Endapan kaolin banyak di jumpai di Kecamatan Pucanglaban. Kaolin dipergunakan untuk industri keramik, cat, karet, gelas dan kertas, glasur, dan saniter. Dewasa ini endapan kaolin belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.

Kawasan pertambangan yang menjadi kawasan strategis kabupaten adalah kawasan unggulan pertambangan marmer yang berada di Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki. Deposit marmer dapat dijumpai di Desa Gamping, Ngentrong, Kecamatan Campurdarat dan Desa Besole Kecamatan Besuki dengan penyebaran yang cukup luas. Batu marmer merupakan produk primadona bahan tambang Kabupaten Tulungagung, karena selain di usahakan lebih maju pada jenis-jenis tambang lainnya oleh para pengusaha dan pengrajin di Desa Campurdarat dan Gamping Kecamatan Campurdarat, juga dilihat dari deposit yang cukup melimpah.

#### *Kawasan Pariwisata*

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 4 jenis yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata religi, dan wisata pendidikan.

Kawasan pariwisata yang ditetapkan sebagai kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung berupa kawasan prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

1. Kawasan prioritas pengembangan wisata alam dipusatkan di daya tarik wisata meliputi:
  - Pantai Popoh berada di Kecamatan Besuki; dan
  - Waduk Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.
2. Kawasan prioritas pengembangan wisata budaya meliputi:
  - Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru;



- Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang; dan
  - Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu.
3. Kawasan prioritas pengembangan wisata buatan berupa sentra industri marmer berada di Kecamatan Besuki.

Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada dalam kawasan tersebut. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada pemanfaatan potensi obyek-obyek wisata dengan tetap memperhatikan kaidah agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

#### *Kawasan Sentra Industri*

Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaikan masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

**Tabel II.34**  
**Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung**

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Pucanglaban
3	Batu Bata Merah	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol dan Kec. Campurdarat
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan
6	Kerajinan Marmer/ Onyx	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki dan Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru dan Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
10	Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo dan Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian	Kec. Ngunut dan Kec. Gondang
14	Emping Mlinjo	Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol
17	Krupuk Gadung	Kec. Campurdarat
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec. Kedungwaru
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Kec. Sumbergempol
25	Keripik Gadung	Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

### **BAB III**

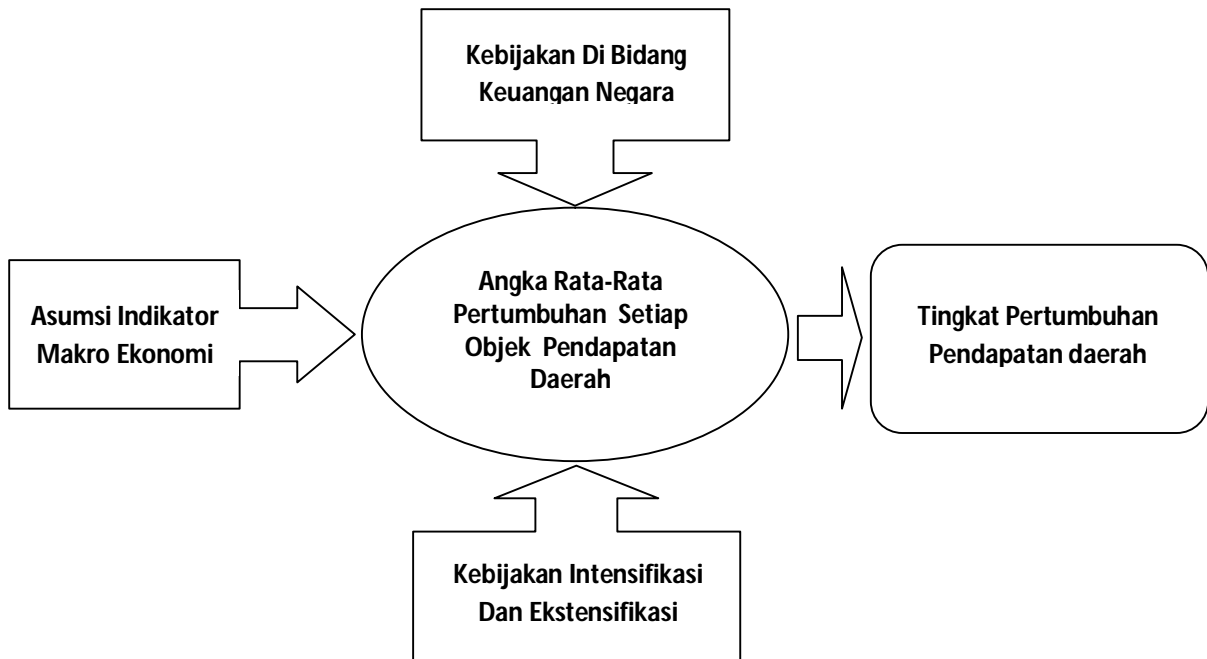
## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Analisis tersebut diatas dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar III.1**  
**Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah**



Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Penjelasan dari gambar diatas yaitu bahwa dari serangkaian asumsi indikator ekonomi makro yang disinkronkan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh daerah, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mengindikasikan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, langkah awal untuk melakukan analisis tersebut yaitu menganalisis Pendapatan Daerah.

### **3.1 PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah diperoleh baik dari sumber Pendapatan Asli Daerah maupun sumber-sumber pendapatan lainnya.

## KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis pendapatan yang pertama kali dilakukan adalah Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan positif ataukah negatif. Hasil dari analisis pertumbuhan pendapatan ini nantinya akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pendapatan untuk periode 5 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Nominal pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**NOMINAL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2008 S/D 2012**

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>59.140.300.539,86</b>	<b>82.324.974.129,07</b>	<b>94.380.356.787,90</b>	<b>124.517.804.186,07</b>	<b>162.161.670.210,36</b>
Pendapatan Pajak Daerah	11.499.718.475,60	12.995.028.234,20	16.449.108.667,40	22.086.869.272,74	25.543.716.677,80
Pendapatan Retribusi Daerah	37.001.475.210,03	59.139.506.202,75	13.002.271.090,50	13.843.257.383,13	15.585.227.854,58
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	940.133.250,48	977.387.584,35	1.147.153.688,40	1.654.038.322,03	1.855.404.287,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.698.973.603,75	9.213.052.107,77	63.781.823.341,60	86.933.639.208,17	119.177.321.390,11
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>798.572.482.944,00</b>	<b>886.706.504.858,00</b>	<b>955.848.448.477,00</b>	<b>1.144.260.068.380,00</b>	<b>1.322.396.254.267,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>743.849.018.632,00</b>	<b>770.133.226.658,00</b>	<b>775.220.680.096,00</b>	<b>878.223.493.674,00</b>	<b>1.034.185.939.195,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	45.107.965.198,00	48.209.667.076,00	55.570.616.828,00	48.039.137.788,00	51.689.982.045,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.241.121.434,00	13.133.208.582,00	18.226.047.268,00	25.729.718.886,00	35.600.329.150,00
Dana Alokasi Umum	628.424.932.000,00	625.040.351.000,00	648.991.116.000,00	723.703.537.000,00	878.221.208.000,00
Dana Alokasi Khusus	66.075.000.000,00	83.750.000.000,00	52.432.900.000,00	80.751.100.000,00	68.674.420.000,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>14.868.373.199,00</b>	<b>65.689.168.500,00</b>	<b>117.609.164.294,00</b>	<b>193.757.169.960,00</b>	<b>217.666.843.000,00</b>
Dana Otonomi Khusus			-	-	
Dana Penyesuaian	14.868.373.199,00	65.689.168.500,00	117.609.164.294,00	193.757.169.960,00	217.666.843.000,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>39.855.091.113,00</b>	<b>50.884.109.700,00</b>	<b>63.018.604.087,00</b>	<b>72.279.404.746,00</b>	<b>70.543.472.072,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.855.091.113,00	50.884.109.700,00	63.005.199.169,00	72.224.657.785,00	70.437.013.140,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			13.404.918,00	54.746.961,00	106.458.932,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>36.201.560.000,00</b>	<b>57.106.340.000,00</b>	<b>63.644.479.000,00</b>	<b>75.435.785.000,00</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	36.201.560.000,00	57.106.340.000,00	63.644.479.000,00	75.435.785.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>857.712.783.483,86</b>	<b>1.005.233.038.987,07</b>	<b>1.107.335.145.264,90</b>	<b>1.332.422.351.566,07</b>	<b>1.559.993.709.477,36</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

Dari angka-angka pendapatan pada tabel di atas dilakukan analisis pertumbuhan pendapatan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

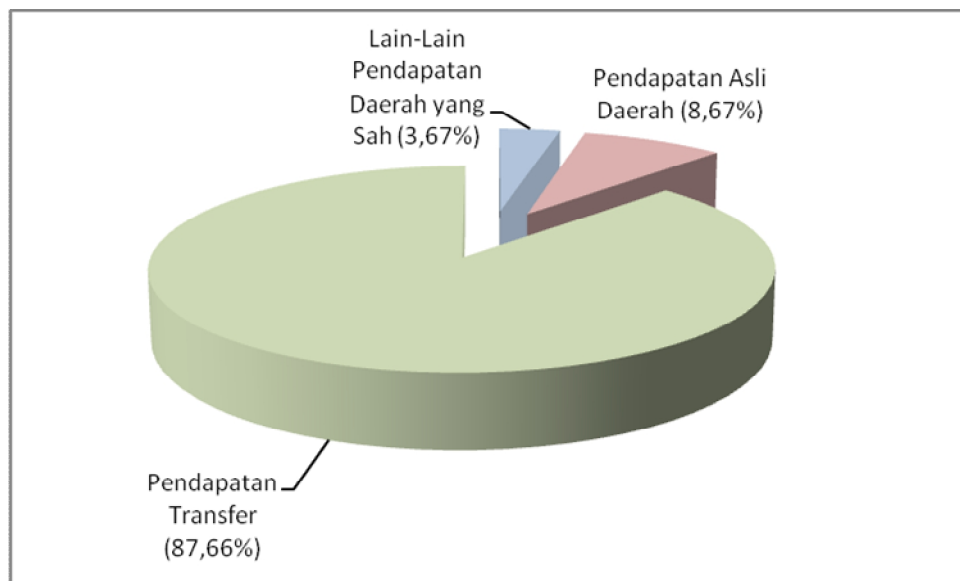
**Tabel III.2**  
**PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2009 S/D 2012**

URAIAN	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>39,20</b>	<b>14,64</b>	<b>31,93</b>	<b>30,23</b>	<b>29,00</b>
Pendapatan Pajak Daerah	13,00	26,58	34,27	15,65	22,38
Pendapatan Retribusi Daerah	59,83	(78,01)	6,47	12,58	0,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,96	17,37	44,19	12,17	19,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(5,01)	592,30	36,30	37,09	165,17
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11,04</b>	<b>7,80</b>	<b>19,71</b>	<b>15,57</b>	<b>13,53</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>3,53</b>	<b>0,66</b>	<b>13,29</b>	<b>17,76</b>	<b>8,81</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	6,88	15,27	(13,55)	7,60	4,05
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	209,66	38,78	41,17	38,36	81,99
Dana Alokasi Umum	(0,54)	3,83	11,51	21,35	9,04
Dana Alokasi Khusus	26,75	(37,39)	54,01	(14,96)	7,10
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>341,80</b>	<b>79,04</b>	<b>64,75</b>	<b>12,34</b>	<b>124,48</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	341,80	79,04	64,75	12,34	124,48
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>27,67</b>	<b>23,85</b>	<b>14,70</b>	<b>(2,40)</b>	<b>15,95</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27,67	23,82	14,63	(2,48)	15,91
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	308,41	94,46	100,72
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>57,75</b>	<b>11,45</b>	<b>18,53</b>	<b>21,93</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	0,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	0,00
Pendapatan Lainnya	-	57,75	11,45	18,53	21,93
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>17,20</b>	<b>10,16</b>	<b>20,33</b>	<b>17,08</b>	<b>16,19</b>

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwasanya nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 16,19%. Sedangkan rata-rata kontribusi tiap komponen pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

**Gambar III.2**  
**Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah**  
**Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2012**



Sumber : Hasil Analisis

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya Derajat Desentralisasi Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 8,67%. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Selain derajat desentralisasi, dari grafik juga dapat dilihat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 87,66%. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah.



## KEBIJAKAN DAN PROYEKSI PENDAPATAN 2014-2018

Kebijakan mengenai Pendapatan Daerah (*revenue policy*) diharapkan dapat mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Daerah atau membiayai belanja daerah. Proyeksi Pendapatan Untuk 5 Tahun kedepan berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah dan perkiraan perkembangan perekonomian masyarakat dengan estimasi peningkatan rata-rata 8,5 % untuk PAD dan 5 % untuk pendapatan transfer. Estimasi PAD tersebut dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan tidak memberatkan masyarakat serta dunia usaha. Berikut Tabel proyeksi Pendapatan Daerah mulai tahun 2014 s/d 2018.

Tabel III.3  
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PERIODE TAHUN 2014 S/D 2018

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>167.243.000.000,00</b>	<b>181.458.655.000,00</b>	<b>196.882.640.675,00</b>	<b>213.617.665.132,38</b>	<b>231.775.166.668,63</b>
Pendapatan Pajak Daerah	47.125.000.000,00	51.130.625.000,00	55.476.728.125,00	60.192.250.015,63	65.308.591.266,95
Pendapatan Retribusi Daerah	19.163.000.000,00	20.791.855.000,00	22.559.162.675,00	24.476.691.502,38	26.557.210.280,08
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.820.000.000,00	3.059.700.000,00	3.319.774.500,00	3.601.955.332,50	3.908.121.535,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.135.000.000,00	106.476.475.000,00	115.526.975.375,00	125.346.768.281,88	136.001.243.585,83
	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.497.745.167.423,00</b>	<b>1.572.632.425.794,15</b>	<b>1.651.264.047.083,86</b>	<b>1.733.827.249.438,05</b>	<b>1.820.518.611.909,95</b>
	-	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.133.488.334.000,00</b>	<b>1.190.162.750.700,00</b>	<b>1.249.670.888.235,00</b>	<b>1.312.154.432.646,75</b>	<b>1.377.762.154.279,09</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	27.500.000.000,00	28.875.000.000,00	30.318.750.000,00	31.834.687.500,00	33.426.421.875,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.000.000.000,00	39.900.000.000,00	41.895.000.000,00	43.989.750.000,00	46.189.237.500,00
Dana Alokasi Umum	996.300.694.000,00	1.046.115.728.700,00	1.098.421.515.135,00	1.153.342.590.891,75	1.211.009.720.436,34
Dana Alokasi Khusus	71.687.640.000,00	75.272.022.000,00	79.035.623.100,00	82.987.404.255,00	87.136.774.467,75
	-	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>282.380.383.500,00</b>	<b>296.499.402.675,00</b>	<b>311.324.372.808,75</b>	<b>326.890.591.449,19</b>	<b>343.235.121.021,65</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	282.380.383.500,00	296.499.402.675,00	311.324.372.808,75	326.890.591.449,19	343.235.121.021,65
	-	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>81.876.449.923,00</b>	<b>85.970.272.419,15</b>	<b>90.268.786.040,11</b>	<b>94.782.225.342,11</b>	<b>99.521.336.609,22</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.810.316.370,00	85.900.832.188,50	90.195.873.797,93	94.705.667.487,82	99.440.950.862,21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	66.133.553,00	69.440.230,65	72.912.242,18	76.557.854,29	80.385.747,01
	-	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>49.505.225.000,00</b>	<b>51.980.486.250,00</b>	<b>54.579.510.562,50</b>	<b>57.308.486.090,63</b>	<b>60.173.910.395,16</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya/BK propinsi	49.505.225.000,00	51.980.486.250,00	54.579.510.562,50	57.308.486.090,63	60.173.910.395,16
	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.714.493.392.423,00</b>	<b>1.806.071.567.044,15</b>	<b>1.902.726.198.321,36</b>	<b>2.004.753.400.661,05</b>	<b>2.112.467.688.973,74</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

### 3.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#### KEBIJAKAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH LALU

Belanja Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2008-2012, secara nominal juga terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu tersebut sebesar 13,78%. Secara detail, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2012 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.4  
NOMINAL BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PERIODE TAHUN 2008 S/D 2012

URAIAN	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>714.316.326.949,61</b>	<b>836.316.707.074,84</b>	<b>969.464.814.429,09</b>	<b>1.147.163.440.118,48</b>	<b>1.349.809.017.037,53</b>
Belanja Pegawai	499.561.921.606,77	598.567.924.723,00	726.835.433.561,00	829.738.687.337,00	978.421.252.841,00
Belanja Barang	168.880.571.778,26	127.678.481.987,00	161.389.219.629,38	235.846.984.885,19	266.007.074.702,02
Belanja Bunga	93.160.334,58	73.856.315,95	53.774.170,71	34.215.055,29	14.709.526,51
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	16.399.986.110,00	52.342.375.000,00	8.968.400.000,00	8.787.368.000,00	38.057.232.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.764.458.870,00	29.727.901.082,89	36.462.977.068,00	32.116.271.373,00	20.249.104.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	17.616.228.250,00	27.926.167.966,00	35.755.010.000,00	40.639.913.468,00	47.059.643.468,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.086.674.765,06</b>	<b>130.392.638.058,49</b>	<b>126.601.969.163,00</b>	<b>137.953.157.645,33</b>	<b>219.555.734.450,42</b>
Belanja Tanah	1.622.384.400,00	2.450.000.000,00	1.463.866.000,00	-	4.903.845.190,00
Belanja Peralatan dan Mesin	26.393.858.369,00	25.559.977.470,50	22.358.636.070,00	35.849.788.614,00	47.825.201.369,00
Belanja Gedung dan Bangunan	32.317.748.343,00	16.597.210.246,00	11.712.230.129,00	38.830.059.749,00	93.090.513.855,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.708.063.003,06	85.314.145.541,99	90.044.263.144,00	46.448.953.671,33	64.787.537.911,42
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.044.620.650,00	466.554.800,00	857.258.820,00	16.767.310.611,00	7.794.500.025,00
Belanja Aset Lainnya	-	4.750.000,00	165.715.000,00	57.045.000,00	1.154.136.100,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.467.185.500,00</b>	<b>961.781.066,45</b>	<b>3.274.388.750,00</b>	<b>5.354.929.900,00</b>	<b>2.587.079.901,00</b>
Belanja Tidak Terduga	1.467.185.500,00	961.781.066,45	3.274.388.750,00	5.354.929.900,00	2.587.079.901,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>835.870.187.214,67</b>	<b>967.671.126.199,78</b>	<b>1.099.341.172.342,09</b>	<b>1.290.471.527.663,81</b>	<b>1.571.951.831.388,95</b>

Sumber : BPPKAD Kab. Tulungagung

Jumlah Belanja Daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 835.870.187.214,67; pada tahun 2009 sebesar Rp. 967.671.126.199,78; pada tahun 2010 sebesar Rp.1.099.341.172.342,09, meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.1.290.471.527.663,81, untuk selanjutnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp.1.571.951.831.388,95. Sedangkan angka rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

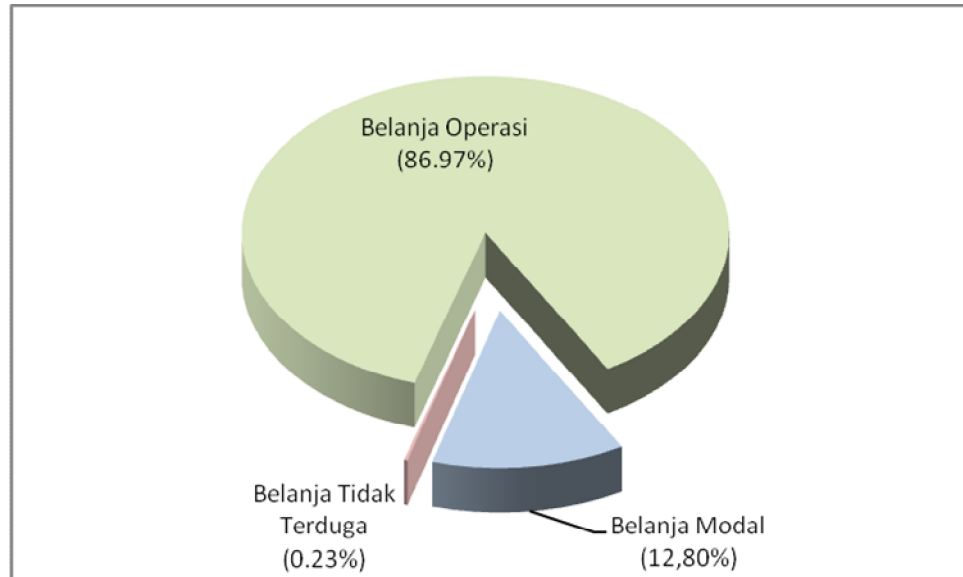
**Tabel III.5**  
**PERSENTASE PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2009 S/D 2012**

<b>URAIAN</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Rata-Rata</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17,08</b>	<b>0,16</b>	<b>18,33</b>	<b>17,66</b>	<b>13,31</b>
Belanja Pegawai	19,82	0,21	14,16	17,92	13,03
Belanja Barang	(24,40)	0,26	46,14	12,79	8,70
Belanja Bunga	(20,72)	(0,27)	(36,37)	(57,01)	(28,59)
Belanja Subsidi	-	0,00	-	-	0,00
Belanja Hibah	219,16	(0,83)	(2,02)	333,09	137,35
Belanja Bantuan Sosial	152,69	0,23	(11,92)	(36,95)	26,01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	58,53	0,28	13,66	15,80	22,07
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,58</b>	<b>(0,03)</b>	<b>8,97</b>	<b>0,59</b>	<b>4,53</b>
Belanja Tanah	51,01	(0,40)	(100)	0	(12,35)
Belanja Peralatan dan Mesin	(3,16)	(0,13)	60,34	33,40	22,61
Belanja Gedung dan Bangunan	(48,64)	(0,29)	231,53	139,74	80,58
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61,86	0,06	(48,42)	39,48	13,25
Belanja Aset Tetap Lainnya	(93,38)	0,84	1.855,92	(53,51)	427,47
Belanja Aset Lainnya	-	33,89	(65,58)	1.923,20	472,88
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>(34,45)</b>	<b>2,40</b>	<b>63,54</b>	<b>(51,69)</b>	<b>(5,05)</b>
Belanja Tidak Terduga	(34,45)	2,40	63,54	(51,69)	(5,05)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>15,77</b>	<b>0,14</b>	<b>17,39</b>	<b>21,81</b>	<b>13,78</b>

Sumber : Hasil Analisis Pertumbuhan

Grafik berikut menyajikan rata-rata kontribusi tiap komponen belanja daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

**Gambar III.3**  
**Rata-Rata Kontribusi Komponen Belanja Daerah**  
**Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2012**



Sumber : Hasil Analisis Keserasian Belanja

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya belanja operasi mendominasi total belanja daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwasanya rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 86,97%, yang artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi adalah sebesar 86,97%. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*).

Grafik di atas juga menginformasikan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal selama kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Dari grafik dapat diketahui bahwasanya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2008 s/d tahun

2012 adalah sebesar 12,80%. Sedangkan untuk belanja tidak terduga selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,23%.

### KEBIJAKAN DAN PROYEKSI BELANJA TAHUN 2014-2018

Untuk memproyeksikan jumlah belanja selama lima tahun ke depan, digunakan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 6% per tahun dengan melihat asumsi dari laju pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5% untuk PAD dan 5% untuk pendapatan transfer. Adapun proyeksi pertumbuhan belanja lebih rendah dari asumsi proyeksi pendapatan, hal tersebut lebih dikarenakan efisiensi dan efektifitas belanja terhadap kemungkinan timbulnya pembiayaan yang lebih besar. Namun demikian dalam perjalanan waktu nanti, proyeksi ini tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang pasti akan tercapai. Dengan demikian, tren pertumbuhan belanja dapat diuraikan pada tabel berikut:

URAIAN	PROYEKSI BELANJA DAERAH (Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.430.797.558.059,78</b>	<b>1.516.645.411.543,37</b>	<b>1.607.644.136.235,97</b>	<b>1.704.102.784.410,13</b>	<b>1.806.348.951.474,74</b>
Belanja Pegawai	1.037.126.528.011,46	1.099.354.119.692,15	1.165.315.366.873,68	1.235.234.288.886,10	1.309.348.346.219,26
Belanja Barang	281.967.499.184,14	298.885.549.135,19	316.818.682.083,30	335.827.803.008,30	355.977.471.188,80
Belanja Bunga	15.592.098,10	16.527.623,99	17.519.281,43	18.570.438,31	19.684.664,61
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	40.340.665.920,00	42.761.105.875,20	45.326.772.227,71	48.046.378.561,37	50.929.161.275,06
Belanja Bantuan Sosial	21.464.050.770,00	22.751.893.816,20	24.117.007.445,17	25.564.027.891,88	27.097.869.565,40
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	49.883.222.076,08	52.876.215.400,64	56.048.788.324,68	59.411.715.624,16	62.976.418.561,61
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.729.078.517,45</b>	<b>246.692.823.228,49</b>	<b>261.494.392.622,20</b>	<b>277.184.056.179,53</b>	<b>293.815.099.550,31</b>
Belanja Tanah	5.198.075.901,40	5.509.960.455,48	5.840.558.082,81	6.190.991.567,78	6.562.451.061,85
Belanja Peralatan dan Mesin	50.694.713.451,14	53.736.396.258,21	56.960.580.033,70	60.378.214.835,72	64.000.907.725,87
Belanja Gedung dan Bangunan	98.675.944.686,30	104.596.501.367,48	110.872.291.449,53	117.524.628.936,50	124.576.106.672,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.674.790.186,11	72.795.277.597,27	77.162.994.253,11	81.792.773.908,29	86.700.340.342,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.262.170.026,50	8.757.900.228,09	9.283.374.241,78	9.840.376.696,28	10.430.799.298,06
Belanja Aset Lainnya	1.223.384.266,00	1.296.787.321,96	1.374.594.561,28	1.457.070.234,95	1.544.494.449,05
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.742.304.695,06</b>	<b>2.906.842.976,76</b>	<b>3.081.253.555,37</b>	<b>3.266.128.768,69</b>	<b>3.462.096.494,81</b>
Belanja Tidak Terduga	2.742.304.695,06	2.906.842.976,76	3.081.253.555,37	3.266.128.768,69	3.462.096.494,81
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.666.268.941.272,29</b>	<b>1.766.245.077.748,62</b>	<b>1.872.219.782.413,54</b>	<b>1.984.552.969.358,35</b>	<b>2.103.626.147.519,86</b>

Sumber : Hasil Analisis

### 3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

#### **KEBIJAKAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH MASA LALU**

Pembiayaan daerah yang dianggarkan pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kondisi surplus (defisit) Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.7**  
**SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2010 S/D 2012**

URAIAN	SURPLUS (DEFISIT) (Rp)		
	2010	2011	2012
SURPLUS (DEFISIT)	2.973.678.791,94	36.403.432.893,26	(16.901.117.317,59)

Sumber : BPPKAD Kab. Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun anggaran 2010 dan 2011 terjadi surplus, yaitu sebesar Rp.2.973.678.791,94 pada tahun 2010 dan sebesar Rp.36.403.432.893,26 pada tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 terjadi defisit sebesar Rp. 16.901.117.317,59.

Selanjutnya komposisi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada kurun waktu yang

sama adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.8**  
**KOMPOSISI PEMBIAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2010 S/D 2012**

URAIAN	PEMBIAYAAN (Rp)		
	2010	2011	2012
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	76.171.659.206,57	84.707.645.697,70	111.637.408.820,96
Pencairan Dana Cadangan	6.976.487.974,19	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	355.765.817,00	431.001.883,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	5.842.260.880,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>83.148.147.180,76</b>	<b>85.063.411.514,70</b>	<b>117.910.671.583,96</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Pembentukan Dana Cadangan	-	3.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00	6.665.255.312,00	17.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	164.180.275,00	164.180.275,00	164.180.275,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.414.180.275,00</b>	<b>9.829.435.587,00</b>	<b>17.164.180.275,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>81.733.966.905,76</b>	<b>75.233.975.927,70</b>	<b>100.746.491.308,96</b>

Sumber : BPPKAD Kab. Tulungagung

Sedangkan besarnya kontribusi tiap komponen baik dalam penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel III.9**  
**KONTRIBUSI KOMPONEN PEMBIAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2010 S/D 2012**

URAIAN	TAHUN		
	2010	2011	2012
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	91,61%	99,58%	94,68%
Pencairan Dana Cadangan	8,39%	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0,42%	0,37%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	4,95%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
<b>ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
Pembentukan Dana Cadangan	-	30,52%	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	88,39%	67,81%	99,04%
Pembayaran Pokok Utang	11,61%	1,67%	0,96%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya penerimaan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2012 didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yaitu pada tahun 2010 sebesar 91,61%, pada tahun 2011 sebesar 99,58% dan pada tahun 2012 sebesar 94,68% dari total penerimaan pembayaran. Untuk tahun 2010 setelah komponen SILPA, penerimaan pembiayaan diikuti oleh komponen pencairan dana cadangan sebesar 8,39%. Pada tahun 2011 komponen Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menempati urutan berikutnya setelah SILPA, yaitu sebesar 0,42%. Pada tahun 2012, setelah SILPA urutan kedua adalah komponen penerimaan pinjaman daerah yaitu sebesar 4,95%, diikuti oleh komponen Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,37%.



Apabila ditinjau dari pos Pengeluaran Pembiayaan, dari table di atas juga dapat diketahui bahwa pengeluaran pembiayaan pemerintah kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2010 s/d 2012 didominasi oleh komponen Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 88,39% pada tahun 2010, 67,81% pada tahun 2011 dan sebesar 99,04 pada tahun 2012.

Struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SILPA atau SIKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran) pada akhir tahun anggaran. Apabila terdapat sisa anggaran (SILPA) maka sisa tersebut dapat digunakan untuk anggaran tahun berikutnya sehingga tidak akan hangus. Sedangkan SIKPA dapat terjadi apabila belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga terjadi defisit fiskal. SILPA Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2012 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.10**  
**SILPA KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PERIODE TAHUN 2010 S/D 2012**

URAIAN	Tahun		
	2010	2011	2012
SILPA (Rp)	84.707.645.697,70	111.637.408.820,96	83.845.373.991,37

Sumber : BPPKAD Kab. Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pada tahun anggaran 2010 dan 2011 terdapat SILPA, yaitu sebesar Rp.84.707.645.697,70 pada tahun 2010 dan sebesar Rp.111.637.408.820,96 pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat SILPA sebesar Rp. 83.845.373,991,37.

### 3.4. NERACA DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) definisi asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Neraca pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk per 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel III.11**  
**NERACA KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

URAIAN	2012	2011
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>106.345.265.424,72</b>	<b>132.584.754.166,36</b>
Kas	78.626.149.606,37	104.169.199.493,27
Kas di BLU	5.225.650.885,00	7.530.824.059,14
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang	10.577.376.526,97	8.114.115.052,53
Persediaan	11.916.088.406,38	12.770.615.561,42
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>72.566.078.088,94</b>	<b>32.795.543.684,49</b>
Investasi Non Permanen	4.975.904.791,00	5.010.000.000,00
Investasi Permanen	67.590.173.297,94	27.785.543.684,49
<b>ASET TETAP</b>	<b>1.689.619.344.734,92</b>	<b>1.445.639.610.105,21</b>
Tanah	404.301.096.178,00	358.301.228.988,00
Peralatan dan Mesin	256.830.926.892,08	211.578.866.308,08
Gedung dan Bangunan	391.727.275.754,00	316.872.003.022,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	594.196.068.481,75	526.086.658.570,33
Aset Tetap Lainnya	31.085.569.260,09	23.291.069.235,09
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.478.408.169,00	9.509.783.981,71
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>3.193.823.039,99</b>	<b>3.017.463.664,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>25.241.701.075,57</b>	<b>16.235.190.309,86</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.896.966.212.364,14</b>	<b>1.630.272.561.929,92</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek	3.928.194.544,48	358.814.176,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.842.260.880,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9.770.455.424,48</b>	<b>358.814.176,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>102.417.070.880,24</b>	<b>132.225.939.990,36</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	83.845.373.991,37	111.637.408.820,96
Pendapatan yang Ditangguhkan	6.295.000,00	62.614.731,45
Cadangan Piutang	10.577.376.526,97	8.114.115.052,53
Cadangan Persediaan	11.916.088.406,38	12.770.615.561,42
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(3.928.063.044,48)	(358.814.176,00)
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1.781.584.863.019,43</b>	<b>1.494.670.344.099,56</b>
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	72.566.078.088,94	32.795.543.684,49
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.689.619.344.734,92	1.445.639.610.105,21
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	25.241.701.075,57	16.235.190.309,86
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(5.842.260.880,00)	0,00
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>3.193.823.039,99</b>	<b>3.017.463.664,00</b>
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	3.193.823.039,99	3.017.463.664,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1.887.195.756.939,66</b>	<b>1.629.913.747.753,92</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.896.966.212.364,14</b>	<b>1.630.272.561.929,92</b>

Sumber : BPKAD Kab. Tulungagung

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kabupaten yang multifungsi, sampai saat ini Tulungagung tetap menyanggah banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Tulungagung diantaranya meliputi:

1. Pelayanan pendidikan pada umumnya masih belum maksimal
2. Layanan kesehatan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
3. Manajemen pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum optimal
4. Rendahnya kualitas infrastruktur
5. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya meningkatkan daya beli masyarakat
6. Kurangnya efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan

#### **4.2. ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN**

##### **4.2.1 Pendidikan**

Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan dua belas tahun telah dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Tulungagung. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1)

ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas, dan (2) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih relatif mahal.

Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (*transition from school to work*) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya

untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. Isu – isu strategis dalam pelaksanaan bidang pendidikan adalah :

1. Mutu Pendidikan
2. Manajemen Pendidikan
3. Sarana Prasarana Pendidikan
4. Tenaga Kependidikan
5. Anggaran Pendidikan
6. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal.
7. Peningkatan pemerataan mutu pendidikan.
8. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.

#### 4.2.2 Layanan kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi.

Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya (*cost barrier*). Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif belum optimal. Isu – isu strategis dalam pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

#### 4.2.3 Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan publik

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Terkait dengan pelayanan birokrasi kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas hal itu merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Berbicara masalah pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dikatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

1. Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 meliputi:

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas pemerintah yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan social, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah.

Tidak hanya permasalahan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan diperlukan biaya yang besar. Guna membantu pelayanan kesehatan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kaitannya dengan investasi. Atas dasar hal tersebut, dan guna menumbuhkan investasi dalam menumbuhkan perekonomian, diperlukan pelayanan publik perijinan yang baik.

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan



pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

Maka, pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Atas dasar itulah, Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah, dan murah.

Isu-isu strategis terkait dengan manajemen pemerintah daerah dan pelayanan publik meliputi:

1. Pemerintahan yang profesional, bersih, adil, transparan, dan akuntabel
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah
3. Peningkatan pelayanan perijinan
4. Penataan Administrasi Kependudukan

#### 4.1.4 Infrastruktur

Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan strategis maupun lokasi yang berpotensi menjadi pembangkit pertumbuhan kawasan sekitar dapat menjadikan hambatan tersendiri bagi upaya pencapaian target atau sasaran urusan-urusan pembangunan lainnya.

Kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam juga mengakibatkan kerusakan jalan sepanjang tahun. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.

Isu-isu strategis yang mendesak untuk di laksanakan guna menanggulangi permasalahan infrastruktur diantaranya adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Peningkatan Infrastruktur Irigasi
3. Peningkatan Infrastruktur Air Minum
4. Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

#### 4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara/daerah. Biasanya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau ukuran-ukuran pendapatan agregat lainnya. PDB/PRDB ini bisa positif dan/atau negatif. Sifatnya yang negatif yang menunjukkan terjadinya resesi ekonomi, sedangkan jika positif menunjukkan terjadinya ekspansi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bisa menimbulkan efek positif dan negatif. Positifnya, pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan distribusi pendapatan. Negatifnya, pertumbuhan ekonomi menyebabkan munculnya konsumerisme, kerusakan lingkungan hidup, ketidakadilan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Sementara itu, kata kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah investasi nyata (*real investment*) yang akan melahirkan efek berantai (*multiplier effect*). Perekonomian tak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab, pasar bukanlah sistem yang sempurna. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban mengintervensi dengan kebijakan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah Daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; kluster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dsb. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat. Isu-isu strategis guna menumbuhkan perekonomian adalah dengan :

1. Penguatan ekonomi lokal
2. Penguatan sektor primer
3. Pengembangan komoditas unggulan
4. Pola kemitraan dan kewirausahaan
5. Penguatan lembaga keuangan dan koperasi
6. Iklim investasi yang kondusif dan perluasan pasar

#### 4.2.6 Penanggulangan kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda nasional. Berbagai ikhtiar penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah memiliki tingkatan masalah yang beragam. Masalah-masalah utama yang sering menjadi kendala adalah adanya

kecenderungan untuk menyalahkan si miskin, menempatkan mereka sebagai obyek, programnya dikelola semacam proyek, dan tidak berkelanjutan. Situasi masalah ini menghendaki penyelesaian segera, yakni dengan mengembangkan cara pandang atau pendekatan baru dalam memahami kemiskinan dan melibatkan mereka, si miskin dalam formulasi strategi penanggulangan kemiskinan.

Isu-isu strategis terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah :

1. Efektifitas program-program kemiskinan
2. Masalah pendataan penduduk miskin

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Visi daerah 2014 – 2018 sesungguhnya merupakan inti dari keinginan atau kehendak Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2014 – 2018 dalam membangun Kabupaten Tulungagung 5 (lima) tahun yang akan datang, yang akan dicapai melalui beberapa misi daerah. Visi dan misi daerah ini berorientasi pada subjek pembangunan, yaitu (i) masyarakat, (ii) dunia usaha dan (iii) pemerintah. Bagi masyarakat, visi misi diorientasikan kepada pemberian aksesibilitas, pencapaian hasil pembangunan, pemerataan pendapatan, dan menciptakan rasa aman. Bagi dunia usaha, visi misi diorientasikan pada terciptanya jaminan dan kemudahan investasi serta kenyamanan usaha. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, visi misi menjadi umpan balik yang dapat meningkatkan sumberdaya pembangunan khususnya keuangan daerah, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan dasar dan mampu menggali potensi sumberdaya yang dimilikinya bagi peningkatan pendapatan daerah.

#### **5.1. VISI**

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2014-2018 adalah :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa”**

Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

Makna dari visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Visi **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung** adalah sebuah kondisi masyarakat yang *ayem, tentrem, mulya lan tinoto*.
- b. Visi **Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Profesional** adalah manusia yang melaksanakan pembangunan lebih mengedepankan kualitas kinerja, dengan etos kerja yang tinggi yang bermoral dan beretika.

- c. Visi **Berdasarkan Iman dan Taqwa** adalah melandaskan setiap tindakan berdasarkan norma dan kaidah agama.

## 5.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 – 2018, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
- 2) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
- 4) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
- 5) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.
- 6) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

**Misi pertama**, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga adanya usaha untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

**Misi kedua**, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.

**Misi ketiga**, ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.

**Misi keempat**, ditujukan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

**Misi kelima**, ditujukan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

**Misi keenam**, ditujukan untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD mengingat tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka merealisasikan keenam misi tersebut di atas, akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

**MISI 1** : Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan

**Tujuan :**

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Mengembangkan budaya berbasis kearifan lokal

**Sasaran :**

- Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat
- Meningkatnya pembiayaan pendidikan dan distribusinya secara proporsional
- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya
- Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- Mendorong prestasi olah raga dengan di dukung oleh upaya pemasyarakatan olah raga yang memadai

**MISI 2** : Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas

**Tujuan :**

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**Sasaran :**

- Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara proporsional
- Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB

**MISI 3** :Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis

**Tujuan :**

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan.



2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
3. Mewujudkan tatanan politik yang harmonis
4. Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum
5. Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama/kepercayaan

**Sasaran :**

- Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih
- Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan kompetensinya
- Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
- Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
- Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
- Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

**MISI 4 :** Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain

**Tujuan :**

1. Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti jalan, banjir, pemukiman, sampah, air minum dan lain-lain
2. Mendorong pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim
3. Mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu

**Sasaran :**

- Tersedianya sistem transportasi yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
- Tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap
- Tersedianya pengelolaan sampah dan air limbah secara optimal
- Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan kabupaten
- Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim lainnya
- Berkurangnya pencemaran lingkungan
- Tersedianya dokumen/peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim
- Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik
- Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seluruh wilayah

**MISI 5 :** Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan

**Tujuan :**

1. Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif

**Sasaran :**

- Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah
- Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat

- Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi khusus (agropolitan dan minapolitan) melalui sentra dan kluster
- Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif
- Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder
- Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah

**MISI 6** :Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

**Tujuan :**

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

**Sasaran :**

- Menurunnya jumlah penduduk miskin
- Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan
- Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat
- Meningkatnya tarap hidup masyarakat
- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

**Tabel V.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Kabupaten Tulungagung**

**Visi :** Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Berdasarkan Iman dan Taqwa

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat
			Meningkatnya pembiayaan pendidikan dan distribusinya secara proporsional
		Mengembangkan budaya berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya
			Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
		Mendorong prestasi olah raga dengan di dukung oleh upaya pemasyarakatan olah raga yang memadai	
2	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara proporsional
			Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB
3	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih
			Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan kompetensinya
			Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
		Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
		Mewujudkan tatanan politik yang harmonis	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis
		Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
		Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama/kepercayaan	Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
4	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti jalan, banjir, pemukiman, sampah, air minum dan lain-lain	Tersedianya sistem transportasi yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang Tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap Tersedianya pengelolaan sampah dan air limbah secara optimal
			Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan kabupaten
		Mendorong pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim lainnya Berkurangnya pencemaran lingkungan Tersedianya dokumen/peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik
		Mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seluruh wilayah
5	Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan	Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi khusus (agropolitan dan minapolitan) melalui sentra dan kluster Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah
6	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya tarap hidup masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005, bahwa strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya program dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Strategi atau cara untuk mencapai sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, karena strategi telah menetapkan cara untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan indikasi kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung untuk 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dirumuskan sebagai berikut :

#### **6.1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas serta Pelestarian/Pengembangan Kebudayaan**

Strategi pokok dalam peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga

adanya usaha untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Strategi tersebut meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar
2. Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah
3. Peningkatan layanan pendidikan
4. Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan
5. Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah
6. Pengembangan pola kemitraan lembaga pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri
7. Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin
8. Peningkatan jumlah aktivitas pengelolaan kekayaan budaya dan penganekaragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya
9. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
10. Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf
2. Peningkatan dan pengembangan pendidikan menengah dan non formal untuk pengembangan jaringan kependidikan, dan penuntasan buta huruf
3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan
5. Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar dan menengah
6. Pengembangan lembaga pendidikan usia dini
7. Peningkatan kreativitas lembaga sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha



8. Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu
9. Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa
10. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya
11. Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat

## **6.2 Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas**

Strategi pokok dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat. Strategi tersebut meliputi:

1. Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum pada sektor kesehatan
2. Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan
3. Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
4. Peningkatan Angka Harapan Hidup Masyarakat
5. Peningkatan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
8. Peningkatan Pelayanan KB

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan
2. Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan

5. Meningkatnya usia harapan hidup
6. Menurunkan angka bayi gizi buruk
7. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan seta peningkatan kalibrasi alat kesehatan
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Balita
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan
10. Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan
11. Pengembangan pelayanan pada peserta akseptor KB dan pasangan usia subur
12. Peningkatan mutu petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB)

### **6.3 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis**

Strategi pokok dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ini adalah peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah melalui penataan struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat kelurahan/desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis. Strategi tersebut meliputi:

1. Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan
3. Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan
5. Penyediaan Pelayanan publik yang prima
6. Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
8. Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan

9. Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia
10. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Pemantapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur
3. Perencanaan dan Pengembangan PNS
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNS
5. Peningkatan disiplin aparatur
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
7. Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah
8. Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik
9. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik masalah perijinan
10. Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan
11. Mewujudkan tertib administratif pelayanan publik
12. Meningkatkan upaya validasi data kependudukan
13. Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik
14. Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat
15. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum
16. Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba
17. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban
18. Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP
19. Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat

20. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat
21. Meningkatnya toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama
22. Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama

#### **6.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor-Sektor Yang Lain**

Strategi pokok dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain. Strategi tersebut meliputi :

1. Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan
3. Peningkatan pengelolaan persampahan
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam
5. Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
6. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota
8. Peningkatan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh
9. Peningkatan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota
10. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada air bersih

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, halte
3. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan dan membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;

4. Pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah
6. Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam
7. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku
8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat
9. Mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana
11. Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan layanan penyediaan air bersih

#### **6.5 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan Kewirusahaan.**

Strategi pokok dalam Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan. Strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional
2. Pengembangan usaha di bidang industri kecil mikro dan menengah
3. Memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu kawasan potensial
4. Meningkatkan kontribusi sektor primer melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan sumber daya dan pengembangan teknologi
5. Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja
6. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas per-dagangan skala mikro, kecil dan menengah guna mewujudkan daya saing diantara modernisasi sarana prasarana perdagangan
2. Meningkatkan nilai tambah produksi industri mikro, kecil, dan menengah
3. Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer
4. Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan
5. Menciptakan peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas SDM, aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya
6. Pengembangan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin
7. Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu dengan memperhatikan aspek konservasi
8. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### **6.6 Pengentasan Dan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pola Terpadu**

Strategi pokok dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu, meliputi:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan & pro rakyat

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan
4. Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan
5. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus
6. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga TKI

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
3. Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
4. Melakukan upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
5. Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus
6. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan
8. Pembinaan dan pemberdayaan Keluarga TKI

**Tabel VI.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah dan Kebijakan**  
**Kabupaten Tulungagung**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI I :</b>				
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf
			Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah	Peningkatan dan pengembangan pendidikan menengah dan non formal untuk pengembangan jaringan kependidikan, dan penuntasan buta huruf
			Peningkatan layanan pendidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan	Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan
		Meningkatnya pembiayaan pendidikan dan distribusinya secara proporsional	Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah	Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar dan menengah
			Pengembangan pola kemitraan lembaga pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri	Pengembangan lembaga pendidikan usia dini
			Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin	Peningkatan kreativitas lembaga sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha
		Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu		
2	Mengembangkan budaya berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya	Peningkatan jumlah aktivitas pengelolaan kekayaan budaya dan penganekaragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya	Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya
		Mendorong prestasi olah raga dengan di dukung oleh upaya pemasyarakatan olah raga yang memadai	Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai	Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat
<b>MISI II :</b>				
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum pada sektor kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan	Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan
			Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan
			Peningkatan Angka Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatnya usia harapan hidup Menurunkan angka bayi gizi buruk
			Peningkatan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan serta peningkatan kalibrasi alat kesehatan
		Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara proporsional	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Balita
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan
		Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB	Peningkatan Pelayanan KB	Pengembangan pelayanan pada peserta akseptor KB dan pasangan usia subur Peningkatan mutu petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB)
<b>MISI III :</b>				
<b>Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis</b>				
1	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih	Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Pemantapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan	Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur Perencanaan dan Pengembangan PNS Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNS Peningkatan disiplin aparatur
		Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik
2	Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Penyediaan Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik masalah perijinan
			Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik	Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan
			Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tertib administratif pelayanan publik
				Meningkatkan upaya validasi data kependudukan
3	Mewujudkan tatanan politik yang harmonis	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan	Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik
4	Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia	Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat
				Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum
				Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba
				Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban
				Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat
				Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat
5	Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama/kepercayaan	Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama  Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama
MISI IV : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain				
1	Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mengatasi masalah yang menahun seperti jalan, banjir, pemukiman, sampah, air minum dan lain-lain	Tersedianya sistem transportasi yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, halte
		Tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan dan membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;  Pemeliharaan jalan dan jembatan
		Tersedianya pengelolaan sampah dan air limbah secara optimal	Peningkatan pengelolaan persampahan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah
		Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan kabupaten	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam	Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Mendorong pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim lainnya	Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku
		Berkurangnya pencemaran lingkungan	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat
		Tersedianya dokumen/peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota	Mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang
		Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	Peningkatan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana
		Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik	Peningkatan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota	Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan
3	Mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seluruh wilayah	Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada air bersih	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	MISI V :	Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan		
1	Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional	Melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perdagangan skala mikro, kecil dan menengah guna mewujudkan daya saing diantara modernisasi sarana prasarana perdagangan
		Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat	Pengembangan usaha di bidang industri kecil mikro dan menengah	Meningkatkan nilai tambah produksi industri mikro, kecil, dan menengah
		Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi khusus (agropolitan dan minapolitan) melalui sentra dan kluster	Memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu kawasan potensial	Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer
		Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif	Meningkatkan kontribusi sektor primer melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan sumber daya dan pengembangan teknologi	Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan
		Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder	Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja	Menciptakan peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas SDM, aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya
		Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah	Mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu dengan memperhatikan aspek konservasi</p> <p>Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
	MISI VI	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu		
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan & pro rakyat	Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif
		Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan	Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan	Melakukan upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus	Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus
2	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan
			Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga TKI	Pembinaan dan pemberdayaan Keluarga TKI

## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran. Kebijakan umum ini menjadi acuan bagi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan pada strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro, sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Adapun target program yang dijabarkan mengacu pada pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target-target yang telah ditetapkan dalam MDG's dan SPM menjadi dasar pengukuran kinerja terkait beberapa urusan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil.

#### 7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain

5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan umum ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistematis, yaitu (i) Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi, (ii) Tahap Akselerasi dan Penguatan dan (iii) Tahap Pengembangan, dimana kesemuanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada.

#### **A. Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi**

Tahap pertama dari pembangunan Kabupaten Tulungagung dimulai dari tahapan inisiasidan restrukturisasi dilaksanakan selama satu tahun sejak ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2013-2014) yang diprioritaskan pada: (1) Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, (2) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (3) Penguatan sarana dan prasarana dasar, (4) Membangun *link-match* dunia usaha dan dunia pendidikan, (5) Kebijakan tata ruang.

#### **B. Tahap Akselerasi dan Penguatan**

Tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama sebagai tahapan akselerasi dan penguatan fondasi yang sudah ada. Tahap kedua ini diprioritaskan pada: (1) Perkuatan kualitas pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), (2) Pemenuhan layanan dasar berbasis paritispasi dunia usaha/pengembang, serta (3) Konsolidasi ruang dan iklim usaha.

#### **C. Tahap Pengembangan**

Tahap terakhir dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung adalah merupakan tahap pengembangan. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada: (1) Mempertahankan kualitas layanan dasar, (2) Memelihara stabilitas ekonomi,



keamanan, sosial politik dan iklim usaha, (3) Terwujudnya daya saing yang handal, dan (4) Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan layanan.

## **7.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

**MISI I.** Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan

### **Urusan Pendidikan**

Kebijakan pada urusan pendidikan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar, menengah dan non formal, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan media pendidikan yang informatif dan pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan menengah
4. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
6. Program Pendidikan anak usia dini
7. Program Manajemen pelayanan pendidikan

### **Urusan Kearsipan**

Kebijakan pada urusan kearsipan secara umum diarahkan pada upaya penyelamatan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting daerah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

## **Urusan Kebudayaan**

Kebijakan pada urusan kebudayaan secara umum diarahkan pada upaya pengembangan kebudayaan melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan kekayaan budaya

## **Urusan Pemuda dan Olahraga**

Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

## **MISI II. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas**

### **Urusan Kesehatan**

Kebijakan pada urusan kesehatan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan layanan kesehatan, pemerataan akses untuk masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, dan peningkatan perlindungan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan regulasi bidang kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunkan angka bayi gizi buruk, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu melahirkan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
12. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

### **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara umum diarahkan pada pengembangan pelayanan pada peserta akseptor KB dan Pasangan Usia Subur dan peningkatan mutu petugas penyuluh keluarga berencana. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana

**MISI III.** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis

### **Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

Kebijakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian secara umum diarahkan pada pemantapan organisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan ketatalaksanaannya, pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur, perencanaan dan pengembangan PNS, pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNS, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah,

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik masalah perijinan, pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan, mewujudkan tertib administratif pelayanan publik, peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem Dan Prosedur Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
4. Program Optimasi Kelembagaan
5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

#### **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kebijakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

#### **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kebijakan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

#### **Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kebijakan pada urusan kependudukan dan catatan sipil secara umum diarahkan pada upaya peningkatan validasi data kependudukan, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Penataan administrasi kependudukan

## **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kebijakan pada urusan Komunikasi dan Informatika secara umum diarahkan pada upaya penyediaan sistem teknologi informasi pelayanan publik, yang akan dijabarkan dalam program prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa

## **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Kebijakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara umum diarahkan pada upaya pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik, peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum, peningkatan kerjasama dengan kepolisian, deteksi dini dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban, peningkatan profesionalisme aparat satpol PP, dan mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program strategis sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

**MISI IV.** Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain

## **Urusan Pekerjaan Umum**

Kebijakan pada urusan pekerjaan umum secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan serta pemeliharaannya secara berkala, dan pendayagunaan sumber daya air untuk irigasi dan layanan penyediaan air bersih. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

3. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Limbah

### **Urusan Energi Sumber Daya Mineral**

Kebijakan pada urusan energi sumber daya mineral secara umum diarahkan pada upaya pengendalian dan pengawasan usaha bidang sumber daya mineral melalui penertiban ijin usaha. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut :

1. Program Pemetaan Potensi Tambang Secara Bertahap

### **Urusan Perhubungan**

Kebijakan pada urusan perhubungan secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, halte. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

### **Urusan Lingkungan Hidup**

Kebijakan pada urusan lingkungan hidup secara umum diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, dan mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

## **Urusan Tata Ruang**

Kebijakan pada urusan tata ruang secara umum diarahkan pada upaya mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang dan mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan, yang mana dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

## **Urusan Sosial**

Kebijakan pada urusan sosial secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana, yang mana untuk melaksanakan kebijakan tersebut dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim

**MISI V.** Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan

## **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Kebijakan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum diarahkan pada upaya pengembangan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi Dan UMKM
2. Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif
3. Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Koperasi Dan UMKM
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

## **Urusan Pertanian**

Kebijakan pada urusan pertanian secara umum diarahkan pada upaya menciptakan pusat pengembangan kawasan ekonomi baru yang berorientasi pada sektor primer, pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan, dan pemberian stimulan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

## **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan secara umum diarahkan pada upaya pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan khususnya hasil perikanan, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

## **Urusan Ketahanan Pangan**

Kebijakan pada urusan ketahanan pangan secara umum diarahkan pada upaya pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan



### **Urusan Perindustrian**

Kebijakan pada urusan perindustrian secara umum diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah industri kecil, mikro dan menengah, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
3. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

### **Urusan Perdagangan**

Kebijakan pada urusan perdagangan secara umum diarahkan pada upaya membenahan tata kelola dan infrastruktur pasar, peningkatan nilai tambah produksi industri kecil, mikro, menengah dan penciptaan kawasan ekonomi terpadu, dan meningkatkan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas SDM, aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pasar
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

### **Urusan Kehutanan**

Kebijakan pada urusan kehutanan secara umum diarahkan pada upaya pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu dengan memperhatikan aspek konservasi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa program strategis, yaitu :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
3. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

## **MISI VI.** Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

### **Urusan Sosial**

Kebijakan pada urusan Sosial secara umum diarahkan pada upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, peningkatan taraf hidup masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus, peningkatan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut

1. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

### **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kebijakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

## **Urusan Ketenagakerjaan**

Kebijakan pada urusan ketenagakerjaan secara umum diarahkan pada upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Program Perluasan Kesempatan Kerja

**Tabel VII.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Tulungagung**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI I : Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan								
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	1:30	1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Rasio Murid per Kelas tk SMP/MTs	1:30	1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Rasio Murid per Kelas tk SMA/SMK/MA	1:41	1:36	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah tk SD/MI	0,02%	0,01%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah tk SMP/MTs	0,59%	0,55%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persen anak bersekolah di SD/MI (APK)	103,91%	100,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	99,80%	99,90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)	78,40%	85,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Melek Huruf Usia 10 tahun ke atas	94,34%	94,44%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persen anak bersekolah di SMP/MTs (APK)	97,62%	99,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Rata-rata lama sekolah	7,86	7,91	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah	Peningkatan dan pengembangan pendidikan menengah dan non formal untuk pengembangan jaringan kependidikan, dan penuntasan buta huruf		Angka Putus Sekolah tk SMA/MA/SMK	0,81%	0,78%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Prosentase anak bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)	69,53%	75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Peningkatan layanan pendidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru SD/MI berkualifikasi S1	66%	73%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD/MI berkualifikasi S2	0,07%	1%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1	88%	97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S2	3,60%	4%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S1	90%	99%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S2	6,30%	7%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Guru SD/SMP/SMA, SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	77%	85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan	Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SD	68,83%	80,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMP	86,70%	87,95%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMA/SMK	96%	97,10%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah RKB terbangun tingkat SMP/SMA/SMK	14 RKB	84 RKB	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan dan sarana prasarannya	1 unit mobil perpustakaan	1 Unit	Pendidikan	KPAD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					1 unit motor perpusling	5 Unit	Pendidikan	KPAD
					1 perpusda	1 Unit	Pendidikan	KPAD
				Prosentase penerapan sistem e-Library	0%	40%	Pendidikan	KPAD
				Pembinaan tenaga perpustakaan	19 perpus kecamatan	19 Unit	Pendidikan	KPAD
					23 perpus desa	38	Pendidikan	KPAD
					18 taman bacaan	22	Pendidikan	KPAD
					135 Perpustakaan Sekolah	185	Pendidikan	KPAD
					60 Orang tenaga pengelola perpustakaan	360 orang	Pendidikan	KPAD
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Prosentase penerapan sistem kearsipan secara baku pada SKPD	15%	40%	Kearsipan	KPAD
Meningkatnya pembiayaan pendidikan dan distribusinya secara proporsional	Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah	Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar dan menengah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase PAUD yang menerima bantuan	30%	45%	Pendidikan	Dinas Pendidikan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lembaga/siswa penerima BOS jenjang SD dan SMP	765 Lmbg/124.246 siswa	765 lembaga/124.246 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah lembaga/siswa penerima BOSDA jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	436 lembaga/44.741 siswa	436 lembaga/45.171 siswa		
			Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga/siswa penerima BOS SLTA (SMA/SMK Negeri dan Swasta)	48 lembaga/24.809 siswa	48 lembaga/25.239 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pengembangan lembaga pendidikan usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan jumlah PAUD	248	252	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Pengembangan pola kemitraan lembaga pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri	Peningkatan kreativitas lembaga sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha	Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga yang memiliki MoU dengan Dunia Usaha	3 lembaga	5 lembaga	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin	Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Bantuan Beasiswa dalam rangka mendukung proses belajar mengajar siswa di Kabupaten Tulungagung	10 lembaga/ 300 siswa	23 lembaga/ 450 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya	Peningkatan jumlah aktivitas pengelolaan kekayaan budaya dan penganekaragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya	Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan terhadap organisasi seni dan budaya	31 organisasi	39 organisasi	Kebudayaan	Disbudparpora
				Jumlah situs budaya yang dikelola	1	36	Kebudayaan	Disbudparpora
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Organisasi kepemudaan yang sehat dan eksis	12 organisasi	15 organisasi	Pemuda dan Olahraga	Disbudparpora

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Mendorong prestasi olah raga dengan di dukung oleh upaya pemasyarakatan olah raga yang memadai	Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai	Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	4.420 atlet	7.118 atlet	Pemuda dan Olahraga	Disbudparpora
<b>MISI II :</b>								
Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas								
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum pada sektor kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,0	3,8	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	9	13	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rasio bidan per 100.000 penduduk	36	41	Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Rasio perawat per 100.000 penduduk	74	83	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan	Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesda	29,5%	32%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesmas	54,09%	58%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesmas)	11,38%	25%	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda)	10,54%	15%	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin non kartu	3,02%	10%	Kesehatan	RSUD Dr. Iskak

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Cataract Surgery Rate (CSR) / Angka Operasi Katarak	239 jiwa	456 jiwa	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak
		Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundangan terbaru	70%	82%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	35,32%	65%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	6,3%	9%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	82,93%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita	16,99%	40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB	38%	43,3%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan DBD	94,44%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan Diare	55,86%	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan pengobatan malaria	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	60%	85%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	74%	79%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Angka Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatnya usia harapan hidup	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Usia Harapan Hidup	71,8	71,89	Kesehatan	Dinas Kesehatan/RSUD Dr. Iskak
		Menurunkan angka bayi gizi buruk	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Peningkatan, Pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya	Pengadaan peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan serta peningkatan kalibrasi alat kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	80%	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	80%	90%	Kesehatan	RSU Dr. Iskak
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Prosentase ketersediaan perbekalan farmasi rumah sakit	100%	100%	Kesehatan	RSU Dr. Iskak
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara proporsional	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Balita	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	94,79%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,57%	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,72%	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan		Cakupan Ibu Bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB	Peningkatan Pelayanan KB	Pengembangan pelayanan pada peserta akseptor KB dan pasangan usia subur	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	78,1%	79%	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA KB
		Peningkatan mutu petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB)		Intensitas pembinaan petugas penyuluh KB dalam setahun	2 x	4 x	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA KB
MISI III :	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis							

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih	Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Pemantapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Keg	1 Keg	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Organisasi
Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan	Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon II	9%	25%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi
				Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon III	50%	70%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon IV	35%	60%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi
		Perencanaan dan Pengembangan PNS	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pelaksanaan Bintek/Pelatihan PNS	3 Kali bintek	4	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNS		Presentase kelengkapan fitur aplikasi SIMPEG online	50%	100%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Peningkatan disiplin aparatur		Prosentase Jumlah pelanggaran disiplin yang terselesaikan	70%	90%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah/ Inspektorat
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Program Optimasi Kelembagaan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD	Ada	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Bag. Pemerintahan / Bag. Organisasi
				Tersedianya dokumen LAKIP	Ada	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Bag. Organisasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerapan IT pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	2 Sistem IT	2 Sistem IT	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Dispenda
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Kab Tulungagung/ Jumlah website SKPD yang ada *100	39	43	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Dishub Kominfo/Humas
			Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui media yang dimiliki	6 KIM	21 KIM	Komunikasi dan Informatika	Dishub Kominfo/Humas

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Penyediaan Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik masalah perijinan	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pelayanan Perijinan Online	0	10	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
				Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	103 ijin	115 ijin	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
	Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik	Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kades, Perangkat Desa, RT dan RW	100%	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Bag. Pemerintahan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tertib administratif pelayanan publik	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Pelayanan Publik	Ada	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Bag. Organisasi
		Meningkatkan upaya validasi data kependudukan	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	58%	90%	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispenduk Capil/Kecamatan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan	Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik	Program pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya pembinaan politik masyarakat	125 Orang	165 Orang	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia	Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7 kali sosialisasi	8 kali sosialisasi	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Bag. Hukum
		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100%	100%	100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Koordinasi dalam Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1 X	5 x	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Bag. Kesra



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka Kriminalitas	937	917	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Petugas satpol PP (Per Hari)	3 x	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Petugas Linmas per RT	0,6	1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (dalam setahun)	1 x	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama	Meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi koordinasi lintas agama	1 x	5 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
		Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama	0	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
<b>MISI IV :</b>	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain							
Tersedianya sistem transportasi yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum dalam daerah	ada ( Jumlah trayek MPU = 143 trayek )	ada	Perhubungan	Dishub Kominfo
				Tersedianya bis sekolah gratis	4 unit	9 unit	Perhubungan	Dishub Kominfo

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, halte	program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya halte pada tiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	4 Unit	9 Unit	Perhubungan	Dishub Kominfo
				Tersedianya terminal angkutan penumpang dan Terminal Cargo/ Terminal Bongkar Muat	1 Unit terminal penumpang	2 Unit terminal penumpang dan terminal cargo	Perhubungan	Dishub Kominfo
Tersedianya jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan dan membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.220 Km	1.397 Km	Pekerjaan Umum	PU BMCK
		Pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	30%	65%	Pekerjaan Umum	PU BMCK

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Tersedianya pengelolaan sampah dan air limbah secara optimal	Peningkatan pengelolaan persampahan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah ((volume sampah yang terangkut/ volume total sampah) x 100% )	60%	80%	Lingkungan Hidup	PU BMCK
Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan kabupaten	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam	Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan SDA	Jumlah koordinasi dan pembinaan pengelolaan SDA = 2 Kali	4 Kali	Lingkungan Hidup	Bag. Sumber Daya Alam
			Program pemetaan potensi tambang secara bertahap	Tersedianya peta potensi tambang	Ada	Ada	Energi Sumber Daya Mineral	Dinas PU Pengairan dan ESDM

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim lainnya	Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	4.602,77 hektar	4.702,77 hektar	Pekerjaan Umum	Dinas PU Pengairan dan ESDM
Berkurangnya pencemaran lingkungan	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum kasus lingkungan	Kasus terselesaikan 100%	Kasus terselesaikan 100 %	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Kuantitas Pengelolaan Sumber Air	93 lokasi sumber air	134 lokasi sumber air	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Kuantitas Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	6 Titik Badan Air	6 Titik Badan Air	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Perolehan Adipura	Memperoleh Adipura	Memperoleh Adipura	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Tersedianya dokumen/ peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota	Mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang	Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan fungsi kota	2 dokumen RDTRK	19 dokumen RDTRK	Tata Ruang	Bappeda
Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	Peningkatan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana	Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim	Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan	100%	100%	Sosial	BPBD
Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik	Peningkatan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota	Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tertatanya RTH yang ada	100%	100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seluruh wilayah	Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada air bersih	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	80%	90%	Pekerjaan Umum	DPU BMCK

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI V : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan								
Meningkatnya dan memprioritaskan peran pasar-pasar (tradisional) daerah	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional	Melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perdagangan skala mikro, kecil dan menengah guna mewujudkan daya saing di antara modernisasi sarana prasarana perdagangan	Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Terpeliharanya sarana prasarana pasar tradisional	12 unit	32 unit	Perdagangan	Disperindag/ Dispenda
Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat	Pengembangan usaha di bidang industri mikro, kecil dan menengah	Meningkatkan nilai tambah produksi industri mikro, kecil dan menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang di bina	300 IKM	1.980 IKM	Perindustrian	Disperindag
				Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah	42 HaKI	55 HaKI	Perindustrian	Disperindag
			Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina	25 sentra industri produk unggulan lokal	31 sentra	Perindustrian	Disperindag

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi	8 IKM mendapat fasilitasi dari Pemda untuk mengikuti pameran	35 IKM	Perdagangan	Disperindag
				Penyelenggaraan pameran promosi produk unggulan daerah skala nasional	0 event	1 event	Perdagangan	Disperindag
			Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan	6 Kasus dapat diselesaikan 100%	100,00%	Perdagangan	Disperindag
Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pusat pengembangan dan kawasan ekonomi khusus (agropolitan dan minapolitan) melalui sentra dan kluster	Memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu kawasan potensial	Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer	Program Pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	Kawasan Agropolitan dalam tahap pengembangan	1 kawasan	Pertanian	Dinas Pertanian & BKPP



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Penguatan kapasitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif	Meningkatkan kontribusi sektor primer melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan sumber daya dan pengembangan teknologi	Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Keberadaan lumbung terbangun	Lumbung yang terbangun 16 unit	Lumbung yang terbangun 31 unit	Ketahanan Pangan	BKPP
				Jumlah kelompok diversifikasi pekarangan sebagai sumber pangan	Jumlah kelompok P2KP 10, Kelompok KRPL 10	Jumlah kelompok P2KP 20, Kelompok KRPL 20	Ketahanan Pangan	BKPP
				Peserta sosialisasi tentang batasan penggunaan BTP yang dianjurkan	50 Produsen	160 produsen pangan olahan	Ketahanan Pangan	BKPP
				Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan ( PPH) = 88,7	90	Ketahanan Pangan	BKPP
				Peserta sosialisasi tentang penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal	150 peserta sosialisasi	350 peserta sosialisasi	Ketahanan Pangan	BKPP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Persentase Kecamatan rawan gizi	5,30%	4,0%	Ketahanan Pangan	BKPP
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi hasil pertanian/ perkebunan	Jumlah produksi hasil pertanian = 316.444 ton; Jagung = 197.261 ton; Kedelai = 11.039 ton	Padi = 356.029 ton; Jagung = 267.808 ton; Kedelai = 12.423 ton	Pertanian	Dinas Pertanian & BKPP
					Jumlah produksi hasil perkebunan Kelapa = 116.954.000 butir; Tebu = 5.947.000 Kw; Tembakau = 2.522,5 Ton	Kelapa = 188.695.000 butir; Tebu = 7.433.750 Kw; Tembakau = 2.800 Ton	Pertanian	Dishutbun
				Bantuan sarana prasarana produksi	1 paket	5 paket	Pertanian	Dishutbun
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kuantitas produksi peternakan	Produksi daging = 16.590 ton	17.179 ton	Pertanian	Dinas Peternakan
					Produksi telur = 42.597 ton	44.769 ton	Pertanian	Dinas Peternakan
					Produksi susu = 45.279 ton	48.062 ton	Pertanian	Dinas Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
					Sapi Potong 95.800 ekor; Sapi Perah 17.599 ekor; Kambing 175.111 ekor; Domba 4.017 ekor; Ayam Petelur 3.555.771 ekor; Ayam Pedaging 2.545.500 ekor; Ayam Buras 2.168.144 ekor; dan Itik 428.255 ekor	Sapi Potong 110.964 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Petelur 3.925.859 ekor; Ayam Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor	Pertanian	Dinas Peternakan
				Stabilnya kualitas produk hasil peternakan	Persentase produk hasil peternakan yang aman 99%	99%	Pertanian	Dinas Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Jumlah kelompok agribisnis peternakan	176 kelompok terdiri dari: 40 Kelompok sapi perah, 62 kelompok sapi potong, 5 kelompok ayam ras, 11 kelompok ayam buras, 48 kelompok kambing, 2 kelompok domba dan 8 kelompok itik	212 kelompok terdiri dari: 45 Kelompok sapi perah, 67 kelompok sapi potong, 10 kelompok ayam ras, 16 kelompok ayam buras, 55 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 14 kelompok itik	Pertanian	Dinas Peternakan
			Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Intensitas pengawasan terhadap kejadian penyakit hewan menular	Persentase Surveillance/kejadian penyakit menular = 82,5%	90%	Pertanian	Dinas Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Persentase wilayah yang terkena wabah (population at risk)	25%	< 15%	Pertanian	Dinas Peternakan
				Angka kematian ternak akibat penyakit (mortabilitas)	Mortabilitas = 2%	<1%	Pertanian	Dinas Peternakan
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Produksi ikan konsumsi = 28.367 ton	34.481 ton	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					produksi ikan hias = 56.324.370 ekor	68.462.624 ekor	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Berkembangnya kawasan Minapolitan	tahap dokumen perencanaan	Tahap pengembangan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil produksi perikanan tangkap	Produksi = 6.001 ton	7.294 ton	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di bidang pengolahan dan pemasaran sektor primer dan sekunder	Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja	Menciptakan peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas SDM, aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jaringan pemasaran produk potensi ekspor	Jumlah eksportir = 4	16 eksportir	Perdagangan	Disperindag
				Ekspor Bersih perdagangan	9,7 Milyar	13 M	Perdagangan	Disperindag
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Penerapan IPTEK dalam sistem Produksi	60 IKM	110 IKM	Perindustrian	Disperindag
Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam struktur ekonomi daerah	Mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin	Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang menerima bantuan pembiayaan	50 Koperasi dan 350 UMKM	100 koperasi dan 550 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumberdaya produktif	40 Koperasi dan 400 UMKM	60 Koperasi dan 525 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah dilatih	15 Koperasi	30 Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
					350 UMKM	825 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dari aspek organisasi/ kelembagaan, permodalan dan usaha	85 Koperasi	145 Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu dengan memperhatikan aspek konservasi	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan SDH berwawasan lingkungan	3 Kelompok LMDH	28 kelompok	Kehutanan	Dishutbun
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lahan kritis di Kabupaten Tulungagung	2.500 Ha	1.400 Ha	Kehutanan	Dishutbun
				Bertambahnya populasi hijauan di lahan kritis	1,5 juta batang	4.404 batang	Kehutanan	Dishutbun
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Instensitas pembinaan SDM dalam perlindungan dan konservasi SDH	Jumlah Pembinaan Teknis 1 kali setahun	24 kali setahun	Kehutanan	Dishutbun
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi akan pentingnya konservasi	20 sekolah	50 sekolah	Kehutanan	Dishutbun
				Jumlah bibit yang dibantukan	2,460 btg	5000 btg	Kehutanan	Dishutbun



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Presentase Gapoktan yang terfasilitasi	67,00%	90,00%	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
				Jumlah kelembagaan petani	Jumlah kelompok Pemula 269, lanjutan 710, Madya 130, Utama 3	Pemula 177, lanjutan 710, Madya 205, Utama 20	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
			Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Intensitas penerapan teknologi spesifikasi lokasi dan adopsi inovasi teknologi petani	4 unit SLPTT	26 unit SLPTT	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
<b>MISI VI</b>	<b>Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu</b>							
Menurunnya jumlah penduduk miskin	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan & pro rakyat	Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Kemiskinan	9,90%	9,06%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya kreatifitas masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan BKAD/UPK PNPM-MPd	100%	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
				Cakupan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	30%	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan kepala desa	43%	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
				Pembinaan BPD	0%	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan	Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 % terselesaikan	90%	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,18	3,12	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan	Melakukan upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	18%	22%	Sosial	Dinsosnakertrans
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus	Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	30%	40%	Sosial	Dinsosnakertrans

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase PMKS yang tertangani	12%	15%	Sosial	Dinsosnakertrans
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelembagaan organisasi perempuan yang dibina	80%	90%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Intensitas koordinasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 x	5 x	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
	Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga TKI	Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga TKI	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya RAD Bina Keluarga TKI	Belum ada	ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
				Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI	3 klmpk	15 klmpk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
				Pemetaan Keluarga TKI	Belum ada	ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Program-program yang dapat dilaksanakan baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta operasional pemerintahan menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

#### **1. URUSAN PENDIDIKAN**

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
- 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 4) Program Pendidikan Menengah
- 5) Program Pendidikan Non Formal
- 6) Program Pendidikan Luar Biasa
- 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

#### **2. URUSAN KESEHATAN**

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- 11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- 13) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- 14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 17) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 19) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
- 20) Program Pelayanan Kesehatan Askes PNS
- 21) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Kabupaten Tulungagung

### **3. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 3) Program Pembangunan turap/talud/bronjong
- 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- 6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- 7) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan
- 9) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 10) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 11) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- 12) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
- 13) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 14) Program pengendalian banjir
- 15) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 16) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
- 17) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
- 18) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
- 19) Program Penyediaan Sanitasi
- 20) Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan
- 21) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

#### **4. URUSAN PERUMAHAN**

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
- 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

#### **5. URUSAN PENATAAN RUANG**

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
- 2) Program Pemanfaatan Ruang
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- 1) Program Pengembangan data/informasi
- 2) Program Kerjasama Pembangunan
- 3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh



- 5) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 9) Program Perencanaan Sosial Budaya
- 10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 11) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

## **7. URUSAN PERHUBUNGAN**

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
- 8) Program Pengembangan dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
- 9) Program Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komunikasi masyarakat dan pengembangan media massa

## **8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

- 7) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
- 8) Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- 9) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- 10) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

#### **9. URUSAN PERTANAHAN**

- 1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
- 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- 4) Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan

#### **10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

#### **11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 2) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
- 5) Program Keluarga Berencana
- 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri

#### **12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 3) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri

- 5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- 6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- 7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
- 8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- 9) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 10) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

### **13. URUSAN SOSIAL**

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 8) Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim

### **14. URUSAN KETENAGAKERJAAN**

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

### **15. URUSAN KOPERASI DAN UKM**

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 5) Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
- 6) Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif
- 7) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

#### **16. URUSAN KEBUDAYAAN**

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

#### **17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- 6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

#### **18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 3) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- 6) Program pendidikan politik masyarakat
- 7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 9) Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati

**19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 9) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Program Pendidikan Kedinasan
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 14) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah
- 15) Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- 16) Program Optimalisasi Kelembagaan

## **20. URUSAN KETAHANAN PANGAN**

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( pertanian / perkebunan )
- 2) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

## **21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- 6) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

## **22. URUSAN STATISTIK**

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

## **23. URUSAN KEARSIPAN**

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

## **24. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
- 4) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

- 5) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

## **25. URUSAN PERTANIAN**

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 11) Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertanian/Perkebunan

## **26. URUSAN KEHUTANAN**

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- 4) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
- 5) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- 6) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

## **27. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- 2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

- 3) Program pemetaan potensi tambang secara bertahap
- 4) Program pengembangan diversifikasi energi dan energi baru terbarukan

## **28. URUSAN PARIWISATA**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan
- 4) Program Pengembangan Promosi Pariwisata
- 5) Program Pengembangan Ekonomi Produktif

## **29. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
- 3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- 4) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
- 5) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- 6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 8) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 10) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

## **30. URUSAN PERDAGANGAN**

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Internasional
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



- 5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 6) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sektor Perdagangan
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar

### **31. URUSAN PERINDUSTRIAN**

- 1) Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Penataan Struktur Industri
- 5) Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial
- 6) Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Industri

### **32. URUSAN TRANSMIGRASI**

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 2) Program Transmigrasi Lokal
- 3) Program Transmigrasi Regional

Sedangkan program-program prioritas dalam arti yang memberikan dukungan secara langsung terhadap visi misi Kabupaten Tulungagung untuk jangka waktu lima tahun ke depan dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel VIII.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Serta Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Tulungagung**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
MISI I :	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan														
Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	1:30	1:30	3.500.000	1:30	3.710.000	1:30	3.932.000	1:30	4.168.000	1:30	4.400.000	1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rasio Murid per Kelas tk SMP/MTs	1:30	1:30		1:30		1:30		1:30		1:30		1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rasio Murid per Kelas tk SMA/SMK/MA	1:41	1:41		1:40		1:39		1:38		1:36		1:36	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah tk SD/MI	0,02%	0,02%		0,02%		0,02%		0,02%		0,01%		0,01%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah tk SMP/MTs	0,59%	0,59%		0,58%		0,57%		0,56%		0,55%		0,55%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persen anak bersekolah di SD/MI (APK)	103,91%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	99,80%	99,81%		99,83%		99,85%		99,87%		99,90%		99,90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)	78,40%	79,72%		81,04%		82,36%		83,68%		85%		85,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Angka Melek Huruf Usia 10 tahun ke atas	94,34%	94,36%		94,38%		94,40%		94,42%		94,44%		94,44%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persen anak bersekolah di SMP/MTs (APK)	97,62%	97,90%		98,18%		98,46%		98,74%		99,00%		99,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rata-rata lama sekolah	7,86	7,87		7,88		7,89		7,90		7,91		7,91	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah tk SMA/MA/SMK	0,81%	0,81%	1.200.000	0,80%	1.320.000	0,80%	1.452.000	0,79%	1.597.200	0,78%	1.756.920	0,78%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Prosentase anak bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)	69,53%	70,53%		71,53%		72,53%		73,53%		75%		75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru SD/MI berkualifikasi S1	66%	67%	650.000	69%	689.000	70%	730.340	71%	774.160	73%	820.610	73%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase guru SD/MI berkualifikasi S2	0,07%	0,25%		0,44%		0,62%		0,81%		1%		1%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S1	88%	90%		92%		93%		95%		97%		97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMP/MTS berkualifikasi S2	3,60%	3,68%		3,76%		3,84%		3,92%		4%		4%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S1	90%	92%		94%		96%		97%		99%		99%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMA /SMK/MA berkualifikasi S2	6,30%	6,44%		6,58%		6,72%		6,80%		7%		7%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Guru SD/SMP/SMA, SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	77%	77%		79%		81%		83%		85%		85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SD	68,83%	71,06%	14.000.000	73,29%	15.400.000	75,52%	17.248.000	77,75%	19.662.720	80,00%	22.612.128	80,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMP	86,70%	86,95%	6.000.000	87,20%	6.300.000	87,45%	6.615.000	87,70%	6.945.750	87,95%	7.293.038	87,95%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas ruang Kelas SMA/SMK	96%	96,10%	7.000.000	96,35%	7.700.000	96,60%	8.470.000	96,85%	9.317.000	97,10%	10.248.700	97,10%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah RKB terbangun tingkat SMP/SMA/SMK	14 RKB	14 RKB		14 RKB		14 RKB		14 RKB		14 RKB		84 RKB	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan dan sarana prasarannya	1 unit mobil perpustakaan	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.100.000	1 Unit	1.210.000	1 Unit	1.331.000	1 Unit	1.464.100	1 Unit	Pendidikan	KPAD
		1 unit motor perpusling	1 Unit		2 Unit	-	3 Unit	-	4 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	Pendidikan	KPAD
		1 perpusda	1		1	-	1	-	1	-	1	-	1 Unit	Pendidikan	KPAD
	Prosentase penerapan sistem e-Library	0%	10%		15%		20%		30%		40%		40%	Pendidikan	KPAD
	Pembinaan tenaga kecamatan perpustakaan	19 perpus kecamatan	19		19	-	19	-	19	-	19	-	19 Unit	Pendidikan	KPAD
		23 perpus desa	26		29	-	32	-	35	-	38	-	38	Pendidikan	KPAD
		18 taman bacaan	19		20	-	21	-	22	-	22	-	22	Pendidikan	KPAD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
		135 Perpustakaan Sekolah	145		155		165		175		185		185	Pendidikan	KPAD
		60 Orang tenaga pengelola perpustakaan	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		360 orang	Pendidikan	KPAD
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Prosentase penerapan sistem kearsipan secara baku pada SKPD	15%	20%	250.000	25%	275.000	30%	302.000	35%	332.000	40%	366.000	40%	Kearsipan	KPAD
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase PAUD yang menerima bantuan	30%	33%	200.000	36%	220.000	39%	242.000	42%	266.200	45%	292.820	45%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lembaga/siswa penerima BOS jenjang SD dan SMP	765 Lmbg/124.246 siswa	765 Lmbg/124.246 siswa	18.000.000	765 Lmbg/124.246 siswa	19.800.000	765 Lmbg/124.246 siswa	21.780.000	765 Lmbg/124.246 siswa	23.958.000	765 Lmbg/124.246 siswa	26.353.800	765 lembaga/124.246 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah lembaga/siswa penerima BOSDA jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	436 lembaga/44.741 siswa	436 lembaga/44.827 siswa		436 lembaga/44.913 siswa		436 lembaga/44.999 siswa		436 lembaga/45.085 siswa		436 lembaga/45.171 siswa		436 lembaga/45.171 siswa		
Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga/siswa penerima BOS SLTA (SMA/SMK Negeri dan Swasta)	48 lembaga/24.809 siswa	48 lembaga/24.895 siswa	5.000.000	48 lembaga/24.981 siswa	5.500.000	48 lembaga/24.067 siswa	6.050.000	48 lembaga/25.153 siswa	6.655.000	48 lembaga/25.239 siswa	7.320.500	48 lembaga/25.239 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan jumlah PAUD	248	248	150.000	250	159.000	250	168.540	252	178.652	252	189.372	252	Pendidikan	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Pendidikan Menengah	Cakupan lembaga yang memiliki MoU dengan Dunia Usaha	3 lembaga	3	100.000	3	105.000	5	120.750	5	132.825	5	146.108	5 lembaga	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Bantuan Bea Siswa dalam rangka mendukung proses belajar mengajar siswa di Kabupaten Tulungagung	10 lembaga/300 siswa	15 lembaga/330 siswa	500.000	17 lembaga/360 siswa	550.000	19 lembaga/390 siswa	605.000	21 lembaga/420 siswa	665.500	23 lembaga/450 siswa	732.050	23 lembaga/450 siswa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan terhadap organisasi seni dan budaya	31 organisasi	31 organisasi	600.000	33 organisasi	725.000	35 organisasi	750.000	37 organisasi	675.000	39 organisasi	750.000	39 organisasi	Kebudayaan	Disbudparpora
	Jumlah situs budaya yang dikelola	1	6		8		8		6		7		36	Kebudayaan	Disbudparpora
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Organisasi kepemudaan yang sehat dan eksis	12 organisasi	12 organisasi	450.000	12 organisasi	475.000	15 organisasi	550.000	15 organisasi	550.000	15 organisasi	550.000	15 organisasi	Pemuda dan Olahraga	Disbudparpora
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	4.420 atlet	4.862 atlet	3.500.000	5.348 atlet	3.850.000	5.883 atlet	4.235.000	6.471 atlet	4.658.000	7.118 atlet	5.124.350	7.118 atlet	Pemuda dan Olahraga	Disbudparpora
MISI II :	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas														
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,0	3,0	2.700.000	3,2	2.970.000	3,4	3.267.000	3,6	3.593.700	3,8	3.953.070	3,8	Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	9	10	200.000	11	220.000	12	242.000	13	266.200	13	292.820	13	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Rasio bidan per 100.000 penduduk	36	37		38		39		40		41		41	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Rasio perawat per 100.000 penduduk	74	76		78		80		82		83		83	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesda	29,5%	31%	54.000.000	31%	59.400.000	32%	65.000.000	32%	71.500.000	32%	78.650.000	32%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin Jamkesmas	54,09%	56%	-	57%	-	58%	-	58%	-	58%	-	58%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesmas)	11,38%	15%	-	17,5%	-	20%	-	22,5%	-	25%	-	25%	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda)	10,54%	11%		12%	-	13%	-	14%	-	15%	-	15%	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin non kartu	3,02%	4%		5,5%		7%		8,5%		10%		10%	Kesehatan	RSUD Dr. Iskak
	Cataract Surgery Rate (CSR) / Angka Operasi Katarak	239 jiwa	282		325		368		411		456		456 jiwa	Kesehatan	Dinkes dan RSUD Dr. Iskak

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundangan terbaru	70%	72%	100.000	75%	110.000	78%	121.000	80%	133.100	82%	146.410	82%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	35,32%	40%	1.400.000	45%	1.540.000	50%	1.694.000	55%	1.863.400	65%	2.049.740	65%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	6,3%	7%		7,5%	-	8%	-	8,5%	-	9%	-	9%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	82,93%	85%		89%	-	90%	-	90%	-	95%	-	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita	16,99%	20%	750.000	25%	825.000	30%	907.500	35%	998.250	40%	1.098.075	40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB	38%	40%		40,8%		41,6%		42,4%		43,3%		43,3%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	94,44%	95%		96%		98%		99%		100%		100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Cakupan penemuan dan penanganan Diare	55,86%	60%		70%		80%		85%		90%		90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan malaria	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	74%	75%		76%		77%		78%		79%		79%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Usia Harapan Hidup	71,8	71,81	700.000	71,83	735.000	71,85	808.500	71,87	890.000	71,89	979.000	71,89	Kesehatan	Dinas Kesehatan/RSUD Dr. Iskak
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	250.000	100%	275.000	100%	300.000	100%	330.000	100%	363.000	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	80%	82%	2.500.000	84%	2.625.000	86%	2.760.000	88%	2.900.000	90%	2.960.000	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	80%	82%	10.000.000	84%	10.500.000	86%	11.000.000	88%	11.500.000	90%	12.000.000	90%	Kesehatan	RSU Dr. Iskak
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Prosentase ketersediaan perbekalan farmasi rumah sakit	100%	100%	30.019.380	100%	33.021.000	100%	36.232.000	100%	38.139.000	100%	41.953.000	100%	Kesehatan	RSU Dr. Iskak
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	95%	2.500.000	95%	2.750.000	95%	3.025.000	95%	3.227.000	95%	3.660.000	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan bayi	94,79%	95%	200.000	95%	210.000	95%	220.500	95%	231.000	95%	243.000	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,57%	90,00%	700.000	90,00%	735.000	90,00%	808.500	90,00%	890.000	90,00%	979.000	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,72%	70%		75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	78,1%	78,30%	200.000	78,60%	220.000	78,70%	242.000	78,90%	266.000	79,00%	295.000	79%	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA KB
	Intensitas pembinaan petugas penyuluh KB dalam setahun	2 x	2 x		2 x		3 x		3 x		4 x		4 x	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA KB
MISI III : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis															
Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Keg	1 Keg	100.000	1 Keg	110.000	1 Keg	121.000	1 Keg	135.000	1 Keg	150.000	1 Keg	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Organisasi
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon II	9%	12%	800.000	15%	880.000	18%	970.000	21%	1.065.000	25%	1.125.000	25%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi
	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon III	50%	52%		54%	-	56%	-	58%	-	60%	-	70%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Persentase Kesesuaian Kompetensi Teknis, Tugas dan Fungsi PNS dengan Tugas dan Fungsinya, Pejabat Eselon IV	35%	40%		45%	-	50%	-	55%	-	60%	-	60%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah / Bag. Organisasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pelaksanaan Bintek/Pelatihan PNS	3 Kali bintek	3	300.000	3	330.000	3	363.000	4	400.000	4	440.000	4	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase kelengkapan fitur aplikasi SIMPEG online	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Prosentase Jumlah pelanggaran disiplin yang terselesaikan	70%	74%		78%		82%		86%		90%		90%	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah/ Inspektorat

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Optimalisasi Kelembagaan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD	Ada	Ada	200.000	Ada	210.000	Ada	220.000	Ada	231.000	Ada	245.000	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Pemerintahan / Bag. Organisasi
	Tersedianya dokumen LAKIP	Ada	Ada		Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Organisasi
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penerapan IT pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	2 Sistem IT	ada	600.000	ada	625.000	ada	650.000	ada	675.000	ada	700.000	2 Sistem IT	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Dispenda
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Website SKPD yang menginduk ke Domain Kab Tulungagung/ Jumlah website SKPD yang ada *100	39	39	200.000	40	210.000	41	220.500	42	231.525	43	243.101	43	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dishub Kominfo/Humas

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Masyarakat serta Penggunaan Media Massa	Terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui media yang dimiliki	6 KIM	9 KIM	150.000	12 KIM	150.000	15 KIM	150.000	18 KIM	150.000	21 KIM	150.000	21 KIM	Komunikasi dan Informatika	Dishub Kominfo/Humas
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pelayanan Perijinan Online	0	2	400.000	4	450.000	6	500.000	8	550.000	10	600.000	10	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
	Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	103 ijin	103 ijin		106 ijin	-	109 ijin	-	112 ijin	-	115 ijin	-	115 ijin	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kades, Perangkat Desa, RT dan RW	100%	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	52.800.000	100%	58.000.000	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Bag. Pemerintahan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Pelayanan Publik	Ada	Ada	100.000	Ada	110.000	Ada	120.000	Ada	125.000	Ada	130.000	Ada	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Organisasi
Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	58%	64%	800.000	71%	950.000	77%	1.100.000	83%	1.250.000	90%	1.400.000	90%	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispenduk Capil/Kecamatan
Program pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya pembinaan politik masyarakat	125 Orang	135	100.000	145	110.000	155	125.000	165	160.000	165	165.000	165 Orang	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7 kali sosialisasi	7	300.000	7	315.000	7	330.000	8	350.000	8	360.000	8 kali sosialisasi	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Hukum
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / jumlah pelanggaran PERDA x 100%	100%	100%	250.000	100%	275.000	100%	300.000	100%	330.000	100%	365.000	100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Koordinasi dalam Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1 X	2 x	100.000	2 x	110.000	3 x	150.000	3 x	165.000	5 x	250.000	5 x	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Bag. Kesra
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka Kriminalitas	937	932	200.000	927	220.000	923	250.000	918	275.000	917	300.000	917	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Petugas satpol PP (Per Hari)	3 x	3 x	150.000	3 x	155.000	3 x	170.000	3 x	185.000	3 x	200.000	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Petugas Linmas per RT	0,6	0,6	150.000	0,7	155.000	0,8	160.000	0,9	200.000	1	210.000	1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (dalam setahun)	1 x	1x	75.000	2 x	150.000	2 x	165.000	3 x	200.000	3 x	225.000	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi koordinasi lintas agama	1 x	2 x	120.000	2 x	130.000	3 x	200.000	4 x	250.000	5 x	300.000	5 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama	0	1 x	75.000	1 x	80.000	2 x	150.000	2 x	160.000	3 x	200.000	3 x	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbangpol
MISI IV :	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain														
Program Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum dalam daerah	ada ( Jumlah trayek MPU = 143 trayek )	ada	700.000	ada	700.000	ada	700.000	ada	700.000	ada	700.000	ada	Perhubungan	Dishub Kominfo
	Tersedianya bis sekolah gratis	4 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		9 unit	Perhubungan	Dishub Kominfo
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya halte pada tiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	4 Unit	1 unit	11.525.000	1 unit	12.525.000	1 unit	13.525.000	1 unit	14.525.000	1 unit	15.525.000	9 Unit	Perhubungan	Dishub Kominfo
	Tersedianya terminal angkutan penumpang dan Terminal Cargo/ Terminal Bongkar Muat	1 Unit terminal penumpang	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		2 Unit terminal penumpang dan terminal cargo	Perhubungan	Dishub Kominfo

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.220 Km	1255 Km	25.000.000	1290 Km	27.500.000	1325 Km	30.000.000	1360 Km	32.500.000	1397 Km	35.000.000	1.397 Km	Pekerjaan Umum	PU BMCK
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	30%	37%	50.000.000	44%	55.000.000	51%	60.000.000	58%	65.000.000	65%	70.000.000	65%	Pekerjaan Umum	PU BMCK
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah ((volume sampah yang terangkut/ volume total sampah) x 100% )	60%	64%	4.500.000	68%	5.000.000	72%	5.500.000	76%	6.000.000	80%	6.500.000	80%	Lingkungan Hidup	PU BMCK
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan SDA	Jumlah koordinasi dan pembinaan pengelolaan SDA = 2 Kali	4 kali	75.000	4 kali	75.000	4 kali	75.000	4 kali	75.000	4 kali	75.000	4 Kali	Lingkungan Hidup	Bag. Sumber Daya Alam
Program pemetaan potensi tambang secara bertahap	Tersedianya peta potensi tambang	Ada	Ada	60.000	Ada	65.000	Ada	70.000	Ada	75.000	Ada	80.000	Ada	Energi Sumber Daya Mineral	Dinas PU Pengairan dan ESDM

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	4.602,77 hektar	4.622,77 hektar	15.763.800	4.642,77 hektar	16.079.076	4.662,77 hektar	16.394.352	4.682,77 hektar	16.837.028	4.702,77 hektar	17.309.942	4.702,77 hektar	Pekerjaan Umum	Dinas PU Pengairan dan ESDM
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Penegakan hukum kasus lingkungan	Kasus terselesaikan 100%	100% terselesaikan	775.000	100% terselesaikan	1.074.000	100% terselesaikan	1.130.000	100% terselesaikan	1.240.000	100% terselesaikan	1.360.000	Kasus terselesaikan 100 %	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
	Kuantitas Pengelolaan Sumber Air	93 lokasi sumber air	6 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		9 lokasi		8 lokasi		134 lokasi sumber air	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
	Kuantitas Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	6 Titik Badan Air	6 titik badan air		6 titik badan air		6 titik badan air		6 titik badan air		6 titik badan air		6 Titik Badan Air	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
	Perolehan Adipura	Memperoleh Adipura	Memperoleh		Memperoleh		Memperoleh		Memperoleh		Memperoleh		Memperoleh Adipura	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan fungsi kota	2 dokumen RDTRK	3 dok	750.000	4 dok	1.000.000	4 dok	1.000.000	4 dok	1.000.000	4 dok	1.000.000	19 dokumen RDTRK	Tata Ruang	Bappeda

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Pencegahan Dini, Penanggulangan dan Pemulihan Bencana serta Dampak Perubahan Iklim	Persentase korban bencana alam yang menerima bantuan	100%	100%	150.000	100%	225.566	100%	8.100	100%	8.909	100%	9.788	100%	Sosial	BPBD
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tertatanya RTH yang ada	100%	100%	2.000.000	100%	2.700.000	100%	2.675.000	100%	2.675.000	100%	2.675.000	100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih	80%	82%	2.350.500	84%	2.600.000	86%	2.850.000	88%	3.150.000	90%	3.500.000	90%	Pekerjaan Umum	DPU BMCK
MISI V : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan															
Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Terpeliharanya sarana prasarana pasar tradisional	12 unit	5 unit	2.100.000	5 unit	2.600.000	5 unit	3.100.000	5 unit	3.600.000	6 unit	4.100.000	32 unit	Perdagangan	Disperindag/ Dispenda
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang di bina	300 IKM	310 IKM	1.500.000	320 IKM	1.600.000	335 IKM	1.700.000	350 IKM	1.900.000	365 IKM	2.100.000	1.980 IKM	Perindustrian	Disperindag

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah	42 HaKI	44 HaKI		46 HaKI		49 HaKI		52 HaKI		55 HaKI		55 HaKI	Perindustrian	Disperindag
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina	25 sentra	25 sentra	300.000	27 sentra	300.000	28 sentra	350.000	29 sentra	375.000	31 sentra	400.000	31 sentra	Perindustrian	Disperindag
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi	8 IKM mendapat fasilitasi dari Pemda untuk mengikuti pameran	5 IKM	600.000	5 IKM	1.200.000	5 IKM	750.000	6 IKM	800.000	6 IKM	850.000	35 IKM	Perdagangan	Disperindag
	Penyelenggaraan pameran promosi produk unggulan daerah skala nasional	0 event	0 event	-	1 event		0 event	-	0 event	-	0 event	-	1 event	Perdagangan	Disperindag
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan	6 Kasus dapat diselesaikan 100%	100,00%	300.000	100,00%	325.000	100,00%	375.000	100,00%	450.000	100,00%	475.000	100,00%	Perdagangan	Disperindag
Program Pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kawasan ekonomi khusus pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	Kawasan Agropolitan dalam tahap pengembangan	1 kawasan	1.500.000	1 kawasan	1.750.000	1 kawasan	1.850.000	1 kawasan	2.100.000	1 kawasan	2.500.000	1 kawasan	Pertanian	Dinas Pertanian & BKPP

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Keberadaan lumbung terbangun	Lumbung yang terbangun 16 unit	3 unit	1.150.000	3 unit	1.280.000	3 unit	1.410.000	3 unit	1.565.000	3 unit	1.685.000	Lumbung yang terbangun 31 unit	Ketahanan Pangan	BKPP
	Jumlah kelompok diversifikasi pekarangan sebagai sumber pangan	Jumlah kelompok P2KP 10, Kelompok KRPL 10	12 kelompok P2Kpdan 12 Kelompok KRPL		14 kelompok P2KP dan 14 Kelompok KRPL		16 kelompok P2KP dan 16 Kelompok KRPL		18 kelompok P2KP dan 18 Kelompok KRPL		20 kelompok P2KP dan 20 Kelompok KRPL		Jumlah kelompok P2KP 20, Kelompok KRPL 20	Ketahanan Pangan	BKPP
	Peserta sosialisasi tentang batasan penggunaan BTP yang dianjurkan	50 Produsen	70 produsen		80 produsen		100 produsen		120 produsen		140 produsen		160 produsen pangan olahan	Ketahanan Pangan	BKPP
	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan ( PPH) = 88,7	89,0		89,3		89,6		89,8		90,0		90	Ketahanan Pangan	BKPP
	Peserta sosialisasi tentang penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal	150 peserta sosialisasi	150 peserta sosialisasi		200 peserta sosialisasi		250 peserta sosialisasi		300 peserta sosialisasi		350 peserta sosialisasi		350 peserta sosialisasi	Ketahanan Pangan	BKPP
	Persentase Kecamatan rawan gizi	5,30%	5,00%		4,75%		4,50%		4,25%		4,00%		4,0%	Ketahanan Pangan	BKPP
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi hasil pertanian/ perkebunan	Jumlah produksi hasil pertanian Padi = 316.444 ton; Jagung = 197.261 ton; Kedelai = 11.039 ton	Padi = 316.444 ton; Jagung = 197.261 ton; Kedelai = 11.039 ton	21.030.000	Padi = 325.809 ton; Jagung = 203.178 ton; Kedelai = 11.370 ton	25.664.000	Padi = 335.583 ton; Jagung = 259.293 ton; Kedelai = 11.711 ton	29.398.000	Padi = 345.650 ton; Jagung = 260.008 ton; Kedelai = 12.062 ton	34.032.000	Padi = 356.029 ton; Jagung = 267.808 ton; Kedelai = 12.423 ton	38.266.000	Padi = 356.029 ton; Jagung = 267.808 ton; Kedelai = 12.423 ton	Pertanian	Dinas Pertanian & BKPP

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
		Jumlah produksi hasil perkebunan Kelapa = 136.000.000 butir; Kelapa = 116.954.000 butir; Tebu = 5.947.000 Kw; Tembakau = 2.522,5 Ton	Kelapa = 136.000.000 butir; Tebu = 6.400.000 Kw; Tembakau = 2.600 Ton		Kelapa = 150.000.000 butir; Tebu = 6.800.000 Kw; Tembakau = 2.680 Ton		Kelapa = 166.000.000 butir; Tebu = 7.000.000 Kw; Tembakau = 2.700 Ton		Kelapa = 176.000.000 butir; Tebu = 7.200.000 Kw; Tembakau = 2.720 Ton		Kelapa = 188.695.000 butir; Tebu = 7.433.750 Kw; Tembakau = 2.800 Ton		Kelapa = 188.695.000 butir; Tebu = 7.433.750 Kw; Tembakau = 2.800 Ton	Pertanian	Dishutbun
	Bantuan sarana prasarana produksi	1 paket	1 paket		2paket		3paket		4 paket		5 paket		5 paket	Pertanian	Dishutbun
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kuantitas produksi peternakan	Produksi daging = 16.590 ton	16.706 ton	1.190.000	16.823 ton	1.200.000	16.941 ton	1.215.000	17.059 ton	1.220.000	17.179 ton	1.225.000	17.179 ton	Pertanian	Dinas Peternakan
		Produksi telur = 42.597 ton	43.022 ton		43.452 ton		43.887 ton		44.326 ton		44.769 ton		44.769 ton	Pertanian	Dinas Peternakan
		Produksi susu = 45.279 ton	45.822 ton		46.372 ton		46.928 ton		47.492 ton		48.062 ton		48.062 ton	Pertanian	Dinas Peternakan
		Sapi Potong 95.800 ekor; Sapi Perah 17.599 ekor; Kambing 175.111 ekor; Domba 4.017 ekor; Ayam Kambing Petelur 3.555.771 ekor; Ayam Pedaging 2.545.500 ekor; Ayam Buras 2.168.144 ekor; dan Itik 428.255 ekor	Sapi Potong 98.674 ekor; Sapi Perah 18.479 ekor; Kambing 178.613 ekor; Domba 4.097 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.596.410 ekor; Ayam Buras 2.211.507 ekor; dan Itik 436.820 ekor		Sapi Potong 101.548 ekor; Sapi Perah 19.403 ekor; Kambing 182.185 ekor; Domba 4.179 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.648.338 ekor; Ayam Buras 2.255.737 ekor; dan Itik 445.557 ekor		Sapi Potong 104.594 ekor; Sapi Perah 20.373 ekor; Kambing 185.829 ekor; Domba 4.263 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.701.305 ekor; Ayam Buras 2.300.852 ekor; dan Itik 454.468 ekor		Sapi Potong 107.732 ekor; Sapi Perah 21.392 ekor; Kambing 189.546 ekor; Domba 4.348 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.755.331 ekor; Ayam Buras 2.346.869 ekor; dan Itik 463.557 ekor		Sapi Potong 110.964 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor		Sapi Potong 110.964 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Kambing Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor	Pertanian	Dinas Peternakan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Stabilnya kualitas produk hasil peternakan	Persentase produk hasil peternakan yang aman 99%	99%		99%		99%		99%		99%		99%	Pertanian	Dinas Peternakan
	Jumlah kelompok agribisnis peternakan	176 kelompok terdiri dari: 40 Kelompok sapi perah, 62 kelompok sapi potong, 5 kelompok ayam ras, 11 kelompok ayam buras, 48 kelompok kambing, 2 kelompok domba dan 8 kelompok itik	183 kelompok terdiri dari: 41 Kelompok sapi perah, 63 kelompok sapi potong, 6 kelompok ayam ras, 12 kelompok ayam buras, 49 kelompok kambing, 3 kelompok domba dan 9 kelompok itik	190 kelompok terdiri dari: 42 Kelompok sapi perah, 64 kelompok sapi potong, 7 kelompok ayam ras, 13 kelompok ayam buras, 50 kelompok kambing, 4 kelompok domba dan 10 kelompok itik	198 kelompok terdiri dari: 43 Kelompok sapi perah, 65 kelompok sapi potong, 8 kelompok ayam ras, 14 kelompok ayam buras, 52 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 11 kelompok itik	206 kelompok terdiri dari: 44 Kelompok sapi perah, 66 kelompok sapi potong, 9 kelompok ayam ras, 15 kelompok ayam buras, 54 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 13 kelompok itik	212 kelompok terdiri dari: 45 Kelompok sapi perah, 67 kelompok sapi potong, 10 kelompok ayam ras, 16 kelompok ayam buras, 55 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 14 kelompok itik	212 kelompok terdiri dari: 45 Kelompok sapi perah, 67 kelompok sapi potong, 10 kelompok ayam ras, 16 kelompok ayam buras, 55 kelompok kambing, 5 kelompok domba dan 14 kelompok itik						Pertanian	Dinas Peternakan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Intensitas pengawasan terhadap kejadian penyakit hewan menular	Persentase Surveillance/kejadian penyakit menular = 82,5%	85%	550.000	86%	605.000	87,50%	660.000	89%	725.000	90%	798.000	90%	Pertanian	Dinas Peternakan
	Persentase wilayah yang terkena wabah (population at risk)	25%	22,50%		20%		18%		16%		15%		< 15%	Pertanian	Dinas Peternakan
	Angka kematian ternak akibat penyakit (mortabilitas)	Mortabilitas = 2%	2%		2%		<2%		1%		<1%		<1%	Pertanian	Dinas Peternakan
Program Pengembangan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Produksi ikan konsumsi = 28.367 ton	28.367 ton	3.150.000	29.786 ton	3.183.000	31.275 ton	3.717.000	32.839 ton	3.752.000	34.481 ton	4.290.000	34.481 ton	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
		produksi ikan hias = 56.324.370 ekor	56.324.370 0 ekor		59.140.589 9 ekor		62.097.618 18 ekor		65.202.499 99 ekor		68.462.624 24 ekor		68.462.624 ekor	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Berkembangnya kawasan Minapolitan	tahap dokumen perencanaan	tahap persiapan		tahap pengembangan		tahap pengembangan		Tahap pengembangan		Tahap pengembangan		Tahap pengembangan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil produksi perikanan tangkap	Produksi = 6.001 ton	6.001 ton	225.000	6.301	236.000	6.616	248.000	6.947	260.000	7.294 ton	273.000	7.294 ton	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jaringan pemasaran produk potensi ekspor	Jumlah eksportir = 4	7 eksportir	1.000.000	10 eksportir	1.100.000	12 eksportir	1.200.000	14 eksportir	1.250.000	16 eksportir	1.400.000	16 eksportir	Perdagangan	Disperindag
	Ekspor Bersih perdagangan	9,7 Milyar	10 M		11 M		11,5 M		12 M		13 M		13 M	Perdagangan	Disperindag
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Penerapan IPTEK dalam sistem Produksi	60 IKM	70 IKM	600.000	80 IKM	650.000	90 IKM	700.000	100 IKM	850.000	110 IKM	900.000	110 IKM	Perindustrian	Disperindag
Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang menerima bantuan pembiayaan	50 Koperasi dan 350 UMKM	60 Koperasi dan 375 UMKM	250.000	70 Koperasi dan 400 UMKM	260.000	80 Koperasi dan 450 UMKM	270.000	90 Koperasi dan 500 UMKM	280.000	100 koperasi dan 550 UMKM	290.000	100 koperasi dan 550 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumberdaya produktif	40 Koperasi dan 400 UMKM	44 Koperasi dan 425 UMKM	875.000	48 Koperasi dan 450 UMKM	1.575.000	52 Koperasi dan 475UMKM	2.100.000	56 Koperasi dan 500 UMKM	2.800.000	60 Koperasi dan 525 UMKM	3.375.000	60 Koperasi dan 525 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah dilatih	15 Koperasi	15 Koperasi	800.000	15 Koperasi	825.000	20 Koperasi	900.000	25 Koperasi	950.000	30 Koperasi	1.000.000	30 Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		350 UMKM	445 UMKM		540 UMKM		635 UMKM		730 UMKM		825 UMKM		825 UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dari aspek organisasi/ kelembagaan, permodalan dan usaha	85 Koperasi	95 Koperasi	100.000	115 Koperasi	125.000	125 Koperasi	150.000	135 Koperasi	175.000	145 Koperasi	190.000	145 Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan SDH berwawasan lingkungan	3 Kelompok LMDH	5 kelompok	450.000	5 kelompok	475.000	5 kelompok	500.000	5 kelompok	525.000	5 kelompok	550.000	28 kelompok	Kehutanan	Dishutbun
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lahan kritis di Kabupaten Tulungagung	2.500 Ha	2,200 Ha	3.198.000	2,000 Ha	2.906.000	1,800 Ha	2.639.000	1,600 Ha	2.323.000	1,400 Ha	2.036.000	1.400 Ha	Kehutanan	Dishutbun
	Bertambahnya populasi hijauan di lahan kritis	1,5 juta batang	1.075 batang		976 batang		890 batang		780 batang		683 batang		4.404 batang	Kehutanan	Dishutbun

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Instensitas pembinaan SDM dalam perlindungan dan konservasi SDH	Jumlah Pembinaan Teknis 1 kali setahun	2 kali	400.000	2 kali	510.000	2 kali	520.000	2 kali	530.000	2 kali	540.000	24 kali setahun	Kehutanan	Dishutbun
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi akan pentingnya konservasi	20 sekolah	40 orang	100.000	60 orang	109.000	80 orang	118.000	100 orang	127.000	120 orang	135.000	50 sekolah	Kehutanan	Dishutbun
	Jumlah bibit yang dibantukan	2.460 btg	1.000 btg		1.000 btg		1.000 btg		1.000 btg		1.000 btg		5000 btg	Kehutanan	Dishutbun
Program Peningkatan kesejahteraan petani	Prosentase Gapoktan yang terfasilitasi	67,00%	70,00%	3.200.000	75,00%	3.325.000	80,00%	3.400.000	85,00%	3.475.000	90,00%	3.525.000	90,00%	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
	Jumlah kelembagaan petani	Jumlah kelompok Pemula 269, lanjutan 710, Madya 130, Utama 3	Pemula 242, lanjutan715, Madya 150, Utama 5		Pemula 220, lanjutan720, Madya 165, Utama 7		Pemula 212, lanjutan715, Madya 175, Utama 10		Pemula 182, lanjutan720, Madya 195, Utama 15		Pemula 177, lanjutan710, Madya 205, Utama 20		Pemula 177, lanjutan710, Madya 205, Utama 20	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Intensitas penerapan teknologi spesifikasi lokasi dan adopsi inovasi teknologi petani	4 unit SLPTT	4 unit	200.000	4 unit	235.000	4 unit	255.000	5 unit	280.000	5 unit	295.000	26 unit SLPTT	Pertanian	Dinas Pertanian dan BKPP
MISI VI:	Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu														
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Kemiskinan	9,90%	9,73%	31.000.000	9,56%	35.000.000	9,39%	40.000.000	9,23%	46.000.000	9,06%	52.000.000	9,06%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan BKAD/UPK PNPB-MPd	100%	100%	425.000	100%	435.000	100%	445.000	100%	455.000	100%	465.000	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
	Cakupan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	30%	40%		50%	-	70%	-	85%	-	100%	-	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan kepala desa	43%	43%	500.000	60%	550.000	80%	605.000	90%	665.500	100%	732.050	100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
	Pembinaan BPD	0%	20%		20%		20%		20%		20%		100%	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPM PD
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 % terselesaikan	60%	150.000	70%	175.000	80%	200.000	90%	225.000	90%	235.000	90%	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans
Program Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,18	3,17	600.000	3,16	650.000	3,15	750.000	3,14	775.000	3,12	800.000	3,12	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	18%	18%	230.000	19%	275.000	20%	315.000	21%	350.000	22%	375.000	22%	Sosial	Dinsosnakertrans
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	30%	32%	110.000	34%	135.000	36%	155.000	38%	175.000	40%	200.000	40%	Sosial	Dinsosnakertrans
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase PMKS yang tertangani	12%	12,5%	150.000	13%	165.000	13,5%	190.000	14%	210.000	15%	225.000	15%	Sosial	Dinsosnakertrans
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelembagaan organisasi perempuan yang dibina	80%	82%	100.000	84%	110.000	86%	120.000	88%	130.000	90%	150.000	90%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2018	URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Intensitas koordinasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 x	2 x	100.000	2 x	110.000	3 x	150.000	4 x	200.000	5 x	240.000	5 x	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya RAD Bina Keluarga TKI	Belum ada	ada	150.000	ada	165.000	ada	180.000	ada	200.000	ada	210.000	ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
	Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI	3 klmpk	5 klmpk		8 klmpk		11 klmpk		14 klmpk		15 klmpk		15 klmpk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB
	Pemetaan Keluarga TKI	Belum ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA KB

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator kinerja daerah mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah adalah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan lain – lain.

Kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi sasaran pembangunan secara umum terkait erat dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung nampak jelas dalam data-data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena data PDRB memuat seluruh variabel dan indikator terkait dengan produktifitas masyarakat, baik berupa barang maupun jasa.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2012 atau awal periode RPJMD ini adalah sebesar 6,99%, diharapkan dengan berbagai instrumen kebijakan daerah yang dilaksanakan selama periode RPJMD dapat tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,54% pada tahun 2018 atau akhir periode RPJMD. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung didorong oleh pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tingginya pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier mengindikasikan bahwa Kabupaten Tulungagung telah bergerak menuju suatu daerah yang berkembang kearah modernisasi. Dinamika budaya dan pola hidup masyarakat yang menempatkan barang dan jasa pada kelompok kebutuhan sekunder dan tersier sebagai kebutuhan yang vital, menunjukkan bahwa penempatan standar kebutuhan hidup minimal semakin naik. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di segala sektor.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Tulungagung berdasarkan atas harga berlaku pada tahun 2013 atau awal periode RPJMD adalah sebesar Rp.20.641.887,38. Hal itu mengandung arti bahwa angka tersebut adalah nilai atas barang

dan jasa yang diproduksi oleh setiap individu masyarakat Kabupaten Tulungagung pada tahun yang bersangkutan. Diharapkan melalui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat mendorong produktifitas masyarakat ini menuju angka Rp.27.615.680,75 pada tahun 2018 atau akhir periode RPJMD.

Prioritas Pembangunan pendidikan diarahkan antara lain pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun serta Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Indikator kinerja pada program dimaksud ditujukan untuk pencapaian indikator makro pendidikan antara lain : Rata-rata lama sekolah, dan Angka Melek Huruf.

Prioritas Pembangunan Kesehatan diarahkan antara lain pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Indikator kinerja pada program dimaksud ditujukan untuk pencapaian indikator makro kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup

Prioritas Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan antara lain pada Program Perluasan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Indikator kinerja pada program dimaksud ditujukan untuk pencapaian indikator makro ketenagakerjaan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Disamping itu perkembangan urusan ketenagakerjaan juga berpengaruh pada indikator makro lainnya yaitu Tingkat Kemiskinan.

Pencapaian target kinerja bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan IPM. Hal ini perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Selanjutnya penetapan target indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.



**Tabel. 9.1**  
**Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	74,49	74,89	75,29	75,69	76,09	76,09
2.	Pertumbuhan Ekonomi	6,99%	7,12%	7,27%	7,36%	7,43%	7,54%	7,54%
3.	PDRB per Kapita (ADHK)	8.994.429,47	9.284.455,34	9.674.019,41	10.080.738,77	10.497.060,38	10.884.316,25	10.884.316,25
4.	PDRB per Kapita (ADHB)	20.641.887,38	22.010.261,03	23.301.660,88	24.762.220,60	26.265.300,67	27.615.680,75	27.615.680,75
5.	Tingkat Kemiskinan	9,90 %	9,73%	9,56%	9,39%	9,23%	9,06%	9,06%
6.	Angka Melek Huruf	94,34%	94,36%	94,38 %	94,40 %	94,42 %	94,44 %	94,44%
7.	Angka rata-rata lama sekolah	7,86	7,87	7,88	7,89	7,90	7,91	7,91
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,18%	3,17%	3,16%	3,15%	3,14%	3,12%	3,12%
9.	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	58%	64%	71%	77%	83%	90%	90%
10.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,80	71,81	71,83	71,85	71,87	71,89	71,89
11.	Panjang Jalan dan jembatan yang berfungsi baik	30%	37%	44%	51%	58%	65%	65%

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kabupaten Tulungagung akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2014-2018); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodisasi RPJMD Kabupaten Tulungagung ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2014-2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tulungagung untuk periode satu tahun.

### 10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2015 hingga 2018. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tulungagung dan mengacu pada RKP Tahun 2019. Hal ini karena pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2014-2018 dengan RPJMD periode 2019-2023, dimana pada tahun 2018 yang merupakan masa penyusunan RKPD 2019, RPJMD Tahun 2019-2023 masih dalam proses penyusunan. Dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Tulungagung juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2019 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

## 10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih
2. Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2018 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018.
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.
5. Renstra SKPD merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
6. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dengan Rencana Strategis, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
7. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

8. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
9. Hal-hal yang terkait dengan rencana alokasi anggaran pada dasarnya tidak bersifat mutlak namun akan menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pendanaan tahun berjalan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 kedalam Renstra-SKPD maupun ke dalam RKPD serta Renja SKPD.

**BUPATI TULUNGAGUNG**

ttd

**SYAHRI MULYO**

Saling sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**  
  
**Ir. HENRY SUGIHARTI, MSI**  
Pimpinan Utama Muda  
09570225 199203 2 003